

KAJIAN ISU RISET  
**AKUNTANSI**  
TERKINI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Raffles Ginting, SE, M.Ak  
Galih Wicaksono, SE, M.Si, Ak.CA  
Ibnu Aswat, SE, M.Ak, Ak  
Lily Anggraini, MSA  
Muhammad Aras Prabowo, SE, M.Ak  
Riri Rumaizha, SE, M.Ak  
Nitri Microsea, SE, MS, MAAC, CFE, Ph.D  
Eka Retnowati, SE, Ak, M.Ak; Elsa, M.Ak  
Elsa, M.Ak.

# KAJIAN ISU RISET AKUNTANSI TERKINI



Penerbit Lakeisha  
2023

## **Kajian Isu Riset Akuntansi Terkini**

Penulis:

**Raffles Ginting, SE, M.Ak**  
**Galih Wicaksono, SE, M.Si, Ak.CA**  
**Ibnu Aswat, SE, M.Ak, Ak**  
**Lily Anggraini, MSA**  
**Muhammad Aras Prabowo, SE, M.Ak**  
**Riri Rumaizha, SE, M.Ak**  
**Nitri Microsea, SE, MS, MAAC, CFE, Ph.D**  
**Eka Retnowati, SE, Ak, M.Ak; Elsa, M.Ak**  
**Elsa, M.Ak.**

Editor:

**Abdurrahman Maulana Yusuf, S.E., M.Sc.**  
**Gati Anjaswari, S.ST., M.AK**

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover: Tim Lakeisha

Cetak I April 2023

15,5 cm × 23 cm, 175 Halaman

ISBN: 978-623-420-686-9

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha  
(**Anggota IKAPI No.181/JTE/2019**)

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: [penerbit\\_lakeisha@yahoo.com](mailto:penerbit_lakeisha@yahoo.com)

Website: [www.penerbitlakeisha.com](http://www.penerbitlakeisha.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR



**D**engan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, atas tersusunnya buku Kajian Isu Riset Akuntansi Terkini. Buku ini disusun dengan memperhatikan kajian-kajian literatur terbaru mengenai riset akuntansi.

Penulis menyadari bahwa Kajian Isu Riset Akuntansi Terkini ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, akhirnya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran untuk lebih baik ke depannya.

Tim Penulis

Jakarta, 2 Maret 2023

# DAFTAR ISI



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1.</b> PENDAHULUAN KAJIAN ISU RISET AKUNTANSII	
<b>BAB 2.</b> AKUNTANSI KARBON.....	10
<b>BAB 3.</b> AKUNTANSI BIRU ( <i>BLUE ACCOUNTING</i> ).....	19
<b>BAB 4.</b> AKUNTANSI LINGKUNGAN.....	35
<b>BAB 5.</b> AKUNTANSI BUDAYA .....	48
<b>BAB 6.</b> AKUNTANSI NUSANTARA.....	66
<b>BAB 7.</b> AKUNTANSI PERKEBUNAN.....	73
<b>BAB 8.</b> AKUNTANSI MENTAL.....	82
<b>BAB 9.</b> AKUNTANSI RUMAH TANGGA.....	97
<b>BAB 10.</b> AKUNTANSI KESEHATAN .....	111
<b>BAB 11.</b> ASSET BERSEJARAH .....	129
<b>BAB 12.</b> AKUNTANSI PARIWISATA.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>155</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>171</b>

# DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.	Kerangka kebudayaan .....	56
Gambar 2.	Kerangka konsep etika dalam kebudayaan .....	63
Gambar 3.	Kerangka konsep etika <i>siri'</i> dalam kebudayaan Bugis .....	64
Gambar 4.	Kerangka etika akuntan suku bugis.....	65
Gambar 5.	Road map penelitian hasil analisa peneliti .....	72
Gambar 6.	Produsen CPO (Ton).....	75
Gambar 7.	Transformasi Aset Biologis.....	77
Gambar 8.	Tahapan <i>Mental Accounting</i> .....	84
Gambar 9.	Mental Accounting dalam Family.....	87
Gambar 10.	Keadaan Finansial dalam 3 Dekade .....	90
Gambar 11.	Tata kelola keuangan / Portofolio Rumah tangga .....	91
Gambar 12.	Mental Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan .....	92
Gambar 13.	Penghasilan yang tak kunjung Cukup .....	102
Gambar 14.	Membagi 3 Rekening tabungan .....	103
Gambar 15.	Sikluas keuangan Rumah Sakit Setyawan, J. (2020). <i>Urgent Principle Shift of Healthcare (Hospital)</i> Accounting (Materi Webinar) .....	113
Gambar 16.	Sistem Penganggaran Kesehatan.....	117
Gambar 17.	Laporan perbandingan anggaran dan realisasi .....	121
Gambar 18.	Contoh dari <i>Budgeting</i> berdasarkan <i>performance</i> atau kinerja.....	122
Gambar 19.	Struktur Transaksi Rumah Sakit .....	122
Gambar 20.	Prinsip-prinsip Aset Bersejarah ( <i>Heritage Asset</i> ) .....	136
Gambar 21.	Rangkaian siklus pada barang <i>direct</i> .....	147
Gambar 22.	Rumus <i>Current ratio</i> .....	150
Gambar 23.	Rumus <i>Quick ratio</i> .....	151
Gambar 24.	Rumus <i>Cash Ratio</i> .....	151
Gambar 25.	Rumus Total Debt to total aset.....	151

Gambar 26.	Rumus Total debt to total liability .....	152
Gambar 27.	Rumus <i>Profit Margin</i> .....	152
Gambar 28.	Rumus <i>Profit Margin</i> .....	153
Gambar 29.	Rumus <i>Return on asset</i> .....	153
Gambar 30.	Rumus <i>Aset Turnover</i> .....	153
Gambar 31.	Rumus Perputaran piutang .....	154

## DAFTAR TABEL



Tabel 1.	Kategori Isu Akuntansi .....	5
Tabel 2.	Contoh perhitungan biaya lingkungan langsung pada Pertambangan.....	43
Tabel 3.	Biaya Tidak Langsung .....	43
Tabel 4.	Pencatatan Biaya Lingkungan dalam Laporan Keuangan Menurut IFAC.....	44
Tabel 5.	Kerangka Kluckhohn, (1951) mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia .....	61
Tabel 6.	Kelompok suku bangsa Indonesia (BPS, 2011).....	68
Tabel 7.	Data Perusahaan Perkebunan Besar di Indonesia Menurut Jenis Tanaman.....	74
Tabel 8.	Contoh Pencatatan Akuntansi Perkebunan .....	80
Tabel 9.	Kesamaan Cara Kerja Pikiran dan Sistem Akuntansi .....	84
Tabel 10.	Model pengawasan rumah tangga dan usia pernikahan ....	89
Tabel 11.	Tentang Arus Kas Sederhana Keluarga .....	106
Tabel 12.	Macam orang dalam megembangkan dana hari tua.....	110
Tabel 13.	Contoh Format Anggaran Line Item.....	118
Tabel 14.	Contoh Jurnal Akuntansi Rumah Sakit.....	124
Tabel 15.	Contoh Buku Besar Akuntansi Rumah Sakit.....	125
Tabel 16.	Contoh Neraca Saldo dalam Akuntansi Rumah Sakit.....	126





## PENDAHULUAN KAJIAN ISU RISET AKUNTANSI

### KONSEP DASAR PENTINGNYA PENELITIAN

**P**enelitian atau riset digambarkan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang pada dasarnya memiliki tujuan dalam proses penemuan, interpretasi, dan perevisian fakta-fakta. Selain itu seperti yang diungkapkan oleh Suhardjono (2021) penelitian juga dikatakan sebagai upaya dalam mencari informasi dalam pemecahan suatu masalah dengan suatu metode ilmiah, sedangkan McMillan dan Schumacher penelitian dikatakan sebagai sebuah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya penelitian dilakukan karena suatu alasan ingin mengetahui sesuatu hal oleh sang peneliti, terkait hal yang ingin diketahui tersebut setelah dilakukan dan diuji coba serta kelayakan, yang mana hasilnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan keakuratannya.

Berikut ini merupakan beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian:

#### 1. Tujuan operasional

Dalam tujuan operasional dimana digambarkan proses identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, dimana nantinya hasil yang diperoleh berupa jawaban yang tepat dari permasalahan yang sudah dirancang sebelumnya.

## 2. Tujuan fungsional

Sebagaimana dalam tujuan fungsional, penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nantinya mendapatkan kebermanfaatannya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

## 3. Tujuan Individu

Dalam tujuan individu, penelitian dilakukan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi. Dari beberapa gambaran di atas yang telah dijelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian memang harus dilakukan, berikut ini dipaparkan lebih lanjut terkait dengan pentingnya dilakukan sebuah penelitian:

- a. Sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat membangun pengetahuan masyarakat umum dan tentunya akan memfasilitasi pembelajaran dalam berbagai aspek bidang ilmu pengetahuan termasuk akuntansi.
- b. Untuk memahami berbagai masalah dalam meningkatkan kesadaran public. Penelitian yang dilakukan sebagai bentuk dari memahami fenomena yang terjadi dalam berbagai aspek termasuk bidang ilmu akuntansi, dari permasalahan tersebut akan muncul sebuah rasa sadar dalam meningkatkan antusias public untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul tersebut.
- c. Sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan menudukung kebenaran. Hadirnya penelitian akan membuktikan sebuah kebohongan yang terjadi pada berbagai aspek, khususnya akuntansi dan akan mendukung kebenaran yang ada.
- d. Untuk menemukan, mengukur dan merebut peluang. Penelitian bertujuan dalam penemuan peluang dari sebuah penyelesaian atau solusi dari sebuah masalah yang ada, melakukan pengukuran peluang tersebut dan merebut peluang yang ada dari solusi yang telah dirancang.
- e. Mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi serta mencari sebuah solusi atas sebuah permasalahan

Perkembangan zaman saat ini membuat seorang peneliti harus selalu mengupdate pola pikir dalam melakukan penelitian. Pembaruan pola pikir harus dilakukan peneliti sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini, dimana peneliti harus menyesuaikan dan menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi serta kondisi dari ruang lingkup bidang keahlian yang akan dijadikan objek penelitian. Sebagai seorang peneliti harus dituntut untuk memiliki ide dan inovasi dalam melakukan penelitian dengan menyesuaikan dengan perkembangan dunia penelitian yang akan dituju. Misalnya: Peneliti akan melakukan penelitian dibidang akuntansi, maka peneliti tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini sedang berkembang dalam dunia akuntansi, dan tentunya harus dengan mengupdate keilmuan untuk memunculkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi perusahaan, pemerintahan, organisasi nirlaba, dsb.

## **ISU PENELITIAN MENUJU SEBUAH DESAIN PENELITIAN**

Isu dikatakan sebagai kabar atau masalah yang belum terbukti faktanya yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau Lembaga. Kehadiran isu dalam lembaga perusahaan atau organisasi tidak dapat diprediksi sebelumnya, dimana diketahui bahwa munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, terjadinya perubahan sosial dan kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Diketahui lebih lanjut juga bahwa isu dapat muncul dikarenakan adanya pencipta isu. Belakangan ini mulai bermunculan isu-isu baik dikalangan ekonomi, politik, dsb. Namun yang dimaksudkan lebih lanjut dalam buku ini terkait pengkajian isu penelitian yang relevan dengan bidang akuntansi, dimana dari isu terkini dijadikan topik penelitian yang disesuaikan dengan spesifikasi bidang akuntansi baru dijadikan sebuah kajian penelitian. Seperti yang kita ketahui saat ini sedang hangat didengar terkait isu implementasi big data dalam berbagai bidang dalam implementasinya dalam segala aspek dan bidang keilmuan, salah satunya dalam akuntansi. Dari isu

yang berkembang tersebut dapat kita kaji lebih lanjut kedalam sebuah topik dan tema penelitian.

Dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan diminati oleh pembaca serta nanti harapannya dapat berguna bagi masyarakat umum, maka topik yang dikaji harus sesuai dengan isu terbaru atau menjadi tren dalam situasi terkini, Berikut ini merupakan tren atau isu terbaru yang bisa dikaji Kembali menjadi sebuah topik penelitian yang menarik:

1. Peralihan Masa Pandemi menuju Endemi

Dalam masa peralihan pandemic menuju endemi terdapat beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari perubahan pola kehidupan, pola komunikasi, dsb. Selain itu jumlah pengeluaran setiap bulannya juga tentu mengalami perubahan berkaitan dengan aktivitas pertemuan tatap muka semakin meningkat yang berdampak pada biaya transportasi yang diperlukan untuk melakukan pertemuan secara offline tersebut, berbeda dengan masa pandemi yang lebih banyak mengeluarkan biaya kuota dalam melakukan aktivitas.

2. Isu Ancaman Resesi Tahun 2023

Dengan Ancaman Resesi Tahun 2023, ada beberapa kajian dampak yang timbul dan ada beberapa startegi yang dipersiapkan dalam masa reseksi tersebut, misalnya dengan mempersiapkan UMKM menjadi berkelas.

3. Isu Profesi Akuntan tak hilang meski industry 4.0

Dalam industry 4.0, dimana pelaku industri melibatkan computer untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia, permasalahannya Ketika semua industry sudah melibatkan computer, akankah profesi akuntan hilang? Fenomena ini menjadi isu yang layak dikaji menjadi sebuah penelitian.

4. Isu Holding BUMN sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi

5. Isu Kenaikan Harga Maskapai penerbangan dalam masa transisi pandemi menuju endemi

Dalam masa peralihan pandemi menuju endemi, sudah banyak kelongaran dari syarat berpergian. Hal tersebut berpengaruh terhadap minat masyarakat berpergian dan berwisata, kabar baik tersebut oleh penyedia layanan wisata dan hiburan seperti dibali dan labuhan bajo serta beberapa kota wisata lainnya. Namun, hal tersebut bertentangan dengan kenaikan harga maskapai penerbangan yang melonjak tinggi, meskipun sudah bebas berpergian dengan syarat yang sudah mulai berkurang, namun kebanyakan masyarakat merasa terkendala dengan mahalnya harga tiket maskapai. Isu tersebut bisa diangkat menjadi sebuah topik penelitian, misalnya: strategi peningkatan pendapatan objek wisata dalam dilema kenaikan harga tiket maskapai penerbangan. Dari Isu tersebut, bisa dikaji kembali sesuai dengan keahlian ilmu masing-masing. Misalnya: Isu peralihan masa pandemic menuju endemi, dari isu tersebut dikaji sebuah fenomena terkait kendala ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan dalam peralihan masa pandemic menuju endemi, dimana sebelum pandemi semua aktivitas berlangsung secara online. Mulai dari belajar, bekerja, dan beberapa pertemuan dilakukan secara virtual, sedangkan pada saat sudah Kembali normal, semua sudah berjalan seperti sediakala. Aktivitas belajar Kembali offline, aktivitas kantor dan beberapa pertemuan sudah Kembali offline, tentunya akan menambah pengeluaran dalam rumah tangga setiap bulannya. Dari Isu tersebut dikembangkan menjadi sebuah konsep penelitian Mental Accounting yang dikaitkan dengan fenomena tersebut yang sudah dikaji sebelumnya.

Dalam Bidang Akuntansi dapat dikaji beberapa Isu Penelitian terkini, berikut merupakan pembagian kategori pengkajian isu Akuntansi Terkini:

Tabel 1 Kategori Isu Akuntansi

No	<i>Sains Accounting</i>	No	<i>Social dan Behaviour Accounting</i>
1	Akuntansi Aset Biologi	1	Akuntansi Sosial
2	Akuntansi Keanekaragaman Hayati	2	Akuntansi Pelanggan

3	Akuntansi Hewan Ternak	3	Akuntansi Kesehatan
4	Akuntansi Karbon	4	Akuntansi Rumah Tangga
5	Akuntansi Laut Biru	5	Akuntansi Aset Bersejarah
6	Akuntansi Pertambangan	6	Akuntansi Zakat
No	<i>Sains Accounting</i>	No	<i>Social dan Behaviour Accounting</i>
7	Akuntansi Perkebunan	7	Akuntansi Pariwisata
8	Akuntansi Hijau	8	Akuntansi Budaya

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan data diatas sudah terpisahkan antara Isu Akuntansi Sains dan Isu akuntansi sosial dan perilaku. Dimana Isu-isu terkini yang tersajikan disesuaikan dengan fenomena saat ini yang sedang menjadi perbincangan. Isu Akuntansi lain dapat berkembang sesuai dengan fenomena dan tren yang ada. Berikut ini merupakan penjabaran beberapa Isu Akuntansi yang akan dikembangkan menjadi sebuah penelitian:

#### 1. Isu Akuntansi Budaya

Kita tahu bahwa Indonesia memiliki 37 Provinsi dan dari setiap daerah tentunya memiliki suku yang beragam termasuk ragam budaya yang dimiliki. Setiap budaya memiliki kekhasan terdiri, setiap suku tentunya memiliki budaya yang identic mulai dari budaya pernikahan, budaya kematian, dsb. Selain iu setiap aktivitas keseharian dalam budaya tersebut bersangkutan dan berkaitan dengan akuntansi atau siklus keuangan. Maksudnya disini bahwa dalam setiap budaya pada daerah masing-masing pasti memiliki pengeluaran dan pemasukan atau kita sebut sisi akuntansi, dan tentunya setiap budaya satu dengan budaya lain memiliki pola masing-masing yang tidak bisa saling diperdebatkan, karena memiliki ciri khas masing-masing, misal: Dalam Budaya Mahar Batak ada yang disebut dengan istilah sinamot,dimana sinamot dikatakan sebagai pembayaran perkawinan dalam bentuk uang dan kekayaan yang diberikan pihak paranak (laki-laki) kepada pihak parboru (perempuan).Dari budaya tersebut kita akan mengkajinya

dari sudut pandang Akuntansi, yang lebih kita kenal dengan Akuntansi Budaya Sinamot.

## 2. Isu Akuntansi Tanaman dan Hewan Ternak

Seperti kita ketahui bahwa ada standar Akuntansi yang membahas terkait perlakuan Aset Biologi, hal tersebut dikarenakan di negara Indonesia setiap tahunnya semakin bertambahnya jumlah perkebunan dan perusahaan hewan ternak, oleh karena itu harus ada standar akuntansi yang mengatur terkait perlakuan akuntansi tanaman dan hewan ternak, Selain itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan perkebunan atau peternakan melakukan kombinasi bisnis sehingga diperlukan juga dasar terkait bagaimana perlakuan dalam hal kombinasi bisnis dalam usaha perkebunan dan peternakan. Mengenai hal ini juga kita ketahui bahwa transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif, maka perlu mengkaji lebih lanjut sesuai dengan fenomena yang ditemukan, misalnya ditemukannya sebuah kombinasi baru antara sapi local dengan sapi jerman yang menghasilkan spesies baru akibat dari perkawinan silang kombinasi, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan setelah dikembangkan dan berhasil.

## 3. Isu Akuntansi Aset Bersejarah

Seperti yang kita ketahui bahwa Setiap daerah pasti memiliki aset bersejarah yang diabadikan dimuseum masing-masing daerah, tentunya setiap aset bersejarah tersebut harus diperlakukan sesuai dengan PSAP, mulai dari perlakuan biaya pemeliharaan, dsb. Namun pada kenyataannya ada beberapa aset bersejarah yang tidak terawat, tidak teridentifikasi dan tidak diungkapkan, maka dari itu fenomena ini bisa diangkat sebagai sebuah isu baru dalam bidang akuntansi.

## 4. Isu Akuntansi Rumah Tangga

Dalam setiap keluarga seperti yang kita ketahui pasti memiliki sumber pemasukan dan sumber pengeluaran, yang menjadi permasalahannya terkait kondisi rumah tangga yang belum tentu

memiliki pembukuan dalam rumah tangga, berkaitan dengan itu belum tentu juga dalam setiap rumah tangga terdapat transparansi keuangan. Konteks permasalahan ini bisa diangkat sebagai sebuah isu yang menarik dalam kajian isu Akuntansi Rumah Tangga.

#### 5. Isu Akuntansi Kesehatan

Pandemi Covid 19 menjadi suatu isu yang cukup lama menyelimuti kehidupan masyarakat, tentunya dalam masa pandemic covid 19 banyak fenomena yang bersinggungan dengan permasalahan kesehatan, jika ditelusuri lebih lanjut pengeluaran masyarakat lebih cenderung besar dalam biaya kesehatan, hal tersebut dapat terlihat dari hamper semua kegiatan resmi membutuhkan swab test/antigen dan membutuhkan pengeluaran yang lebih extra, kewajiban swab test/antigen juga diperlukan ketika ingin berpergian menggunakan maskapai penerbangan. Isu hangat tersebut dapat diangkat menjadi sebuah penelitian yang nanti lebih dikembangkan lagi menjadi penelitian yang menarik dan layak dibaca masyarakat.

#### 6. Isu Akuntansi Pariwisata

Akuntansi pariwisata dikatakan sebagai salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang bersifat aplikatif dalam industri pariwisata. Akuntansi pariwisata bukan hanya mengkaji dari segi objek wisatanya, namun bisa dikaji dari ranah perhotelan maupun turis atau wisatawan. Dari segi perhotelan kita bisa mengkaji terkait prediksi kebangkrutan hotel dikota wisata pada masa pandemi, selain itu kita bisa juga mengkaji biaya hpp hotel antara masa pandemi dan endemi, seperti yang kita ketahui bahwa dalam masa pandemi banyak industri pariwisata yang gulung tikar dan secara perlahan kembali beroperasi kembali pada masa endemi saat ini. Isu tersebut bisa diangkat dan dikaji menjadi sebuah topik penelitian.

## **KONSEP PENGEMBANGAN ISU MENJADI SEBUAH DESAIN PENELITIAN**

Pengembangan sebuah isu menjadi sebuah rancangan penelitian membutuhkan beberapa tahapan, berikut ini merupakan tahapannya:

1. Menentukan tren isu yang akan diangkat
2. Menentukan Fenomena gap
3. Membuat Kerangka Penelitian

Tahapan pertama dengan menentukan tren isu yang akan dijadikan sebuah ide penelitian, misalnya kita mengangkat isu akuntansi budaya, dari isu tersebut kita mencoba mencari fenomena dalam lingkup isu tersebut misalnya ketidakterungkapan dana kematian pada keluarga yang berduka dalam sebuah aturan budaya yang mewajibkan harus adanya kejujuran dan kerungkapan. Setelah menemukan fenomena gap, baru mulai membuat desain atau kerangka penelitian dengan merancang sebuah konteks, konsep, *empirical gap, research gap*, termasuk menentukan tujuan penelitian, karena tujuan dari penelitian akan menentukan terkait metode dan pendekatan penelitian apa yang nanti harus digunakan, tentunya dengan memperbanyak membaca referensi dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang ada.



## AKUNTANSI KARBON

### DAMPAK EMISI KARBON

**D**ewasa ini, dengan semakin rusaknya lingkungan kehidupan diakibatkan pembangunan oleh manusia di segala bidang, tentu saja membuat banyak pihak berpikir keras untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Menurut hasil kajian *United Nations Development programme* (UNDP) menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar didunia, yang disebabkan adanya deforestasi pada sektor perhutanan. Adanya emisi gas mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, serta memberikan ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta aktifitas ekonomi. Dampak terhadap kehidupan masyarakat yaitu berkurangnya aspek kesehatan lingkungan akibat kualitas udara yang menurun. Sedangkan dampak bagi lingkungan yaitu adanya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Lebih lanjut, dampak bagi aktifitas ekonomi maka dapat mengancam kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, yang terganggu akibat kerusakan lingkungan. Beberapa hal tersebut menjadi perhatian dunia, sehingga pada tahun 1997 di Jepang, dicetuskanlah Protokol Kyoto. Perjanjian yang tertuang dalam Protokol Kyoto menjadi tonggak awal terkait penanganan meningkatnya emisi gas yang ada di dunia, yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari industri untuk penanganan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh emisi karbon yang dihasilkan.

## AKUNTANSI KARBON

Dengan adanya berbagai permasalahan terkait emisi karbon, maka timbul suatu pemikiran dalam dunia akuntansi berkaitan dengan akuntansi karbon. Akuntansi karbon pada dasarnya mengandung suatu pemikiran bahwa perlu dimasukkannya suatu hal-hal yang berkaitan dengan karbon pada laporan keuangan. Sehingga dengan munculnya item-item karbon pada laporan keuangan, akan membuat perusahaan dan dunia usaha lebih peduli terhadap upaya pertanggungjawaban atas pelestarian lingkungan. Pada saat ini terdapat standar pengukuran karbon, yaitu *National Carbon Accounting Standards* (NCAS), yaitu standar nasional yang digunakan oleh Australia.

Akuntansi karbon menurut Taurisianti & Kurniawati (2014), merupakan proses pada saat organisasi melakukan penghitungan dan pelaporan atas emisi gas rumah kaca yang mereka keluarkan. Dengan demikian, adanya pencatatan tersebut akan membantu perusahaan dalam menghitung secara akurat mengenai besaran emisi karbon yang dikeluarkan. Sehingga manajemen perusahaan akan berusaha mengatur sedemikian rupa besaran emisi karbon tersebut, karena hasil perhitungan yang dihasilkan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan. Adanya akuntansi karbon juga memperkuat Protokol Kyoto yang telah ditandatangani oleh beberapa negara, serta menjadi suatu perjanjian internasional yang harus ditaati.

Pada Protokol Kyoto, secara garis besar terdapat tiga mekanisme fleksibel, antara lain (Setyaningrum, 2015):

### 1. Implementasi Bersama

Merupakan kesepakatan yang berisi bahwa proses mereduksi emisi karbon dengan cara pengurangan emisi karbon yang terjadi pada negara-negara maju dengan mengalihkannya melalui proyek kerjasama antar negara, yang tujuan akhirnya yaitu untuk mengurangi adanya emisi karbon.

## 2. Perdagangan Emisi

Merupakan proses jual beli emisi antar negara, yang pada umumnya adalah negara industri. Prosesnya dengan cara negara industri yang memiliki emisi gas kaca dibawah ambang batas yang diperbolehkan, dapat memasarkan jatah kelebihan emisi pada negara industri lain yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Namun demikian, jumlah pemasaran emisi gas rumah kaca tetap dibatasi, dengan maksud agar pembeli dapat menyelesaikan kewajibannya.

## 3. Mekanisme Pembangunan Bersih

Merupakan proses yang dilakukan dengan cara membantu negara industri maju untuk target penyelesaian pengurangan emisi karbon, serta negara industry yang tergolong berkembang turut mengimplementasikan program-program untuk pembangunan yang berkelanjutan.

## **AKUNTANSI KARBON DI INDONESIA**

Penerapan Protokol Kyoto di Indonesia dilakukan melalui adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-Undang (UU) tersebut mengatur bagaimana dan upaya apa saja dalam perlindungan lingkungan hidup, serta adanya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui dan tandatangan pada Protokol Kyoto, sehingga wajib untuk menerapkannya dalam aturan kenegaraan yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut Rahmawati dkk (2021), setelah adanya UU tersebut, kemudian diikuti dengan beberapa aturan lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, serta Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Terdapat beberapa hasil kajian atau penelitian mengenai penerapan akuntansi karbon pada perusahaan yang ada Indonesia. Beberapa hasil kajian atau penelitian tersebut yaitu:

1. Nastiti dan Hardiningsih (2022) yang mengkaji tentang determinan pengungkapan emisi karbon, menghasilkan temuan bahwa ukuran, media exposure, serta profitabilitas secara signifikan dan arahnya positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan leverage dan tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Rahmawati dkk (2021) meneliti mengenai peran akuntansi karbon dalam mencegah pemanasan global atau *global warming*. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya akuntansi karbon dapat membantu dalam perluasan wilayah penyerapan gas dari rumah kaca, serta membantu pihak-pihak terkait dalam mengatur agar emisi karbon yang dihasilkan dapat diminimalisir dengan baik.
3. Wiratno dan Muaziz (2020) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon di Indonesia, menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan dalam pengungkapan emisi karbon. Sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam pengungkapan emisi karbon.
4. Pratiwi (2018) yang meneliti tentang implementasi pengungkapan emisi karbon di Indonesia, menghasilkan temuan bahwa pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh faktor regulator dan kepemilikan institusional. Sedangkan faktor ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Taurisianti dan Kurniawati (2014) yang meneliti tentang perlakuan akuntansi karbon di Indonesia, menemukan bahwa penerapan akuntansi karbon dilakukan dengan mengestimasi nilai kewajiban yang menjadi tanggungjawab industri atas timbulnya kerusakan lingkungan, khususnya terkait karbon. Perhitungan estimasi kewajiban melalui metode *exit price accounting*, sehingga besaran kewajiban yang menjadi tanggungjawab perusahaan sesuai dengan nilai karbon di pasar.

## PENGUKURAN

Berdasarkan hasil penelitian Taurisianti dan Kurniawati (2014) pada sektor kehutanan, agar memperoleh hasil yang akurat mengenai pengukuran akuntansi karbon, terdapat beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, dengan melakukan pengukuran kandungan karbon pada setiap pohon dengan mempertimbangkan usia pohon tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pada setiap pohon dalam menyerap karbon yang akan ditetapkan untuk dasar pengakuan besarnya kompetensi dalam penyerapan karbon, yaitu penyerapan karbon yang akan berkurang pada saat ditebangnya pohon.
2. Kedua, menetapkan asumsi besaran harga pasar atas perdagangan emisi karbon. Asumsi tersebut diperlukan untuk mengubah besaran nilai yang berkurang atas potensi karbon yang diserap pada satuan nilai moneter. Dengan adanya nilai moneter berupa nilai uang, maka dapat lebih terukur dan bermanfaat dalam penyajian pada laporan keuangan.
3. Ketiga, menentukan asumsi kurs nilai mata uang, misalkan rupiah kedalam dolar dan begitupula sebaliknya dengan mata uang yang akan disajikan. Dengan adanya asumsi nilai kurs tersebut, akan memudahkan pada saat penyajian dilaporan keuangan, sehingga konsisten. Namun apabila untuk perhitungan pajak, kurs yang digunakan adalah kurs yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 7 hari.
4. Keempat, menetapkan usulan formula atau rumus dalam perhitungan akuntansi karbon. Adanya formula atau rumus yang baku, akan menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam penyajian di laporan keuangan, baik pada periode sekarang maupun pada periode yang akan datang.

## **PENGAKUAN DAN PENCATATAN**

Berdasarkan hasil penelitian Taurisianti dan Kurniawati (2014), bahwa kemampuan penyerapan karbon merupakan aset tidak berwujud, yang secara lebih detailnya yaitu pada *indefinitive intangible asset* sesuai PSAK 19 yaitu aset yang memerlukan adanya amortisasi berdasarkan masa manfaat dan perlu diperhatikan terkait penurunan nilai atas aset tersebut. Penurunan atas nilai aset tersebut juga perlu dilakukan pengujian. Untuk pencatatan pengakuan adanya aset tidak berwujud dilakukan dengan cara:

Aset Tidak Berwujud (D)

Modal (K)

Nilai surplus atau nilai lebih potensi serap karbon dicatat sebagai pendapatan non operasional, sebagaimana tertuang dalam PSAK 23. Untuk pencatatannya dilakukan sebagai berikut:

Kas / Piutang (D)

Pendapatan Non Operasional (K)

Sedangkan apabila terjadi minus atau defisit dalam potensi serap karbon dapat dicatat pada beban non operasional sesuai PSAK 32. Berikut pencatatan apabila terjadi kondisi tersebut:

Beban Non Operasional (D)

Kas (K)

Atas pencatatan estimasi atau perkiraan mengenai kemampuan penghasil emiten karbon sesuai PSAK 57 dan dicatat sebagai provisi atau kewajiban yang diestimasi. Unsur-unsur karbon diakui sebagai provisi karena waktu keterjadian atau jatuh tempo pembyarannya yang belum pasti, sehingga lebih tepat diakui sebagai provisi. Untuk pengakuan kewajiban yaitu pada aspek kewajiban lancar, karena adanya kepastian bahwa kewajiban tersebut setiap tahunnya akan dilakukan *offset* dengan kepemilikan perusahaan atas setiap potensi serap karbon yang dimiliki (Taurisianti dan Kurniawati, 2014).

## **PENYAJIAN**

Penyajian laporan keuangan merupakan upaya yang dilakukan manajemen dalam rangka menyediakan informasi yang handal dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Sehingga dengan adanya penyajian laporan keuangan, maka dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan. Peran akuntan dibutuhkan agar penyajian laporan keuangan tidak bias dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan, serta tidak mengandung salah saji material. Penyajian laporan keuangan meliputi beberapa hal, tidak terkecuali terkait dengan penyajian akuntansi karbon.

Penyajian akuntansi karbon pada laporan posisi keuangan yaitu pada bagian aset tidak berwujud yang disajikan pada bagian aset tidak lancar. Aset tersebut kemudian akan diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Pada bagian kewajiban, perlu dilihat tingkat keterjadiannya. Apabila kemungkinan terjadi diatas 50% dapat disebut dengan provisi, serta disajikan sebagai kewajiban sebagaimana pada umumnya. Namun apabila tingkat keterjadian atas kewajiban tersebut rendah atau sulit untuk diprediksi dengan handal, maka biasa disebut dengan kewajiban kontinjensi, yang perlu diberikan catatan khusus pada Catatan atas Laporan Keuangan (Taurisianti dan Kurniawati, 2014).

## **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan berkaitan dengan bagaimana upaya manajemen mengungkapkan informasi akuntansi secara menyeluruh untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan dibutuhkan agar tidak terjadi misinformasi antara manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Peran akuntan adalah berusaha mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, serta pada setiap bagian laporan keuangan sudah dijelaskan dengan memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan adanya pengungkapan yang memadai, maka diharapkan memberikan

informasi menyeluruh bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak terjadi misinformasi.

Berkaitan dengan pengungkapan akuntansi karbon, secara garis besar terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu pada aset tidak berwujud, aset diestimasi, dan kewajiban diestimasi. Untuk pengungkapan aset tidak berwujud, berdasarkan PSAK 19 perlu diperhatikan mengenai kelas aset tidak berwujud yang dipisahkan antara dihasilkan secara internal dengan aset tidak berwujud lainnya. Sedangkan untuk aset diestimasi, pada PSAK 57 tidak diatur mengenai pengungkapannya. PSAK 57 mengatur mengenai pengungkapan kewajiban diestimasi, yaitu bahwa kewajiban diestimasi, termasuk provisi, perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal seperti: nilai tercatat pada awal dan akhir periode, kewajiban estimasi tambahan pada periode tersebut, jumlah digunakan, jumlah belum digunakan pada periode tersebut, peningkatan pada periode tersebut, uraian mengenai karakteristik kewajiban, indikasi ketidakpastian, serta nilai estimasi pengganti yang akan diterima (Taurisianti dan Kurniawati, 2014).

## **PELAPORAN BIAYA KARBON**

Pelaporan biaya karbon yang merupakan bagian dari *voluntary disclosure*, serta termasuk CSR perusahaan. Perusahaan hendaknya secara aktif dalam penerapan akuntansi karbon, sehingga dapat diketahui bagaimana peran perusahaan membantu program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Secara umum terdapat empat pembagian kategori biaya karbon yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Biaya Pencegahan**

Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya polusi udara. Biaya pencegahan yang dapat dilakukan perusahaan misalkan dengan cara pendidikan dan pelatihan karyawan dalam rangka mencegah kesalahan atau kegagalan.

## 2. Biaya Pendeteksian

Biaya pendeteksian adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendeteksi berbagai penyebab terjadinya polusi udara. Biaya pendeteksian yang dikeluarkan perusahaan misalkan dalam bentuk adanya inspeksi, pengecekan, serta penetapan ukuran dan standar tertentu.

## 3. Biaya Kegagalan Internal

Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat terjadinya polusi udara yang melebihi ambang batas, namun dampaknya belum dirasakan oleh pihak eksternal. Biaya kegagalan internal yang harus dikeluarkan perusahaan misalkan terkait pemeliharaan dan pengoperasianl peralatan dalam rangka mengatasi polusi.

## 4. Biaya Kegagalan Eksternal

Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya polusi udara yang dampaknya dirasakan oleh pihak eksternal, seperti masyarakat sekitar, pencemaran lingkungan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Biaya kegagalan eksternal yang dikeluarkan perusahaan misalkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat akibat terdampak polusi udara, serta adanya klaim atas kesehatan akibat pencemaran.



## AKUNTANSI BIRU (BLUE ACCOUNTING)

### LATAR BELAKANG ADANYA *BLUE ACCOUNTING*

**A**kuntansi biru adalah kreasi berbasis pengetahuan kelautan yang memulai samudra dan samudra sebagai aset ekonomi biru. Akuntansi Biru sendiri merupakan informasi yang penting di Indonesia karena dapat menentukan kekuatan dan kelemahan untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi tentang sumber daya maritim juga akan diinformasikan secara berkelanjutan yang memungkinkan setiap orang untuk mengambil pengakuan dini, keterlibatan tepat waktu dan penilaian hati-hati pada setiap investasi dan keputusan pendanaan yang akan memastikan akuntansi dan stabilitas keuangan dan tentunya meningkatkan perekonomian negara Indonesia sendiri.

Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan memiliki kumpulan terumbu karang serta hutan bakau paling beragam di dunia. Ekosistem laut merupakan aset yang secara terukur mendukung ekonomi, kesejahteraan, dan keberlanjutan nasional. Ekosistem Laut ini Tak kan dapat bertahan lebih lama ketika banyak terjadi kerusakan yang di akibatkanoleh manusia ataupun dikarenakan proses alam. Untuk mmperbaiki ekosistem laut ini perlu adanya campur tangan manusia dalam hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, baik itu lingkungan yang berada di daratan, maupun lingkungan yang

berada di lautan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah laut dan 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan zona ekonomi eksklusif. Hanya ada sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan. Karena perluasan wilayah laut saat ini, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. (Berdasarkan data dari kkp.go.id)

Ekosistem laut ini bukan hanya terumbu karang yang berada di laut namun juga tanaman Mangrove yang berada di pesisir laut. Hutan bakau memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan kita, yaitu:

1. Sebagai tanaman yang dapat menahan arus air laut yang menggerus dataran pantai, mangrove dapat menahan air laut, sehingga tidak menggerus tanah pantai..
2. Seperti fungsi tanaman lainnya, bakau juga berperan sebagai penyerap karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan menghasilkan oksigen (O<sub>2</sub>)..
3. Hutan bakau memiliki peran tersendiri sebagai habitat bagi biota laut yang beraneka ragam seperti ikan-ikan kecil yang dapat mencari tempat berlindung dan mencari makan. Selain biota laut, hutan bakau yang luas seringkali menjadi rumah bagi spesies darat seperti monyet dan burung.
4. Menjadi tempat wisata bagi masyarakat perkotaan yang ingin menikmati suasana hutan bakau.

Mengingat pentingnya tanaman bakau bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, maka diperlukan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi hutan bakau. Solusi yang dapat dihasilkan meliputi sebagai berikut:

1. Lahan penanaman hutan mangrove diperlukan dalam menjaga dan melindungi hutan Terutama hutan bakau agar fungsi hutan mangrove dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.
2. Penanaman kembali hutan bakau yang hancur. Dalam hal ini diperlukan partisipasi teknis antara pemerintah dan warga untuk melakukan penghijauan.

3. Kawasan pesisir yang ditumbuhi hutan bakau harus dikelola dengan baik secara regional agar memiliki potensi ekonomi untuk pariwisata. Keuntungan dari wisata alam tersebut dapat digunakan untuk perlindungan hutan bakau.
4. Konsultasi diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya konservasi hutan bakau bagi lingkungan.
5. Sanksi hukum yang tegas bagi siapapun yang merusak perlindungan hutan bakau. Kelestarian lingkungan sangat penting bagi kami. Perlindungan pohon bakau merupakan bagian dari langkah nyata untuk melindungi alam dan kehidupan. Dimulai dari diri sendiri, lingkungan dipelihara untuk kepentingan hidup dan kehidupan.

Tanaman Bakau dan terumbu karang akan memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir dari berbagai bencana dan mengurangi dampak dari bencana banjir dan bencana tsunami. Ekosistem laut dan pesisir menyimpan potensi "karbon biru" dan membantu negara Indonesia untuk memenuhi komitmen dalam perubahan iklim dan melindungi iklim Bumi dari kerusakan. Ekosistem laut dan pesisir juga menjadi habitat bagi ribuan spesies terumbu karang dan ikan.

Sepertiga terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi memprihatinkan. Hutan bakau juga menyusut karena pembukaan lahan untuk pertanian, pertanian, dan pembangunan pesisir. Dan polusi laut - termasuk sampah plastik yang salah kelola dari kota - terus membebani perikanan, pariwisata, dan logistik.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu tindakan untuk melakukan peningkatan keadaan dan kelestarian lautan dengan bergabung dalam *High-Level Panel on Sustainable Ocean Economy* bersama berbagai negara lainnya dan memasukkan tujuan yang sejalan dengan prinsip ekonomi laut berkelanjutan ke dalam jangka menengah nasional. pembangunan telah dimulai. Rencana (RPJMN). Namun, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan Berbagai Faktor yang ada, di nilai pelu adanya sebuah konsep

perhitungan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini lah yang menjadi perhatian khusus dari *Blue Accounting*. Penyusunan laporan keuangan yang mendasari adanya *Blue Accounting* ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan yang khusus untuk pelestarian lingkungan. Saat ini belum ada standar penyusunan laporan keuangan yang di khusus kan untuk akuntansi biru, hal ini di karenakan akuntansi biru merupakan isu yang masih baru dan masih menjadi pembicaraan di dunia akuntansi.

### **BLUE ACCOUNTING DAN AKUNTANSI AKUAKULTUR**

Akuakultur (*aquaculture*) adalah, menurut U.S. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional membesarkan, memelihara, dan memanen ikan, ganggang, kerang dan habitat lain di semua jenis lingkungan perairan. Ada dua jenis budidaya utama yaitu budidaya air laut dan budidaya air tawar. Tujuan akuakultur meliputi produksi makanan, memulihkan populasi spesies yang terancam dan hampir punah, meningkatkan populasi satwa liar, membangun akuarium, dan memulihkan budidaya dan habitat ikan.

Keilmuan dari Akuakultur dapat menciptakan berbagai bahan makan dan produk lainnya, namun cara serupa dapat digunakan di lingkungan non-komersial untuk memulihkan habitat, memulihkan populasi laut, dan membangun kembali populasi spesies yang rentan dan terancam. Akuakultur dapat dibagi menjadi tiga jenis utama - air tawar, air laut, dan air payau.

1. Budidaya air tawar terjadi pada sungai, danau & kolam
2. Akuakultur berlangsung di laut lepas, wilayah pesisir, dan laguna laut
3. Pertanian air asin terjadi di lingkungan akuatik yang airnya merupakan campuran antara air tawar dan air asin

Akuakultur laut ini mencakup berbagai organisme seperti ikan bersirip, remis, krustasea, tanaman air, dan mikroalga. Modul ini terutama berfokus pada budidaya sirip halus dan teripang dan budidaya alga di lingkungan laut dekat pantai. Sumberdaya laut dapat

menghasilkan potensi yang cukup besar bagi negara karena sumberdaya laut masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh negara. Banyak potensi yang bisa di manfaatkan, salah satu nya adalah potensi perikanan yang dapat di manfaatkan oleh para nelayan, selain itu rumput laut yang dimanfaatkan oleh petani rumput laut. Sehingga potensi-potensi ini ketika di manfaatkan dengan baik akan menghasilkan suatu keuntungan ekonomi bagi negara. Sangat di sayangkan apabila potensi-potensi ini tidak bisa di maksimalkan dengan baik ketika terjadi kerusakan lingkungan, sehingga perlu adanya pencegahan yang baik sehingga potensi-potensi ini tidak hilang begitu saja.

Akuakultur adalah cara merawat atau memelihara organisme akuatik di lingkungan yang dikendalikan manusia. Organisme air ini tidak hanya termasuk dalam spesies ikan (ikan), tetapi juga moluska dan krustasea adalah organisme air dalam arti definisi hukum ikan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 tentang pengertian ikan menjelaskan bahwa “ikan adalah segala jenis organisme yang menghabiskan seluruh atau sebagian daur hidupnya di air”. Akuakultur juga biasa disebut budidaya ikan. Merujuk pada IPSAS 27, hewan dan tanaman merupakan bagian dari aset biologis, sedangkan dalam SAP, belum ada pengaturan khusus terkait hal tersebut. Dalam PSAP 05 Akuntansi Persediaan paragraf 9 dan 11 dinyatakan bahwa jika hewan, ikan, dan tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat maka dicatat sebagai persediaan. Pengakuan hewan dan tanaman diatur secara lebih detail dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat menjadi bagian dari persediaan. Sementara itu, hewan dan tanaman yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional diakui sebagai aset tetap lainnya yang sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset, disajikan secara ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

*Blue Accounting* atau Akuntansi biru hadir sebagai solusi dalam penyajian laporan keuangan yang berbasis kepada pelestarian lingkungan laut. Hal ini merupakan sebuah tanggungjawab dari

pemerintah didalam pelestarian ekosistem laut. Penerapan *Blue Accounting* ini diperlukan untuk melindungi industri pesisir, kualitas air, ekosistem, dan kesehatan manusia. *Blue Accounting* melacak kemajuan dalam upaya untuk: menghentikan pengenalan dan penyebaran spesies melalui jalur prioritas termasuk perdagangan langsung dan berperahu rekreasi; melaksanakan program yang terkoordinasi secara regional untuk mendeteksi spesies baru; dan mengendalikan populasi spesies invasif berbahaya di seluruh wilayah.

Akuntansi biru memiliki tujuan untuk menyoroti keberlanjutan. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan masa depan generasi. Isu keberlanjutan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan Konferensi Tingkat Tinggi tentang lingkungan pada tahun 1972. Untuk pertama kali, ada pengakuan bahwa telah terjadi konflik antara etika lingkungan dan pembangunan. Konflik ini akan merugikan dari sisi lingkungan, karena pemanfaatan lingkungan yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan pelestarian dan perbaikan maka lingkungan perlahan akan rusak dan akan merugikan bagi suatu negara. Dengan menerapkan akuntansi biru maka pelestarian terhadap lingkungan akan tetap terjaga dengan asas keberlanjutan. Sehingga tidak hanya pemanfaatan lingkungan yang akan terus berlanjut tetapi juga konflik persinggungan antara lingkungan dan pembangunan akan dapat dihindari. Terlebih terhadap ekosistem lautan. Lautan Menjadi Penopang daerah Pesisir, apabila ekosistem Lautan terganggu Maka akan berdampak kepada Ekosistem Pesisir, apabila Ekosistem Pesisir terganggu, maka kehidupan masyarakat yang bergantung kepada pesisir juga akan terganggu. Selain itu akan mengakibatkan terjadinya abrasi.

Erosi adalah proses alami berupa pengikisan tanah di wilayah pesisir yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang bersifat merusak dan kadang disebut sebagai erosi pantai. Kerusakan di pesisir salah satunya dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan alam kawasan pesisir. Meskipun abrasi biasanya disebabkan oleh fenomena

alam, namun banyak juga ulah manusia yang menyebabkan abrasi pantai. Secara sederhana, erosi adalah pengikisan daerah pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak atau merusak. Karena pengikisan itu, maka mengurangi daerah pesisir dimana daerah yang paling dekat dengan air laut mengalami erosi. Ada 2 faktor yang menyebabkan keausan. Yang pertama adalah faktor alam, faktor alam yang dapat menimbulkan gesekan, seperti pasang surut, angin laut, gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Tentu saja, keausan alami tidak dapat dihindari, karena laut memiliki siklusnya sendiri. Karena pada waktu tertentu angin bertiup sangat kencang sehingga menimbulkan gelombang besar dan arus laut yang dapat menyebabkan abrasi pantai..

Faktor lainnya adalah faktor manusia. Beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi terjadinya erosi pantai. Salah satunya adalah ketidakseimbangan ekosistem laut, dimana manusia mengeksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran seperti ikan, terumbu karang dan makhluk hidup lainnya. Sehingga jika ada arus atau ombak besar langsung menuju pantai yang bisa menyebabkan lecet. Pemanasan global juga menjadi salah satu pemicu abrasi pantai, misalnya dari lalu lintas kendaraan bermotor atau pabrik industri dan kebakaran hutan. Asap, yang menghasilkan karbon dioksida, menghalangi panas matahari yang dipantulkan dari bumi. Ini memerangkap panas di atmosfer, yang dapat meningkatkan suhu Bumi. Saat suhu bumi naik, es kutub mencair dan permukaan laut naik, yang dapat mempengaruhi daerah pantai dataran rendah. Penambangan pasir secara besar-besaran oleh manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab abrasi pantai. Hal ini secara langsung mempengaruhi kecepatan dan arah air laut saat menyentuh pantai. Karena jika pasir tidak dibawa, pukulan pantai akan semakin besar. Faktor-faktor diatas dapat di tanggulangi dengan berbagai cara sehingga resiko terjadi nya abrasi dapat dikurangi, penanggulangan abrasi ini menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melestarikan lingkungan penanggulangan abrasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tanam pohon bakau. Mangrove adalah jenis pohon yang akarnya dapat mencapai perairan pantai. Umumnya pohon bakau ditanam sejajar dengan pantai untuk membatasi wilayah perairan sekaligus dengan wilayah pantai berpasir. Akar mangrove yang kuat menahan gelombang dan arus laut yang datang ke pesisir, sehingga tidak merusak bebatuan dan tanah di kawasan pesisir..
2. Selamatkan Terumbu Karang. Erosi juga dapat dicegah dengan menjaga terumbu karang. Seperti kita ketahui, terumbu karang berperan sebagai pemecah gelombang. Dengan cara ini, ketika ekosistem terumbu karang diperbaiki, kerusakan dan keausan dapat diminimalkan.
3. Larangan penambangan pasir. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah negara dan pusat yang harus melarang secara tegas penambangan pasir di wilayah tertentu melalui peraturan negara. Pengendalian erosi dapat dilakukan bila masih terdapat cukup pasir di lautan untuk mencegah gelombang menyentuh pantai..

Dari penanggulangan abrasi di atas tentunya ada biaya-biaya yang harus di kelola untuk dapat melakukan penanggulangan resiko yang di akibatkan oleh abrasi. Pengelolaan biaya biaya ini tentunya harus memiliki standar-satandar yang mengatur tentang Pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan Ekosistem laut dan Pesisir ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan ekosistem laut dan pesisir memegang peranan yang sangat penting dalam melestarikan ekosistem laut sekaligus melindungi sumber daya alamnya. Kelestarian ekosistem pesisir sangat bergantung pada pengelolaan manusia yang baik. Selain itu, pemerintah juga harus berinvestasi dalam pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan. Perlunya perawatan yang baik, karena laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang kaya dan telah lama menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Padahal, kekayaan sumber daya alam laut juga turut mendukung perekonomian nasional.

## PENERAPAN AKUNTANSI BIRU

Didalam pelaksanaan dan penerapan akuntansi Biru (*Blue Accounting*) perlu adanya suatu tanggungjawab dari pemerintah di dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah dapat memaparkan ataupun menampilkan pos-pos yang memiliki keterikatan dengan akuntansi biru. Hal ini menjadi penting karena di dalam akuntansi perlu adanya pemaparan dan pengklasifikasian dari berbagai akun dengan tujuan yang tepat sehingga tidak perlu adanya double posting di dalam pelaporan. Dengan menerapkan *Blue Accounting* bersamaan dengan pembangunan daerah, masyarakat nusantara akan memperoleh manfaat dan meningkatkan pendapatannya. Masyarakat pulau tidak perlu meninggalkan kampung halamannya karena ada lapangan kerja yang memakan tenaga kerja sehingga menciptakan nilai ekonomi. Dari sisi pemerintah daerah, 2 (dua) hal harus dilakukan, pertama, pemerintah dan pemerintah provinsi bersama-sama membangun komitmen integrasi konsep pembangunan benua, memperkuat konsep laut. berbasis pengembangan (Akuntansi Biru). Dengan kata lain, mengingat banyaknya kerajaan/kota dengan wilayah laut dan pulau-pulau, sudah saatnya menyatukan konsep pembangunan dengan mengubah trend pembangunan berbasis laut. Kedua, alokasi dana yang proporsional sehingga menguntungkan setiap pemerintah daerah dalam mengelola wilayah lautnya untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang berdaya saing dan khas. Dengan kata lain, dibutuhkan keberanian, tekad dan keberpihakan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBN dan APBD untuk mendukung pembangunan maritim yang berdaya saing. Karena *Blue Accounting* dapat digunakan untuk mensinergikan kepentingan berbagai masyarakat, perusahaan dan birokrasi di bidang transportasi darat-laut, industri maritim, pariwisata, energi dan sumber daya alam, serta pelayaran dan perikanan. Hal ini merupakan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, integrasi dan kesinambungan program/kegiatan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di nusantara.

Melalui *Blue Accounting*, pembangunan daerah harus fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian yang berorientasi input.:

1. Penataan ruang laut, badan air, dan pesisir;
2. Peningkatan kapasitas masyarakat khususnya nelayan;
3. Penggunaan sumber daya alam laut dan air secara efektif dan produktif;
4. menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem;
5. jaminan persediaan;
6. Meningkatkan daya dukung lingkungan;
7. Memperkuat inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
8. Pengembangan industri perikanan ekologis;
9. Kesadaran akan pentingnya pantai, laut dan perairan; dan
10. Konservasi keanekaragaman hayati laut. *Blue Accounting* didasarkan pada manajemen pembangunan yang inklusif untuk memungkinkan masyarakat mengoptimalkan potensi laut yang dikelola untuk kemakmuran.

Pemerintah juga harus mengambil wilayah laut yang mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar penetapan anggaran pembangunan pusat dan daerah. Karena besar kecilnya alokasi anggaran ini merupakan tanda semangat perubahan, yang menyiratkan komitmen dan arah, sekaligus tanda konsistensi pemerintah dalam mendamaikan pembangunan daerah dengan kekhasan nusantara. Hanya dengan kebijakan anggaran inilah perencanaan yang matang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin, hampir miskin, dan sangat miskin pada kelompok keluarga nelayan. Dengan kata lain, menampung laut dan perairan Indonesia yang luas harus meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan/atau bergantung pada laut/perairan untuk mata pencahariannya, dapat sejahtera.

## TUJUAN PENERAPAN AKUNTANSI BIRU

Didalam pelaksanaan penerapan Akuntansi biru ini terdapat berbagai macam tujuan yang di harapkan dari akuntansi biru ini. Tujuan dari penerapan akuntansi biru adalah:

1. Sebagai alat pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, menilai efektivitas tindakan konservasi dengan merangkum dan mengklasifikasikan biaya konservasi ekosistem laut dan pesisir. *Blue Accounting* juga digunakan untuk menentukan biaya peralatan pengelolaan lingkungan laut dan pesisir, menilai tingkat dan pencapaian setiap tahun untuk memastikan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan..
2. Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat pesisir, *Blue Accounting* digunakan untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Tanggapan dan pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap *Blue Accounting* digunakan sebagai umpan balik pemerintah untuk pengelolaan lingkungan laut dan pesisir.
3. Penerapan *Blue Accounting* juga bertujuan untuk menggunakan sistem akuntansi untuk mengetahui berapa biaya lingkungan yang ditimbulkan dari penanganan limbah ini sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan..

Selain itu dengan dilakuk nya pemisahan yang jelas terhadap baya-biaya yang ditimbulkan dari tindakan pelestarian lingkungan ini akan memberikan dampak yang besar terhadap penganggaran yang di siapkan oleh pemerintah guna pelastarian biota laut dan pesisir. Selain itu dengan pemanfaatan ekosistem laut dan pesisir maka akan memberikan berbagai dampak yang positif terhadap masyarakat pesisir sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pastinya akan memberikan keuntungan yang baik bagi pemerintah.

Pemanfaatan pesisir pantai dari penanaman mangrove ini akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga tidak hanya dilihat dari sisi biaya nya sajatetapi juga dapat dilihat dari sisi pendapatan dan potensi untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar pesisir. Sebagai contoh dengan memanfaatkan pesisir pantai yang telah di tanami hutan mangrove maka dapat dibuka

juga peternakan rajungan atau bahkan penangkaran berbagai jenis ikan. Selain itu bahan kayu dari mangrove ini bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk membuat sebuah kerajinan yang memiliki suatu nilai manfaat. Sehingga konsep dari Pendapatan dan Biaya di dalam akuntansi dapat berlaku. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah guna pelestarian pesisir pantai dengan tujuan untuk menghindari adanya abrasi bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan suatu pendapatan yang dapat meningkatkan potensi daerah dan masyarakat dalam berwirausaha. Dan tentunya yang diuntungkan tidak hanya masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemerintah.

## **PENGUKURAN AKUNTANSI BIRU**

Mengukur tingkat perlindungan lingkungan dilakukan sebagai metafora untuk *Blue Accounting*. Karena sudah selayaknya pemerintah menerapkan *Blue Accounting* yang peduli dan berkepentingan terhadap kelestarian ekologi biota laut. Kepedulian dan kepentingan ini diwujudkan oleh pemerintah dengan terlibat dalam peningkatan kinerja ekosistem laut dan pesisir yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi. Karena aktivitas ekosistem laut dan pesisir yang semakin meningkat, pemerintah semakin mendapatkan hak Akuntansi Biru. Distribusi biaya yang timbul dari pengenalan *Blue Accounting* dihasilkan dari pengelompokan aspek-aspek ekosistem laut dan pesisir, yang terlebih dahulu dianalisis pada tingkat perlindungan lingkungan. Misalnya biaya pencegahan kerusakan biota laut dan pesisir dengan penanaman hutan bakau. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup laut dan pesisir ini didasarkan pada tingkat perlindungan lingkungan dari pencemaran yang diberikan oleh perusahaan. Jika negara ingin mengendalikan pencemaran, maka negara menerapkan efisiensi pencemaran dengan melakukan tindakan emisi secara rutin, yang tentunya memiliki biaya. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan *Blue Accounting* sangat kuat. Hasil finansial yang lebih baik dengan mengadopsi *Blue Accounting* dimulai dengan minat

dari publik yang bersedia membayar lebih untuk membeli produk yang lebih ramah lingkungan dan diakhiri dengan penjualan yang lebih tinggi yang meningkatkan kinerja keuangan.

Hal ini menjadi poin penting dalam mengukur *Blue Accounting*, karena pemerintah dapat mempengaruhi keputusan *Blue Accounting* ketika menerapkan *Blue Accounting*. Untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran. Dan, tentu saja, itu diterjemahkan menjadi penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif. Akuntansi biru adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan biaya lingkungan ekosistem laut dan pesisir dan memasukkan biaya tersebut ke dalam keputusan alokasi anggaran. Penerapan *Blue Accounting* merupakan langkah awal dalam penyelesaian permasalahan lingkungan ekosistem laut dan pesisir. Penerapan *Blue Accounting* membantu meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapinya di ekosistem laut dan pesisir. Tujuan dilakukannya akuntansi ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan laut dan pesisir dengan mengevaluasi kegiatan lingkungan laut dan pesisir dari perspektif biaya dan manfaat lingkungan atau manfaat ekonomi.

## **PENGUNGKAPAN AKUNTANSI BIRU**

Saat ini isu Akuntansi Biru menjadi sebuah isu yang baru, seiring dengan kepedulian pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, hal ini menjadikan sebuah peluang pengembangan ilmu akuntansi kearah yang lebih baik dengan adanya akuntansi biru. Pemerintah dapat memanfaatkan keilmuan akuntansi biru ini dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir dengan penggunaan anggaran pelestarian lingkungan dengan baik. Selain itu dengan memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian ekosistem laut dan perisisir akan memberikan manfaat di masa yang akan datang, sehingga menjadi sebuah investasi bagi pemerintah. karena manfaat yang di berikan tidak hanya berupa investasi yang akan menguntungkan bagi pemerintah tetapi juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir. namun disisi lain belum adanya standar yang jelas di dalam

pengaturan *Blue Accounting* atau akuntansi biru ini sehingga mengakibatkan tidak begitu populernya keilmuan terkait *Blue Accounting* selain itu isu lingkungan biota laut ini masih baru.

Sejauh ini Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat digunakan hanya SAP No 06 Tahun 2019 Berkaitan dengan Akuntansi Investasi. Dikatakan mendekati karena pada SAP No 06 tahun 2019 di Jelaskan bahwa pada Pada Poin 19a “Kemungkinan manfaat Ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah” dalam bagian ini dikatakan bahwa adanya manfaat ekonomi dan manfaat social dimasa yang akan datang. Sehingga dengan melakukan penerapan akuntansi biru pada sector kelautan akan memberikan dampak sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Dampak ekonomi dan dampak social yang seperti apa? Untuk dampak ekonomi yang di rasakan oleh pemerintah adalah nantinya dengan adanya hutan mangrove ataupun konservasi terumbu karang akan memberikan manfaat ekonomi seperti, adanya pariwisata terumbu karang dan hutan wisata mangrove. Sedangkan untuk dampak social adalah akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir serta memberika kelestarian lingkungan pesisir.

Informasi dalam *Blue Accounting* membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Ada tiga tingkat pengungkapan, yaitu pengungkapan penuh, pengungkapan wajar, dan pengungkapan memadai. Pengungkapan penuh berarti semua informasi yang diberikan oleh pemerintah, baik keuangan maupun non-keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga informasi dari surat manajemen, perspektif perusahaan, dll. Pengungkapan yang tepat adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Meskipun informasi yang benar adalah informasi yang cukup digabungkan dengan informasi lain yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, seperti B. Peristiwa, kewajiban, dll..

Pemangku kepentingan seperti pemerintah, kreditur, investor, konsumen, karyawan dan masyarakat mengharapkan pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan itu sendiri untuk membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan tentang kebijakan dan program lingkungan. Kehidupan laut dan pesisir di masa depan. Program konservasi biota laut dan pesisir ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan konsumen, dan pada akhirnya masyarakat dan konsumen memiliki kepercayaan yang besar terhadap perusahaan. Kepercayaan ini mendorong konsumen untuk tetap loyal terhadap perusahaan, dan loyalitas ini meningkatkan penjualan produk perusahaan. Pemerintah bisa merencanakan banyak program konservasi biota laut dan pesisir, seperti menanam mangrove dan membangun terumbu karang..

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan akuntansi biru yang mungkin dapat terjadi di dalam pelaporan pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah, baik proses pengesahannya melalui parlemen maupun dalam bentuk peraturan pemerintah, bersifat memaksa. Perusahaan mau tidak mau harus mengikutinya di sini..

#### 2. Penerapan Standar

Penerapan standar pelaporan dan pengungkapan, khususnya terkait dengan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, oleh berbagai badan yang menetapkan standar akuntansi. Di beberapa negara, hal ini meningkatkan kesadaran perusahaan di media sosial.

#### 3. Tekanan *interest group*

Serikat pekerja atau serikat pekerja adalah contoh kelompok penekan yang menekan perusahaan untuk memberikan informasi tentang tanggung jawab sosial.

#### 4. Kesadaran Perusahaan

Faktor terakhir ini didasarkan pada perspektif ekonomi politik. Perusahaan akan aktif terhadap pengaruh sosial dan politik. Akibatnya, perusahaan mengharapkan citra positif di masyarakat.

Dalam pelaporan sosial umum, akuntansi tampaknya tidak memberikan ukuran dampak sosial yang valid. Memang relatif sulit untuk mengukur dan melaporkan secara akurat karena aspek yang diukur bersifat *intangible*. Di bawah ini adalah beberapa cara untuk memperkirakan besarnya manfaat dan biaya sosial. Usmansyah (1989) menyebutkan dalam artikelnya bahwa setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dijadikan pedoman akuntansi sosial, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan biaya dan pendekatan biaya-manfaat..



## AKUNTANSI LINGKUNGAN

**A**kuntansi lingkungan merupakan sebuah topik yang menarik dan tergolong sebuah isu yang *debatable* untuk dibahas di lingkungan akademik maupun pada tataran praktikal di tingkat korporasi. *Business style* saat ini telah berkembang menjadi bisnis yang tidak hanya memperhatikan aspek *profitabilitas*, tetapi beranjak pada tahap yang dapat dikatakan selangkah lebih maju, yakni bisnis yang lebih mempertimbangkan keselamatan ekosistem lingkungan dan sosial masyarakat. Berbagai jurnal ilmiah dan buku mengenai akuntansi lingkungan hadir untuk melengkapi konsep, teori dan praktik mengenai akuntansi lingkungan di dunia internasional, namun berdasarkan hasil penelusuran kajian literatur yang penulis lakukan di Indonesia buku yang membahas mengenai akuntansi lingkungan masih sangat jarang, walaupun ada hanya memuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan kemudian di Bukukan, yang tentunya masih memiliki keterbatasan berupa pembahasan yang hanya terbatas pada teori tertentu, serta hanya membahas satu jenis akuntansi lingkungan saja, sebagai contoh hanya membahas akuntansi lingkungan pada perusahaan minyak dan gas. Sementara, disisi lain akuntansi lingkungan tidak hanya terbatas untuk satu jenis perusahaan atau korporasi saja, akan tetapi meliputi akuntansi lingkungan untuk *various corporations* (beragam korporasi). Artikel ini akan membahas perkembangan akuntansi lingkungan dan konsep akuntansi lingkungan untuk beragam

korporasi. Untuk itu mari kita bahas bersama isu ini pada paragraf-paragraf selanjutnya.

## **PERKEMBANGAN AKUNTANSI LINGKUNGAN**

Sebelum membahas perkembangan akuntansi lingkungan, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan ilmu akuntansi yang mempelajari mengenai biaya atau *cost* yang timbul karena disebabkan oleh aktivitas operasi perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kertas merupakan sebuah korporasi yang menjadikan kertas sebagai komoditas utama untuk diperdagangkan kepada berbagai jenis konsumen. Pada proses produksinya, bahan baku utama untuk memproduksi kertas adalah kayu, yang tentunya kayu berasal dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan. Atas aktivitas tersebut, perusahaan kertas harus dapat memperhitungkan berapa banyak pohon yang mereka tebang dan berapa banyak spesies yang hilang akibat adanya penebangan kayu. Berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut, maka perusahaan harus harus memperhitungkan biaya berkurangnya pohon di hutan dan hilangnya beberapa satwa langka. Setelah biaya-biaya lingkungan tersebut telah dihitung, maka korporasi seharusnya mencatat biaya-biaya tersebut dan memberi kontribusi kepada lingkungan atau istilah lainnya mengganti biaya lingkungan tersebut sebesar biaya kerugian yang telah ditimbulkan. Misalnya, korporasi menyediakan dana untuk penanaman pohon kembali sebesar 1 persen dari laba perusahaan, aktivitas ini tentunya harus tetap dilaporkan pada laporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Walaupun saat ini perusahaan kertas pasti memiliki lahan milik sendiri untuk ditanami pohon, sehingga produksi kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kertas dapat tetap tersedia, akan tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan ekosistem disekitar lahan tersebut. Selain perusahaan kertas, masih banyak lagi perusahaan atau industry yang berkontribusi besar terhadap perubahan ekosistem, yang jika tidak memperhatikan lingkungan dan hanya memandang aspek

*profitabilitas* akan menyebabkan kerugian dan mengancam keselamatan populasi manusia dibumi.

Isu mengenai akuntansi lingkungan mulai populer di era 1970-an dan negara pertama yang memperhatikan isu mengenai akun untuk akuntansi lingkungan adalah Negara Norwegia tepatnya pada tahun 1970. Hal ini didasarkan pada keprihatinan para *expert* lingkungan dan akuntansi yang mulai menyadari bahwa ternyata ketersediaan sumber daya alam dibumi mulai berkurang dari tahun ke tahun, dan kemudian Norwegia mengembangkan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat penggunaan sumber daya alam utamanya sumber daya alam yang terdapat di hutan, laut (perikanan), energy dan juga degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas tanah atau dikenal juga sebagai *soil depletion*. Meskipun dalam teori akuntansi tidak terdapat penyusutan pada akun tanah, namun dalam akuntansi lingkungan tanah dapat menjadi salah satu akun yang mengalami penyusutan dalam hal kualitas dan kultur tanah .

Pada tahun 1980-an, seorang pemerhati akuntansi lingkungan bernama Roefie Hueting yang berasal dari Netherland mendiskusikan dalam artikelnya isu mengenai degradasi dan deplesi yang terjadi pada aset lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas bisnis. Setelah Netherland, Negara Prancis menjadi Negara ketiga yang megadopsi akun untuk akuntansi lingkungan, dimana Negara ini mengembangkan akun yang dianggap lebih kompleks dari akun-akun sebelumnya, diantaranya adalah mengkombinasikan antara akun untuk sumber daya alam, budaya dan juga asset sejarah. Pada tahun 1990-an, *United Nation* dan *World Bank* melaksanakan workshop yang menghasilkan sebuah publikasi yang dapat menjadi sumber literatur khususnya untuk isu akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan terbagi dalam tiga cabang ilmu yakni manajemen akuntansi lingkungan, akuntansi keuangan lingkungan, dan akuntansi lingkungan pada pemerintahan atau dikenal juga dengan istilah *environmental national accounting*. Namun, artikel ini akan berfokus pada akuntansi lingkungan yang dikhususkan untuk pihak korporasi.

## **RUANG LINGKUP AKUNTANSI LINGKUNGAN**

Dasar penerapan akuntansi lingkungan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Yudharma, *et. all.*, 2016). Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa usaha korporasi sebagai salah satu pendorong pembangunan dunia usaha di Indonesia, harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi yakni menerapkan system ekonomi dengan pendekatan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta harus dapat menjaga keseimbangan dalam Negara. Perusahaan diharuskan melaksanakan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan, karena dalam Undang-undang ini, korporasi memiliki peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat dan juga bagi masyarakat.

Akuntansi Lingkungan biasanya diterapkan pada entitas yang berbeda, misalnya perusahaan pertambangan, perusahaan manufaktur, farmasi, rumah sakit, serta jenis perusahaan lainnya. Perbedaan jenis usaha pada korporasi ini menyebabkan timbulnya akun-akun yang bervariasi untuk setiap pelaporan akuntansi lingkungan. Contohnya, terdapat akun yang berbeda antara akun akuntansi lingkungan pada pertambangan dan rumah sakit, hal ini disebabkan perbedaan proses bisnis, bahan baku, dan juga limbah yang dihasilkan oleh setiap entitas. Namun, walaupun akun yang timbul berbeda, namun tahap pencatatan dan perlakuan untuk akun-akun ini cenderung hampir sama. Kesimpulannya, walaupun ruang lingkup akuntansi lingkungan cukup luas, karena mencakup berbagai macam akun untuk perusahaan yang berbeda-beda, namun dalam hal pencatatan dan perlakuan akuntansi terdapat kesamaan.

## **TAHAP PENCATATAN AKUN AKUNTANSI LINGKUNGAN**

Menurut modul akuntansi lingkungan yang diterbitkan oleh Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis jenis usaha dari sebuah entitas,

dengan cara mengumpulkan data mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah dan perkembangan perusahaan, visi misi dan kebijakan, struktur organisasi, jenis dan produk yang dihasilkan, bahan baku dan bahan pembantu, proses produksi, limbah produksi dan pengolahannya, hasil produksi dan pemasaran, penerapan akuntansi biaya lingkungan, penerapan biaya lingkungan dan komponen yang termasuk didalamnya, pengukuran biaya lingkungan, penyajian biaya lingkungan sesuai standar akuntansi keuangan, serta pengungkapan biaya lingkungan.

Menurut Megananda,(2020), biaya lingkungan yang timbul biasanya diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yakni, kelompok asset dan kelompok beban. Biaya yang timbul dapat ditanggihkan pembebanannya, jika memenuhi kriteria sebagai asset, yakni memiliki manfaat ekonomi dimasa depan, dapat diidentifikasi, dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Biaya yang timbul dapat diklasifikasikan sebagai beban jika manfaat ekonomi atas pengeluaran biaya tersebut tidak mengalir ke perusahaan. Hal ini dikarenakan beban merupakan kerugian ataupun beban yang timbul diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Manfaat Biaya dapat dikelompokkan sebagai beban jika terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan dan juga dapat diukur dengan andal. Disisi lain, Hansen dan Mowen (2005) mengklasifikasikan biaya lingkungan sebagai biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan.

Sebagai contoh, pada rumah sakit terdapat biaya yang terkait dengan mesin pengolah limbah, namun biaya tersebut harus dilihat apakah masuk sebagai beban atau asset. Mesin ini dapat digolongkan sebagai jenis asset, jika dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa depan bagi rumah sakit, sebagai contoh jika mesin pengolah limbah ini disewa oleh rumah sakit lain untuk mengolah limbah mereka, maka dapat dikatakan mesin ini digolongkan sebagai asset karena dapat memberikan penghasilan melalui sewa alat pengolah limbah (Megananda, 2020). Selanjutnya, jika terdapat pendapatan yang

masuk sebagai hasil dari sewa mesin, maka dapat dicatat sebagai pendapatan sewa alat pengolah limbah. Sebaliknya, apabila mesin pengolah limbah ini hanya disewa atau rumah sakit menggunakan pihak ketiga untuk mengolah limbah yang dihasilkannya, maka mesin ini dapat digolongkan sebagai beban. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan limbah rumah sakit, jika pihak mesin limbah merupakan milik rumah sakit, maka manajemen harus membayar biaya mesin, serta *cost* lainnya yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan mesin. Sebaliknya, jika rumah sakit hanya menyewa mesin tersebut, maka *beban* yang muncul diantaranya adalah beban sewa, dan juga beban upah pekerja yang harus dikeluarkan untuk para pekerja. Namun, apabila rumah sakit adalah rumah sakit milik pemerintah, maka harus diperhatikan apakah rumah sakit tersebut menggunakan SAK (standar akuntansi keuangan) atau SAP (standar akuntansi pemerintah). Karena metode pencatatan *cost* dalam SAP berbeda dengan pencatatan biaya lingkungan pada SAK. Jika dalam SAP maka biasanya biaya terbagi menjadi 3 bagian yakni asset, beban dan belanja.

Lain halnya dengan perusahaan manufaktur, akun-akun yang timbul juga akan berbeda dengan akun-akun yang terdapat pada rumah sakit. Pada perusahaan manufaktur hal-hal yang harus diungkap diantaranya adalah pengungkapan melalui laporan pertanggungjawaban yang meliputi aliran dan tujuan akhir energy, serta penggunaan air dan bahan baku termasuk limbah yang timbul dari hasil produksi. Pengungkapan selanjutnya juga adalah pengungkapan informasi financial terkait lingkungan, biaya, laba dan penghematan sumber daya atau sering dikenal juga dengan informasi moneter. Tujuan dari pengungkapan informasi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai dampak moneter terhadap proses produksi bahan baku dan produk yang dihasilkan, hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mengendalikan dan mencegah timbulnya limbah serta polusi yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia, contohnya biaya pencegahan kerusakan

lingkungan, biaya pengolahan limbah, dan biaya untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang terdampak polusi dan limbah.

Hal ini berlaku juga untuk perusahaan pertambangan dan kelapa sawit, dalam praktiknya perhitungan kerugian pada lahan hutan tidaklah mudah, karena untuk mendeteksi lahan yang rusak harus menggunakan teknologi landslite satellite yang berfungsi untuk mendeteksi besarnya lahan yang terdampak kerusakan lingkungan akibat adanya pembakaran lahan hutan ataupun penebangan pohon. Setelah luas tanah terdampak dihitung menggunakan landsite, maka hasil ini dibandingkan dengan besarnya kerusakan lahan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian para ahli dapat memproyeksikan besarnya kerusakan lahan yang akan terjadi dimasa depan, sehingga hal ini dapat dicegah. Proyeksi kerusakan lingkungan dapat dicegah dengan cara mengeluarkan biaya pemeliharaan lingkungan agar dampak kerusakan lahan hutan tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya, serta lahan dapat dikembalikan fungsinya seperti semula. Untuk perhitungan cost atas punahnya hewan-hewan yang terdampak dari pembakaran lahan tidaklah mudah, karena perhitungan biaya kepunahan satwa langka sangat sensitive, karena biasanya cenderung dinilai *under-value*. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi ketika merea beroperasi, agar flora dan fauna yang hidup dilahan tersebut tidak mengalami kepunahan yang fatal, karena walaupun biaya kerusakan lingkungan dapat dihitung tapi untuk mengembalikan hewan langka untuk bisa tinggal di ekosistem yang masih dalam tahap pemulihan membutuhkan waktu yang panjang.

Pada industri pertambangan terdapat peraturan menteri No. 07 tahun 2014 mengenai reklamasi, yakni proses penetaan ulang, pemulihan, perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem agar seperti fungsi awalnya. Hal ini dilaksanakan setelah perusahaan pertambangan melaksanakan aktivitas penggalan sumber daya, dan harus dilakukan dengan perencanaan, dan harus memiliki hasil yang berkelanjutan. Artinya lahan yang telah digunakan harus dipulihkan keadaannya hingga siap untuk ditanami flora, sehingga sumber daya

keanekaragaman hayati yang mendiami tempat tersebut dapat kembali ke habitatnya seperti keadaan ekosistem awal.

Tahap-tahap pencatatan akun-akun biaya lingkungan pada perusahaan pertambangan meliputi:

1. Identifikasi dampak buruk perusahaan terhadap lingkungan

Contoh identifikasi Biaya Lingkungan yakni terkait biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tidak langsung meliputi:

- a. Penataan Lahan, jadi sebelum lahan siap untuk dimanfaatkan seperti fungsi awalnya maka harus penanaman lahan, agar menjadi subur dan dapat ditanami tanaman kembali. Tahap ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah. Pada tahapan ini terdapat dua aktivitas utama yakni pengisian tanah kembali dilahan yang telah digali dan penimbunan sampai dengan paling atas tanah.
- b. Pengendalian adanya tanah longsor dan air, seperti pembuatan dan perawatan saluran air. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tanah longsor dan banjir.
- c. Pengelolaan Asam air tambang, pengelolaan air ini tidak dilakukan dilahan terbuka, akan tetapi haru dilakukan di wadah khusus pengelolaan pengendapan lumpur. Hal ini diakukan agar saat air bekas olahan tambang, dapat dialirkan ke sungai sesuai dengan tingkat pH air dilingkungan.
- d. Aktivitas penanaman pohon
- e. Pengembalian dan pemeliharaan hutan

Untuk lebih jelasnya agar semakin mudah dalam mendeskripsikan perhitungan atas biaya aktivitas diatas maka Suyudi & et al., (2020) menawarkan konsep perhitungan biaya lingkungan yang terbagi dalam biaya langsung dan tidak langsung, yakni sebagai berikut.

Tabel 2 Contoh perhitungan biaya lingkungan langsung pada  
Pertambangan

<b>Biaya Penataan Lahan</b>	<b>Jumlah</b>
Pengisian Lahan	Rp. 100.000.000,-
Penimbunan Lahan	Rp. 150.000.000,-
Total	Rp. 250.000.000,-
<b>Biaya Pengendalian Longsor dan Air:</b>	
Pembuatan Saluran	Rp. 50.000.000,-
Pemeliharaan Saluran	Rp. 65.000.000,-
Total	Rp. 115.000.000,-
<b>Biaya Pengelolaan Asam Air tambang:</b>	
Pembelian Kapur	Rp. 45.000.000,-
Tenaga Kerja	Rp. 60.000.000,-
Total	Rp. 105.000.000,-
<b>Biaya Penanaman dan Pemeliharaan Hutan:</b>	
Penanaman Tanaman Penutup	Rp. 55.000.000,-
Penanaman tanaman Inti	Rp. 75.000.000,-
<b>Biaya Penataan Lahan</b>	<b>Jumlah</b>
Pupuk Dasar	Rp. 30.000.000,-
Pemupukan	Rp. 25.000.000,-
Pengendalian Hama dan Penyakit	Rp. 25.000.000,-
Tenaga Kerja Pemeliharaan	Rp. 55.000.000,-
Upah Tanaman	Rp. 35.000.000,-
Total	Rp. 300.000.000,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 770.000.000,-</b>

Sumber: Suyudi (2020)

Tabel 3 Biaya Tidak Langsung

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya Transportasi dan Mobilitas Alat	Rp. 500.000.000,-
Perencanaan Reklamasi	Rp. 250.000.000,-
Administrasi dan Umum	Rp. 100.000.000,-
Supervisi	Rp. 300.000.000,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 1.150.000.000,-</b>

Sumber: Suyudi (2020)

Tabel 4 Pencatatan Biaya Lingkungan dalam Laporan Keuangan Menurut IFAC

<p>Biaya Bahan Produk Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bahan Mentah dan Bahan Pembantu</li> <li>● Bahan Pembungkus</li> <li>● Air</li> </ul>
<p>Biaya Bahan Non-Produk Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bahan Mentah dan Bahan Pembantu</li> <li>● Bahan Pembungkus</li> <li>● Bahan Operasi</li> <li>● Air dan Energi</li> <li>● Pemrosesan Biaya</li> </ul>
<p>Pengendalian Limbah dan Emisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Depresiasi Alat Pengendalian Limbah</li> <li>● Bahan Operasi</li> <li>● Air dan Energi</li> <li>● Jasa Eksternal</li> <li>● Biaya-biaya, Perijinan, Pajak</li> <li>● Asuransi</li> <li>● Pemulihan dan Kompensasi</li> </ul>
<p>Biaya Tidak Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mobilisasi dan Demobilisasi Alat</li> <li>● Perencanaan Reklamasi</li> <li>● Administrasi dan Umum</li> <li>● Supervise</li> </ul>
<p>Biaya-Biaya Pencegahan dan Manajemen Lingkungan Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Depresiasi Peralatan</li> <li>● Tenaga Internal</li> <li>● Jasa Eksternal</li> <li>● Biaya Lainnya</li> </ul>
<p>Biaya-Biaya Penelitian dan Pengembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Depresiasi Peralatan</li> <li>● Tenaga Internal</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jasa Ekternal</li> <li>● Biaya Lainnya</li> </ul>
Biaya Tak Berwujud : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kewajiban Hukum di Masa Depan</li> <li>● Eksternalitas</li> </ul>

Sumber: Suyudi (2020)

2. Pengakuan biaya lingkungan dalam laporan keuangan atas penurunan sumber daya ekonomi. Pengakuan biaya lingkungan dicatat menggunakan metode akrual yakni biaya diakui apabila telah terjadi transaksi. Menurut Suyudi et, al. (2020) biaya reklamasi biasanya dibebankan dalam biaya produksi dan hal ini berpengaruh pada penyajian dilaporan keuangan yakni biaya reklamasi diakui sebagai akun pengurang pada laporan laba rui, yang meliputi biaya sewa peralatan, biaya BBM, dan biaya pencegahan serta pemeliharaan lingkungan.
3. Pengukuran, yang berpedoman pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan.
4. Penyajian dalam laporan keuangan, yang diinput dengan nama-nama akun yang berbeda-beda (dikarenakan belum ada ketentuan baku mengenai akun-akun biaya lingkungan perusahaan
5. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan diklasifikasikan sebagai *voluntary disclosure* artinya bukan merupakan pengungkapan wajib. Namun, yang menjadi problem saat ini belum ada PSAK khusus yang mengatur mengenai format baku penyajian akuntansi lingkungan. Di Indonesia biaya lingkungan biasanya disajikan dalam laporan tanggung jawab social atau dikenal dengan laporan CSR.

## **ISU DAN PENGUKURAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI ARAH BARU DALAM PENELITIAN AKUNTANSI**

Akuntansi Lingkungan menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Saat ini banyak sekali peneliti yang mengangkat isu akuntansi lingkungan yang cakupannya sangat luas,

seperti penelitian dari Carlson et al., (2012) yang mengkaji mengenai peningkatan emisi karbon di daerah hutan Kalimantan, yang menemukan bahwa terdapat sekitar 30 persen dari emisi karbon di dunia dihasilkan oleh produksi kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, Carlson et al., (2012) kemudian memberikan solusi untuk menekan terjadinya dampak lingkungan sekaligus cara menghitung biaya historis dan proyeksi atas kerusakan hutan di Kalimantan. Studi selanjutnya adalah penelitian dari Chung & Molson, (2018) yang menggunakan studi pustaka dan kedua peneliti ini menemukan bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi lingkungan, sebuah perusahaan harus mengacu pada tiga jenis pengungkapan yakni kinerja social korporasi (*corporate social performance*), laporan aktivitas social perusahaan (*corporate social disclosure*) dan kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Burritt & Tingey-holyoak (2012) yang mengkaji mengenai peran dari akademisi dalam menjawab adanya gap antara ilmu yang dipelajari dalam akuntansi lingkungan dengan praktik pengungkapan akuntansi lingkungan khususnya mengenai akuntansi karbon. Penelitian yang tidak kalah menarik adalah penelitian dari Burritt & Christ, (2017) yang mengkaji konsep mengenai pentingnya pengungkapan informasi moneter pada perusahaan air. Hal ini dipicu oleh berkurangnya sumber air bersih di beberapa daerah di berbagai belahan dunia. Burritt & Christ, (2017) memproyeksikan akan terjadi kelangkaan air bersih sekitar 40 persen dari saat ini. Burritt & Christ, (2017) juga menegaskan bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, yang biasanya diakibatkan oleh pengurangan lahan hutan dan juga limbah air yang dikeluarkan oleh korporasi setelah mereka memproses produk. Dari beberapa isu yang dibahas dalam penelitian diatas maka diperoleh berbagai isu dan kemungkinan variabel yang dapat diangkat menjadi penelitian baru, diantaranya akuntansi karbon, akuntansi air dan bahkan mungkin isu akuntansi untuk satwa langka dapat dijadikan salah satu isu penelitian yang menarik dimasa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan juga dari beberapa penelitian ditemukan

peluang diangkatnya variabel moderasi maupun interverning pada studi mengenai akuntansi lingkungan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam sebuah penelitian biasanya terdapat teori yang dapat meringkaskan masalah dan variabel yang diangkat. Khusus untuk isu akuntansi lingkungan banyak sekali teori yang dapat diangkat diantaranya *stakeholder theory*, *institutional theory*, *contingency theory*, *resources based theory*, *Porter's hypothesis*, *legitimacy theory*, dan *triple bottom line theory*. Teori-teori ini biasanya membahas keterkaitan perusahaan dengan kewajiban korporasi dalam mengungkapkan kinerja dan laporan terkait akuntansi lingkungan, mengingat teori-teori tersebut lebih banyak membahas gaya bisnis modern yang lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan, keselamatan manusia, dan keberlanjutan *profit*.

## **KESIMPULAN**

Kajian mengenai akuntansi lingkungan merupakan salah satu bidang kajian akuntansi yang memiliki cakupan yang cukup luas, hal ini dikarenakan pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dapat diterapkan di hampir seluruh perusahaan. Bab ini membahas mengenai perkembangan akuntansi lingkungan, cara pencatatan, pengungkapan dan penyajian akun-akun akuntansi lingkungan pada laporan keuangan perusahaan, serta juga menguraikan beberapa peluang penelitian yang dapat diangkat mengenai bidang kajian ini (*future research*). Menariknya, setiap akun akuntansi lingkungan pada setiap industry cenderung berbeda, hal ini menjadi salah satu keunikan dari akuntansi lingkungan. Sebagai contoh akun biaya lingkungan pada rumah sakit berbeda dengan akun yang timbul pada perusahaan farmasi dan pertambangan.



## AKUNTANSI BUDAYA

**A**kuntansi merupakan seni menurut pandangan sebagian besar akademisi akuntansi dan masyarakat umum. Tokoh yang selalu dilekatkan sebagai Bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli pakar matematika dari Italia. Leonardo da Vinci salah satu teman sejawat Pacioli dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perkembangan profesi akuntansi lebih lambat dibandingkan profesi seperti, kedokteran, hukum, medis, dan Teknik sampai abad ke-20. Akuntansi adalah sistem informasi untuk mengetahui produktifitas entitas usaha, mengakumulasikan informasi keuangan jadi laporan, dan melaporkan kepihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk aktivitas entitas (Harrison et al., 2012). Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dihasilkan melalui pembukuan, yaitu bagian dari teknis akuntansi seperti aritmetika dalam matematika. Secara garis besar akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan dan manajemen. Menurut (Hery, 2016) akuntansi keuangan menghasilkan data keuangan entitas bagi pihak internal dan eksternal yang membutuhkan, sedangkan akuntansi manajemen yaitu informasi keuangan yang dihasilkan hanya untuk pihak internal entitas.

Definisi lain dari akuntansi adalah siklus kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode waktu (Sujarweni, 2021). Sedangkan *American Institute of Certified Public Accountants*

(AICPA) memandang akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan ukuran moneter. Kemudian catatan keuangan diringkas dalam bentuk laporan keuangan memakai ukuran fiskal yang berrifat moneter. Seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa keuangan dengan secepat-cepatnya adalah pengertian akuntansi menurut (Munawir, 2005; Suhardjono, 2006). Definisi tentang akuntansi oleh organisasi maupun para ahli sepakat bahwa akuntansi adalah bagian dari perilaku ekonomi dalam suatu korporasi, atau sangat terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan entitas. Akan tetapi, pada saat yang sama memilik pandangan yang berbeda secara khusus, misalnya akuntansi sebagai seni. Jika mengacu padangan tersebut, bahwa dalam menyusun laporan keuangan seorang akuntan tidak hanya cukup atas pemahaman kompetensi akuntansi secara teori, tetapi perlu memiliki kemampuan individu dalam berkomunikasi melalui catatan transaksi hingga laporan keuangan.

Fenomena tersebut membuka sebuah jalan akademis dalam pengembangan kajian akuntansi dengan tetap mengikuti prosedur keilmiah-an dalam penelitian. Akuntansi bukan hanya soal perilaku ekonomi dalam suatu entitas. Variabel selain perilaku ekonomi tidak boleh diabaikan dalam kajian-kajian akuntansi, karena turut mempengaruhi tindakan ekonomi dan pemrosesan laporan keuangan. Akuntansi bukan ilmu pengetahuan yang tunggal, dan tidak hanya terkait dengan ilmu ekonomi saja. Akuntansi sebagai anak dari budaya dengan kata lain sebagai suatu pengetahuan dan prakteknya dibentuk oleh lingkungan sosial yang kompleks (Morgan, 1997; Tricker, 1979). Pengetahuan akuntansi adalah bagian ilmu sosial yang mengalami perkembangan ilmu intelektual dari waktu ke waktu (Mulya et al., 2016). Mulya et al., (2016) perkembangannya bisa dianalisa dari perubahan pandangan akuntansi dari masa-kemasa. Grady, (1965) berpandangan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat mempengaruhi ilmu akuntansi. Chua, (1986) masyarakat memproduksi sendiri pengetahuan akuntansi sesuai dengan perkembangan dan kepentingan lingkungan sosial dan lingkungan

fisiknya. Gröjer & Stark, (1977) berpandangan bahwa budaya dan nilai-nilai sosial pada masyarakat tercermin dalam pengetahuan akuntansi masyarakat setempat. Nilai-nilai sosial menjadi bagian yang mempengaruhi aktivitas ekonomi hingga perilaku akuntansi masyarakat setempat (Mulya et al., 2016; Suojanen, 1954).

Perubahan pandangan menegaskan akuntansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh budaya masyarakat setempat (Dey, 2007; Mulya et al., 2016). Perkembangan tersebut akan terus terjadi di masa saat ini. Diskursus akuntansi, budaya dan ke-Indonesia-an akan memperluas pandangan akuntansi, khususnya di tengah masyarakat Indonesia. Akuntansi bukanlah monopoli ekonomi yang berkaitan dengan catat mencatat saja, tetapi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menghasilkan kebijakan pengetahuan dan praktik pengelolaan di bidang sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas. Akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas suatu kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan budaya setempat. Jika demikian, tidak salah jika akuntansi disebut sebagai bagian dari cabang ilmu sosial dan praktiknya dipengaruhi oleh kebudayaan. Budaya, sosiologi masyarakat, relasi-relasi dan jaringan kerja yang terbentuk karena kebudayaan mempengaruhi perilaku akuntansi untuk pengembangan teori akuntansi kontekstual sehingga mampu menjadi instrumen entitas usaha (*the language of business*).

Studi akuntansi dan budaya merupakan pengembangan dari penelitian akuntansi multiparadigma, kemudian dilembagakan menjadi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI) (Prabowo & Kalsum, 2021). Akuntansi adalah ilmu yang diyakini sebagai cabang ilmu yang dibangun secara sosial, perkembangan sosial sangat mempengaruhi konstruksi akuntansi, semakin maju tingkat sosial suatu masyarakat, semakin maju akuntansi berkembang di masyarakat itu, dan sebaliknya (Prabowo & Kalsum, 2021). Upaya mendekatkan ilmu akuntansi dengan realitas budaya, agama, dan spiritualitas sejalan dengan analisis kritis akuntansi dalam kaitannya dengan spiritualitas dan kearifan lokal (Mulawarman, 2010). Argumen

ini juga diperkuat dengan banyak kajian akuntansi berbasis budaya untuk menjawab dinamika akuntansi dalam masyarakat serta mengembangkan fenomena unik dalam penelitian akuntansi di tengah-tengah masyarakat (Efferin & Hartono, 2015; Fülbier & Klein, 2015; Salampessy et al., 2018; Yamamoto & Noguchi, 2013).

Namun demikian, selain akuntansi mempengaruhi lingkungannya, realitas akuntansi juga dibentuk oleh lingkungannya, sebagaimana pandangan (Mathews & Perera, 1996) meskipun pandangan konvensional adalah bahwa akuntansi sosial dibangun sebagai akibat dari kegiatan sosial, ekonomi dan politik, ada pendekatan alternatif Which menunjukkan bahwa akuntansi mungkin membangun sosial. Mathews & Perera, (1996) lebih dalam membahas akuntansi perilaku sebagai perkembangan kajian teoretis untuk menggalain perilaku dan yang mempengaruhi tindakan manusia dalam entitas; perlu pendekatan yang terukur untuk mengukur perilaku manusia dalam entitas; dan memformulasikan instrumen pengukuran agar mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Akuntansi bagaikan dua sisi mata uang yang mempengaruhi (*socially constructing*) dan dipengaruhi (*socially constructed*) oleh lingkungannya. Pandangan ini membawa kepada konsepsi bahwa ilmu akuntansi adalah ilmu pengetahuan dan praktiknya penuh dengan nilai, baik nilai yang dibentuk oleh lingkungan di mana akuntansi berkembang, atau nilai yang terbentuk atas perpaduan antara akuntansi dan lingkungannya.

## **PENELITIAN BIDANG AKUNTANSI DAN BUDAYA**

Penelitian akuntansi dan budaya sangat tergantung pada posisi peneliti memandang ilmu akuntansi. Jika akuntansi dibangun dari kerangka konseptual siklus akuntansi, maka sudah barang tentu tidak akan mampu membangun pandangan akuntansi dan budaya atau sangat terkait dengan akuntansi keuangan secara teoritis yang menekan aspek pembukuan dan pencatatan. Jembatan antara akuntansi dengan budaya bisa melalui bidang akuntansi manajemen, pendidikan, sektor publik, auditing, perpajakan, penganggaran dan lain-lain.

Sudah banyak penelitian akuntansi dan budaya berdasarkan bidang-bidang akuntansi yang disebutkan di atas. Kahar et al., (2013) meneliti Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) berbasis *pangngadereng* pada Suku Bugis, Anasthasia B, Azalea; Efferin, (2018) SPM berbasis nilai-nilai Suku Jawa dan Sunda dan Hanif, (2015) SPM dengan budaya Minangkabau dengan nilai *mato*. SPM tidak hanya dibangun berdasarkan budaya dan kepentingan entitas secara internal. Jika dibuka ruang pengamatan yang lebih luas, maka ditemukan aspek sosial dan budaya sebagai bagian yang perlu dipertimbangkan demi efektifitas dan oprasionalitas SPM entitas.

Akuntansi pendidikan juga, Jayasinghe, (2021) mengungkap pembelajaran konstruktivis radikal efektif diimplementasikan dosen akuntansi dengan mengembangkan pemecahan masalah yang inovatif pada lingkungan otentik dekat dengan kehidupan mahasiswa akuntansi. Penelitian lintas budaya terhadap sumberdaya pendidikan kepada guru akuntansi diseluruh dunia dilakukan (Tang & Bao, 2020), dan penelitian mahasiswa akuntansi dan budaya di Australia, Zimbabwe, Turki, Afrika Timur, Afrika Barat, Iran dan Arab (Dalci & Özyapici, 2018; Sithole & Abeysekera, 2021). Aspek budaya memiliki peran penting dalam membangun proses belajar antara dosen dan mahasiswa akuntansi di ruang perkuliahan. Memahami logika akuntansi dengan analogi yang paling sederhana, misalnya terkait aktivitas transaksi sehari-hari mahasiswa salah satu alternatif dan inovasi pembelajaran akuntansi. Ternyata, antara suku/etnis satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang unik dan berbeda-beda dalam melakukan aktivitas transaksi. Dipredikasi bahwa keunikan dalam pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya di mana mereka berasal.

Akuntansi sektor publik dengan tema budaya dikembangkan Jayasinghe et al., (2020) dengan menganalisis penganggaran partisipatif pada dua komunitas adat di Indonesia. Baru-baru ini Abdulkarim et al., (2022) mengeksplorasi peran budaya dan bahasa dalam penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional, dia merekomendasikan pendekatan terpadu yang mencerminkan

kebutuhan akuntan dan auditor untuk menyadari efek budaya dan bahasa. Ada dua sumber yang menentukan pembentukan akuntansi sektor publik yaitu sumber nasional bergantung pada sistem sosial dan perkembangan ekonomi satu negara, tingkat pendidikan dan modal intelektual suatu negara serta adat istiadat, tradisi dan budaya negara serta sumber internasional (Vašiček et al., 2018). Jalan menuju harmonisasi dan penyatuan kerangka metodologis merupakan gap yang harus dieksplorasi oleh mahasiswa dan akademisi akuntansi agar tidak boleh mengabaikan aspek budaya suatu negara.

Auditing juga berkembang hingga pada aspek sosial dan budaya Lannai & Prabowo, (2016); Prabowo, (2019); dan Prabowo & Mulya, (2018) membangun perspektif penguatan kode etik akuntan publik berbasis nilai budaya bugis. Intervensi audit budaya reflektif memiliki pengaruh terhadap kompetensi konseling multikultural dan keadilan sosial siswa konseling (Kim et al., 2022). Integrasi kajian budaya dan auditing adalah usaha untuk membangun dan memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan kredibilitas terhadap perusahaan, otoritas pengatur di negara berkembang yang dikombinasikan dengan nilai-nilai budaya (Baatour & Ben Saada, 2022).

Akuntansi pajak untuk masa depan perlu menguji kerangka kerja yang berbeda untuk mencapai hasil yang bermanfaat dalam mempromosikan tanggung jawab budaya pembayaran pajak (Zhang et al., 2022). Ermasova et al., (2021) membandingkan budaya nasional Jerman dan Amerika Serikat (AS) serta menganalisis bagaimana budaya nasional mempengaruhi persepsi penghindaran pajak. Selain itu, budaya nasional memoderasi hubungan antara ukuran kinerja tanggung jawab sosial dan agresivitas pajak perusahaan (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020). Kajian sistem perpajakan tradisional yang digunakan oleh kerajaan masa lampai, misalnya di Indonesia perlu dijadikan refleksi untuk membangun mederasi tata kelola perpajakan pada masa yang akan datang. Studi dalam penganggaran yang mencakup penggunaan dimensi budaya masih sangat sedikit. Diasumsikan Zarei et al., (2022) variabel budaya nasional berdampak

pada institusi, kemudian memiliki pengaruh pada penganggaran sektor publik. Velinov et al., (2020) menganalisis mekanisme, tren digital, dan sumber daya lain yang membantu warga Republik Ceko menggunakan inisiatif tata kelola anggaran berbasis tradisional dan mengembangkannya secara signifikan. Pengujian hubungan antara budaya nasional, sistem penganggaran modal (CBS) dan kinerja keuangan perusahaan juga dilakukan (Graham & Sathye, 2020). Kekayaan budaya tidak hanya berperan dalam mengatur interaksi sosial, tetapi turut berpartisipasi dalam tata cara individu dan organisasi dalam mengelolah keuangan.

Lassila, (2022) meneliti akuntansi keperilakuan dengan mengungkap kekuatan transformatif yang melekat dalam teknologi data besar, praktik kalkulatif dari fungsi akuntansi, menghasilkan asosiasi antara domain yang terpisah dan menerjemahkan proses kompleks ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara finansial, telah terlibat dalam mengubah konsumsi aplikasi. Fleksibilitas panduan akuntansi, karakteristik etis auditor, dan penyesalan klien terhadap auditor menjadi topik yang diteliti (Cornell & Warne, 2016). (Driskill & Rankin, 2020) menguji keterampilan penalaran etis lintas budaya dari generasi eksekutif Amerika Serikat dan Cina melalui mahasiswa akuntansi dari universitas menengah, instrumennya menggunakan dilema etika akuntansi (Thorne, 2000) dengan mengembangkan dua ukuran penalaran moral preskriptif dan deliberatif akuntan.

## **KONSTRUKSI AKUNTANSI DAN BUDAYA**

Kebudayaan menurut (Shiraev & Levy, 2012; Tylor, 1903) meliputi adat-istiadat (kebiasaan), hukum, nilai-nilai moral, seni, kepercayaan pengetahuan atau pemahaman suatu bangsa yang kompleks, dan pengetahuan lainnya yang terbangun dalam proses interaksi dalam masyarakat yang panjang. Perangkat kebudayaan tersebut diwariskan dari masa-kemasa dengan dilisankan oleh masyarakat terdahulu hingga menjadi kode perilaku bagi masyarakat (Shiraev & Levy, 2012). Keyakinan, ilmu pengetahuan, etika, mistis, tahayyul, dan stereotif merupakan elemen yang membentuk sikap

masyarakat kebudayaan. Perilaku terdiri dari berbagai elemen sikap yang berbentuk suara, bangunan, warna dan lain-lain sebagai symbol. Menurut Herkovits dalam Kluckhohn, (1951) bahwa teori kebudayaan yaitu: Alat bagi seseorang (individu) untuk mengatur keadaan totalnya dengan dan menambah arti bagi kesan kreatifnya; Keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah; Memiliki variabel dan Bersifat dinamis; Terdiri dari berbagai aspek dan Terstruktur; Bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia; serta Dapat dipelajari.

#### 1. Kerangka Kebudayaan

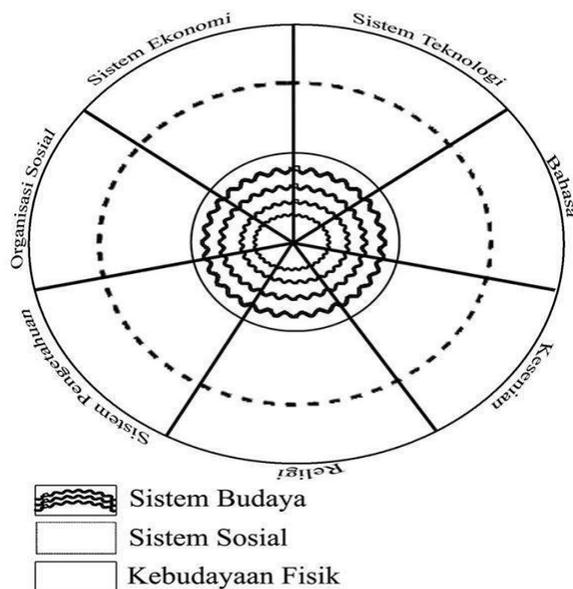
Kebudayaan dapat ditelusuri atau dikaji dengan mudah dengan memahami terlebih dahulu kerangka yang membentuk kebudayaan. Kerangka kebudayaan terdiri dari konsep, wujud, unsur, fisik dan sistem kebudayaan serta sistem sosial. Pengembangan kajian akuntansi berbasis kebudayaan manusia dapat dilakukan dengan pendekatan kerangka kebudayaan. Pemahaman atas kerangka kebudayaan suatu komunitas masyarakat akan membawa akademisi akuntansi dalam memahami pengetahuan akuntansi pada komunitas tersebut. Kerangka kebudayaan adalah peta dalam pengembangan kajian akuntansi multiparadigma berbasis budaya.

##### a. Konsep Kebudayaan

Konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat, (1981) dapat dibedah menggunakan instrumen wujud dan isi dari kebudayaan. Wujud dan isi kebudayaan terdiri dari gagasan, perilaku dan artefak. Gagasan adalah wujud yang paling abstrak, perilaku adalah adat-istiadat atau sistem sosial di dalam komunitas masyarakat, serta artefak merupakan simbol kebudayaan. Penelitian akuntansi dengan pendekatan konsep kebudayaan suatu komunitas dapat dilakukan dengan pemetaan gagasan, perilaku dan artefak dalam komunitas sebagai fokus penelitian. Pemahaman atas wujud kebudayaan dalam penelitian akuntansi budaya akan membawa pada pemahaman komunitas terhadap pengetahuan akuntansi.

##### b. Unsur-unsur Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan dapat dipahami melalui kerangka kebudayaan yang digagas oleh (Koentjaraningrat, 1986) yaitu Bahasa; Teknologi; Mata pencaharian; Pengetahuan; Religi Organisasi sosial dan Kesenian. Unsur-unsur kebudayaan adalah benang merah dalam kajian akuntansi dan budaya. Ketujuh unsur kebudayaan yang dijelaskan oleh (Koentjaraningrat, 1986) memiliki irisan dalam kajian akuntansi, hal tersebut semakin menegaskan bahwa antara kebudayaan dan akuntansi seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Hasil interaksi antara kebudayaan dan akuntansi dalam setiap kebudayaan memiliki keunikan dan pengetahuan akuntansi yang berbeda, hal ini akan melahirkan pandangan yang baru dalam kajian akuntansi dengan lokus budaya yang berbeda-beda. Berikut kerangka kebudayaan yang terdiri dari sistem budaya, sosial dan kebudayaan fisik kemudian melahirkan unsur-unsur kebudayaan.



Gambar 1 Kerangka kebudayaan  
(Koentjaraningrat, 1986)

## 2. Sistem Budaya, Sosial dan Kebudayaan Fisik

Sistem budaya, sosial dan kebudayaan fisik adalah tiga sistem yang membentuk kerangka kebudayaan. Ketiga sistem tersebut dalam struktur ilmu pengetahuan dapat dikaji melalui pendekatan budaya, sosiologi dan etika serta perilaku manusia. Definisi sistem dalam operasional penelitian dapat memudahkan proses pengkajian. Secara sederhana sistem memiliki sepuluh ciri-ciri, yaitu: Fungsi (*function*); Satuan (*unit*); Batasan (*boundary*); Bentuk (*structure*); Lingkungan (*environment*); Hubungan (*relation*); Proses (*process*); Masukan (*input*); Keluaran (*output*); Pertukaran (*exchange*).

### a. Sistem Budaya

Wujud abstrak dari kebudayaan adalah sistem budaya atau sering disebut sebagai gagasan yang melekat pada komunitas masyarakat. Gagasan tersebut tertuang dalam adat-istiadat yang terdiri dari sistem nilai dan norma berperilaku masyarakat dalam komunitas. Tujuan sistem budaya merupakan alat control komunitas dalam berinteraksi antar sesama masyarakat. Sistem budaya bukan hanya alat kontrol dalam interaksi sosial dalam komunitas masyarakat tertentu, akan tetapi juga sebagai pedoman dalam berinteraksi dalam perilaku ekonomi. Sangat mungkin terdapat keunikan antara pola dalam akuntansi berperilaku dan pola perilaku akuntansi yang tumbuh berkembang dalam suatu komunitas berdasarkan sistem budaya sebagai alat kontrol. Setelah perasaan dan nilai budaya membentuk perilaku akuntansi masyarakat akan diinternalisasi dalam kepribadiannya, maka tindakannya itu akan menjadi suatu pola perilaku akuntansi yang unik, dan norma-norma alat kontrol dibudayakan. Tetapi perlu juga disadari bahwa tidak semua sistem budaya secara langsung mempengaruhi perilaku akuntansi misalnya terjadi *devians*, artinya tidak semua dapat diinternalisasi dalam perilaku akuntansi, perlu disaring dan disesuaikan.

#### b. Sistem Sosial

Sistem sosial sebagai instrumen dalam memahami suatu komunitas masyarakat, termasuk dalam mengkaji pengetahuan akuntansi dalam suatu masyarakat. Sebab, suatu komunitas masyarakat adalah satu kesatuan yang dapat didekati dengan konsep sistem sosial. Perilaku masyarakat dalam suatu komunitas memiliki relasi perilaku antara sesama individu di dalamnya yang bersifat tetap. Sistem sosial memiliki bagian yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam komunitas masyarakat. Misalnya, dalam komunitas masyarakat terjadi interaksi antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu dengan berpedoman pada alat kontrol sosial yang berlaku dalam komunitasnya. Kontrol sosial dapat diwujudkan jika setiap individu dalam komunitas mampu beradaptasi, memiliki tujuan, terintegrasi, dan komunikasi sebagai pola pemeliharaan sistem kontrol sosial. Kontrol sosial terdiri dari keyakinan (pengetahuan); perasaan (*sentiment*); tujuan, sasaran, dan cita-cita; norma; kedudukan peranan (status); tingkatan dan pangkat (*rank*); kekuasaan atau pengaruh (*power*); sangksi; sarana dan fasilitas; tekanan ketegangan (*strees-strain*).

### 3. Konsep Nilai, Sistem Nilai, dan Orientasi Nilai

Nilai adalah pembahasan mendasar dalam mengkaji manusia dan ilmu budaya merupakan jalan untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Menurut Williams, (1972) nilai dapat ditemukan dengan mengkaji perilaku manusia dalam komunitas, karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai. Memahami konsep nilai, sistem nilai dan orientasi nilai (budaya) akan memudahkan penelitian tentang pola perilaku manusia, termasuk dalam penggalan perilaku akuntansi dalam komunitas tertentu. Betapa pentingnya nilai dalam suatu komunitas yang membentuk pola tingkah laku manusia.

a. Konsep Nilai

Nilai dibentuk oleh serangkaian pengalaman yang pernah dilalui oleh manusia dan diinternalisasi dalam kelompok komunitas. Menurut Pepper, (1958) nilai bisa dari agama, minat, hasrat, kebutuhan dan lain-lain. Rumusan nilai yang luas dapat meliputi seluruh perkembangan dan kemungkinan unsur-unsur nilai, perilaku yang sempit diperoleh dari bidang keahlian tertentu, seperti dari satu disiplin kajian ilmu sosial. Menurut Kluckhohn, (1951) nilai adalah seperangkat yang mengatur perilaku, oleh Pepper, (1958) adalah segala sesuatu tentang yang baik atau yang buruk. Perbedaan antara batasan sebuah nilai dipengaruhi oleh konsepsi antara kebutuhan dan keinginan manusia. Karena nilai-nilai diformulasikan untuk mencapai tujuan dan kepuasan kepribadian. Kepribadian adalah produk sistem sosio-budaya sebagai suatu kehidupan sosial yang besar.

Williams, (1972) mengemukakan rumusannya tentang nilai yaitu terdiri pengalaman-pengalaman manusia, potensi, keyakinan dan tindakan manusia dalam komunitas. Namun, keyakinan sering mengaburkan sebuah nilai, karena berisi apa yang benar dan salah. Keyakinan adalah kecenderungan antara suka dan tidak suka (Bertrand, 1967). Pola tangka laku manusia dalam komunitas ditentukan oleh nilai yang dominan atau yang tingkat kebenarannya lebih tinggi dibanding nilai yang lain sesuai persepsi masing-masing manusia. Nilai tersebutlah yang akan berperan penting dalam interaksi sosial antara manusia dalam komunitasnya. Nilai yang dominan didasarkan ruang lingkup, lama-tidaknya, gigih-tidaknya dan prestise manusia terhadap nilai tersebut. Pada kajian akuntansi dan budaya, nilai yang mendominasi manusia dalam perilaku akuntansi akan menjadi keunikan dalam penelitian akuntansi.

b. Watak Nilai

Watak nilai memiliki pertimbangan-pertimbangan, pembenaran, pilihan, dan konflik nilai (Titus et al., 1994). Sumber pandangan tentang nilai terdiri dari pertimbangan metafisika, teologi, etika, estetika, dan logika. Watak atau etos nilai adalah saringan untuk menentukan tujuan hidup, mengenai apa yang berharga dan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan manusia. Serta serangkaian tindakan guna menggapai tujuan hidup tersebut. Nilai merupakan ukuran dalam berperilaku manusia dalam sehari-hari dalam kehidupan suatu komunitas. Setiap manusia dituntut memiliki nilai untuk mengkumi sebuah perilaku baik atau buruk serta benar atau salah. Setiap komunitas dan individu memiliki sistem nilai, jika tidak maka individu lain akan menentukan nilai padanya. Fenomena tersebut adalah persoalan dalam kehidupan, sehingga apakah ukuran-ukuran, keyakinan, kesetiaan, atau idealisme terhadap suatu nilai harus konsisten atau tidak konsisten?.

Nilai dan etika memiliki hubungan yang sangat erat yang terkait dengan perilaku masyarakat serta estetika berhubungan dengan seni. Etika dan estetika adalah titik temu kajian akuntansi dan budaya. Nilai terdiri dari adat-istiadat dan tradisi sebagai pedoman hidup manusia dalam kelompok komunitas. Selain itu, kelompok nilai lainnya adalah agama, moral, estetika, intelek, ilmu, ekonomi, dan sebagainya. Menentukan sebuah nilai yang harus menjadi prioritas perlu mempertimbangkan aspek kepuasan. Misalnya, nilai silaturahmi dan nilai ekonomi. Nilai silaturahmi mampu mewujudkan nilai akal dan jiwa, memiliki aspek sustainability dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan, nilai ekonomi hanya mampu mewujudkan aspek materi, dan hanya sampai pada kehidupan di dunia. Dua contoh nilai di atas tentu sangat terkait dalam mengambil pertimbangan perilaku dalam praktik akuntansi.

c. Sistem-sistem Nilai

Sistem nilai yang dianut antara setiap manusia atau komunitas, berbeda dengan yang lainnya. Begitu pula antara satu lingkungan kebudayaan dengan lingkungan lainnya. Tapi antara waktu yang sama dan variasi-variasi nilai yang diyakini memiliki kesesuaian dengan suatu tema normatif. Menurut Bertrand, (1967) sistem nilai adalah nilai inti (*score value*) dari masyarakat. Menurut (Williams, 1972), sistem nilai itu tidak tersebar secara sembarangan, tetapi menunjukkan serangkaian hubungan yang bersifat timbal balik, yang menjelaskan adanya tata tertib di dalam suatu masyarakat.

Sumber utama dalam berperilaku antara manusia dalam komunitas adalah sistem nilai budaya menurut (Koentjaraningrat, 1981). Sistem nilai budaya menyatu dalam jiwa manusia dalam suatu komunitas sehingga sukar digantikan. Sistem nilai budaya antara satu komunitas dengan komunitas lainnya tidak mungkin ditemukan seratus persen sama. Oleh karena itu, mungkin saja nilai-nilai inti tertentu dapat berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai yang lain. Suatu komunitas memiliki orientasi nilai-nilai tertentu menurut (Kluckhohn, 1951).

d. Orientasi Nilai Budaya

Secara universal sistem nilai budaya memiliki lima persoalan pokok dalam kehidupan manusia yaitu: hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, hakikat waktu manusia, hakikat alam manusia, hakikat hubungan manusia. Kluckhohn, (1951) menjelaskannya dalam table di bawah:

Tabel 5 Kerangka Kluckhohn, (1951) mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi nilai budaya		
Hakikat hidup (MH)	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk tetapi

			manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakikat karya (MK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya	Orientasi kolateral (horizontal) rasa kebergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Orientasi vertikal, rasa kebergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Sumber : Kluckhohn, (1951)

Pemetaan persolan mendasar dalam kehidupan manusia membentuk orientasi nilai budaya sebagai pandangan hidup sebagai petunjuk arah kepada kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Kebiasaan ini kemudian berubah wujud menjadi sebuah adat-istiadat yang mengatur pola perilaku masyarakat tersebut. Inilah yang disebut nilai budaya dan berubah wujud menjadi sistem budaya. Sekumpulan

gagasan dan ide-ide manusia yang hidup dalam masyarakat adalah perwujudan dari sistem budaya. Ide itu saling bersesuaian dengan yang lainnya, kemudian melahirkan adat istiadat. Tidak hanya sampai disitu, sistem budaya akan berubah menjadi sebuah sistem sosial yang akan melahirkan sebuah pola tingkah laku dalam masyarakat. Ini disebut dengan kerangka etika, seperti berikut:



Gambar 2 Kerangka konsep etika dalam kebudayaan  
(Lannai & Prabowo, 2016).

Hal tersebut membawa kepada kesimpulan bahwa etika manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai budaya di mana manusia tinggal. Ini sejalan dengan pandangan Sarwono, (2014) bahwa yang mempengaruhi sistem fisiologis tersebut adalah tradisi masyarakat dalam suatu komunitas. Komunitas dan manusia tidak terlepas dari suatu kebudayaan, sehingga kebudayaan sangat penting dalam memahami pola perilaku komunitas dan manusia.

- e. Kode Etik Akuntan Berbasis Nilai Budaya Bugis  
Etika terbentuk tidak hanya dengan aturan, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti budaya setempat. Karena membangun karakter tidak semudah itu, memerlukan waktu dan pembiasaan-pembiasaan, sehingga karakter itu melekat pada diri manusia. Menurut Lannai & Prabowo, (2016) perilaku seorang auditor sangat ditentukan oleh dirinya

sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh suku dan ras dari mana mereka berasal. Budaya Bugis misalnya, Lannai & Prabowo, (2016) dalam pengamatannya terhadap auditor dengan latarbelakan suku Bugi menemukan pengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan kode etik auditor.

Nilai budaya sudah ditanamkan dan ajarkan dari generasi ke generasi melalui lingkungan keluarga. Sehingga ini memperkuat etika seseorang saat berprofesi seorang auditor begitupula lingkungan. Kepatuhan terhadap kode etika ditentukan oleh karakter bawaan seseorang auditor sejak lahir dan adat-istiadat yang berlaku pada lingkungannya. Terdapat keharmonisan antara kode etik akuntan dengan nilai-nilai budaya Bugis. Nilai-nilai tersebut adalah *siri'*, *lempu*, *getteng*, *amac'ang*, *asitinajang*, *ada tongengg*, *warani*, dan *reso* (Lannai & Prabowo, 2016; Prabowo, 2018, 2019; Prabowo & Mulya, 2018).

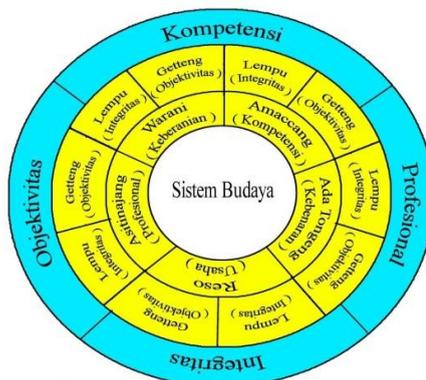
*Siri'* merupakan sumber nilai dalam sistem budaya Suku Bugis yang mempengaruhi nilai-nilai budaya pada suku disekitar wilayah kerajaan Bugis, sebab nilai *siri'* dijumpai pada masyarakat seperti masyarakat Mandar dan Toraja. *Siri'* sebagai sistem nilai yang berubah wujud menjadi sistem budaya dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Berikut konsep *siri'* dalam sistem kebudayaan Bugis:



Gambar 3 Kerangka konsep etika *siri'* dalam kebudayaan Bugis

(Lannai & Prabowo, 2016).

*Siri'* dalam makna harfiah berarti malu atau rasa malu. Suku Bugis memaknai *siri'* pada esensinya sebagai diri sendiri. *Siri'* juga merupakan nilai yang universal yang dibentuk oleh beberapa nilai sehingga menghasilkan sebuah konsep *siri'* yang bermakna positif. *Siri'* dalam konsep etika auditor adalah sebagai berikut: *Lempu* (integritas); *Getteng* (Objektivitas); *Ada tongengg* (kebenaran); *Amac'cang* (kompetensi); *Asitinajang* (profesional); *Warani* (keberanian); *Reso* (usaha).



Gambar 4 Kerangka etika akuntan suku bugis (Lannai & Prabowo, 2016).

Konstruksi akuntansi dan budaya yang dijelaskan di atas adalah contoh kajian akuntansi dibidang auditing dengan nilai-nilai kebudayaan bugis. Peluang penelitian pada bidang akuntansi yang lain masih sangat luas, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.



## AKUNTANSI NUSANTARA

### ASET INDONESIA UNTUK PENELITIAN AKUNTANSI

**N**egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen, memiliki bahasa dan suku yang sangat beragam serta agama yang berbeda-beda. Keberagaman NKRI diikat dalam kesepakatan kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keajaiban lainnya yang dimiliki Indonesia dalam merekatkan nasionalisme kebangsaan adalah Pancasila. Keberagaman Indonesia adalah aset yang hanya dimiliki bangsa ini dan tidak ditemukan pada Negara lain di belahan bumi ini. Setiap suku di Indonesia memiliki keunikan masing-masing yang berbeda dengan suku yang lain, ini adalah aset yang sangat berharga bagi Indonesia. Keberagaman budaya dalam setiap suku di Indonesia merupakan potensi penelitian dalam akuntansi dan konteks ke-Indonesia-an. Perilaku akuntansi akan memperlihatkan keunikan-keunikan yang berbeda antara satu suku atau budaya dengan suku atau budaya yang lain.

Hasil sensus Penduduk 2010 menunjukkan potensi pengembangan penelitian akuntanesia. Penelitian akuntansi bisa dikembangkan berbasis karakteristik dan kemajemukan penduduk, seperti suku bangsa, agama dan bahasa adalah potensi data dan informasi untuk kajian akuntansi dalam konteks ke-Indonesia-an. Pengembangan penelitian akuntansi bisa juga bertumpu pada kearifan dan kebijakan lokal. Penelitian akuntanesia diharapkan mampu

mengembangkan kajian dan teori akuntansi yang bisa melahirkan perspektif baru dalam ilmu pengetahuan akuntansi. Perilaku gotong royong merupakan prinsip tindakan ekonomi yang dimiliki masyarakat Indonesia sebagai salah satu potensi pengembangan penelitian akuntansi.

Jumlah masyarakat Indonesia mencapai 236.728 ribu jiwa atau 99,6 % dan warga asing 73 ribu jiwa atau 0,03 % dan 839 tidak ditanyakan status kewarganegaraannya (BPS, 2011). Data penduduk berdasarkan kelompok suku bangsa, suku Jawa Jawa merupakan yang terbesar dibanding populasi suku lainnya sejumlah 95,2 juta jiwa atau 40,2 % (BPS, 2011). Suku Jawa terdiri dari Suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa (BPS, 2011).

Klasifikasi dari suku terbesar di Indonesia yaitu Suku Sunda 36,7 juta jiwa (15,5 %), Suku Batak 8,5 juta (3,6 %) dan Suku asal Sulawesi lainnya 7,6 juta jiwa (3,2 %). Suku Batak terdiri dari Suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan Dairi (BPS, 2011). Kelompok suku dari Sulawesi terdiri dari 208 jenis suku yang tidak termasuk Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo (BPS, 2011).

Sebanyak 466 suku bersal dari wilayah Papua dan Papua Barat sebanyak 2,7 juta jiwa (1,14 %) (BPS, 2011). Suku dari wilayah Papua menempati posisi ke 19 dari 31 kelompok suku secara nasional (BPS, 2011). Sebanyak 268 suku yang tersebar pada Suku Dayak dengan populasi mencapai 3 juta jiwa (1,3 %) dan menempati posisi 17 dari 31 suku besar di Indonesia (BPS, 2011). Sedangkan, Suku Madura menempati posisi ke 5 dengan jumlah 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 % dari populasi nasional (BPS, 2011).

Tabel 6 Kelompok suku bangsa Indonesia (BPS, 2011)

Kelompok Suku Bangsa	Jumlah	Persen	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
Suku asal Aceh	4 091 451	1,73	14
Batak	8 466 969	3,58	3
Nias	1 041 925	0,44	30
Melayu	5 365 399	2,27	10
Minangkabau	6 462 713	2,73	7
Suku asal Jambi	1 415 547	0,6	25
Suku asal Sumatera Selatan	5 119 581	2,16	10
Suku asal Lampung	1 381 660	0,58	26
Suku asal Sumatera Lainnya	2 204 472	0,93	21
Betawi	6 807 968	2,88	6
Suku asal Banten	4 657 784	1,97	11
Sunda	36 701 670	15,5	2
Jawa	95 217 022	40,22	1
Cirebon	1 877 514	0,79	24
Madura	7 179 356	3,03	5
Bali	3 946 416	1,67	15
Sasak	3 173 127	1,34	16
Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	1 280 094	0,54	27
Suku asal Nusa Tenggara Timur	4 184 923	1,77	12
Dayak	3 009 494	1,27	17
Banjar	4 127 124	1,74	13
Suku asal Kalimantan lainnya	1 968 620	0,83	22
Makassar	2 672 590	1,13	20
Bugis	6 359 700	2,69	8
Minahasa	1 237 177	0,52	29
Gorontalo	1 251 494	0,53	28
Suku asal Sulawesi lainnya	7 634 262	3,22	4
Suku asal Maluku	2 203 415	0,93	22
Suku asal Papua	2 693 630	1,14	19
Cina	2 832 510	1,2	18
Asing/Luar Negeri	162 772	0,07	31
<b>Total</b>	<b>236 728 379</b>	<b>100</b>	

Suku Nias, Minahasa, dan Gorontalo adalah suku yang paling rendah jumlahnya masing-masing 1,04 juta jiwa (0,44 %), 1,24 juta jiwa (0,52 %) dan 1,25 juta jiwa (0,53 %) (BPS, 2011). Suku Bantik, Minahasa, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea/Tosawang, Tonteboan, Totembuan dan Toulor adalah gabungan dari suku-suku Sulawesi Utara/Suku Minahasa(BPS, 2011).

## AKUNTANESIA: POTENSI DAN KEUNIKAN AKUNTANSI INDONESIA

Indonesia merupakan Negara multikultural yang memiliki budaya heterogen, menurut (Efferin & Hopper, 2007) sangat potensial dalam pengembangan kajian akuntansi perspektif etnis dan budaya.

Terdapat lebih dari 1.000 kelompok etnis yang tersebar diberbagai pulau dan provinsi di seluruh Indonesia. Menurut Graham & Sathye, (2020) budaya Indonesia membentuk inovasi sistem penganggaran modal yang lebih canggih daripada perusahaan Australia. Data kelompok suku di atas memberikan peluang yang sangat luas untuk pengembangan penelitian akuntansi dan budaya di Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian akuntansi dan budaya di Negara-Negara Barat dan Timur Tengah, Indonesia memiliki keunikan pada setiap suku/etnis, mulai dari keunikan budaya, bahasa, adat-istiadat sampai dengan sistem ekonomi yang digunakan secara tradisional. Penelitian akuntansi dan budaya di Negara Barat dan Timur Sebagian besar hanya menggunakan variabel budaya nasional, karena suku di sana relative homogen.

Menurut Sukoharsono & Gaffikin, (1993) menjelaskan proyek penelitian kualitatif jangka panjang yang menyelidiki hubungan kekuasaan-pengetahuan dari kemunculan, keberadaan, dan penetrasi akuntansi dalam konteks sosial ke-Indonesia-an. Berdasarkan di atas, terdapat 29 suku besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika disetiap suku/etnis dilakukan penelitian akuntansi dan budaya maka akan menghasilkan 29 hasil penelitian. Apalagi jika dikembangkan berdasarkan bidang akuntansi, maka kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi dan budaya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin, dalam pengembangan penelitian akuntansi dan budaya di Indonesia akan menghasilkan sebuah pandangan yang unik atau bahkan kontribusi teori terhadap ilmu akuntansi.

Tantangannya adalah membuat road map penelitian, kolaborasi peneliti lintas disiplin ilmu (khususnya budayawan dan sosiolog), kerjasama mitra dan pendanaan, ketersediaan waktu penelitian, serta penguatan metodologi penelitian bidang kualitatif. Pada bidang penelitian akuntanesia berbasis spiritual dikembangkan oleh (Efferin, 2015) bahwa penelitian kritis akuntansi akan lebih berdaya guna di Indonesia jika dapat mengembangkan area penelitian yang mengadopsi aspek spiritualitas. Hampir seluruh penelitian akuntansi dan budaya menggunakan pendekatan kualitatif dengan

berbagai paradigma sesuai dengan konteks penelitian. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, studi pada situs budaya, serata penelitian lapangan, sehingga menggunakan waktu yang biasanya lebih lama dari penelitian kuantitatif. Selain kontribusi pengembangan kajian akuntansi, studi akuntansi budaya akan melahirkan sebuah *cultural heritage* (warisan budaya) dibidang akuntansi nusantara atau akuntanesia. Semangat akademisi akuntansi sudah mengarah ke sana dengan dibentuknya organisasi yang mewadahi akademisi akuntansi yang memiliki fokus kajian akuntansi multiparadigma yaitu Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Akuntansi (MAMI). MAMI digagas oleh sejumlah akademisi akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

MAMI memiliki wadah untuk menampung penelitian akuntansi multiparadigma melalui pengelolaan Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). JAMAL hingga saat ini telah menerbitkan banyak penelitian akuntansi multiparadigma, termasuk akuntansi dan budaya dari berbagai suku/etnis dari seluruh Indonesia. Gagasan MAMI telah memantik minat kajian akademisi akuntansi dari berbagai kampus dalam kajian akuntansi multidisiplin.

Sejumlah penelitian akuntanesia diantaranya dilakukan oleh Panggabean & Hariwibowo, (2021) menemukan bahwa akuntabilitas di Gereja Kristen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dipengaruhi oleh budaya lokal dari gereja Kristen. Budaya lokal terhadap kolaborasi dan keterbukaan mampu menghasilkan inovasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja (Panggabean & Hariwibowo, 2021). Aspek spiritualitas dalam akuntanesia akan memberikan warna khusus yang membawa disiplin akuntansi menjadi katalisator untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, khususnya Indonesia (Efferin, 2015). Selanjutnya, Sharon & Paranoan, (2020) menghasilkan akuntabilitas organisasi yang unik dari eksplorasi makna rumah adat Ammatoa di Sulawesi Selatan. Hasil pemaknaan nilai-nilai yang terdapat pada rumah adat Ammatoa menghasilkan Trilogi Akuntabilitas Ammatoa (TAA) yaitu akuntabilitas terhadap *Tu Rie'a A'ra'na* (dalam bentuk kepatuhan kepada Tuhan), akuntabilitas

terhadap manusia (dalam bentuk transparansi) dan akuntabilitas terhadap alam semesta (dalam bentuk menjaga alam) (Sharon & Paranoan, 2020).

Pasantren merupakan salah satu produk budaya Indonesia dibidang pendidikan juga menjadi salah satu lokus penelitian akuntanesia. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah acuan bagi lembaga pendidikan tradisional yang berkembang di Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyusun laporan keuangan pasantren. Kajian akuntabilitas pada Pasantren dilakukan Gafur et al., (2021) dengan mengkonstruksi konsep akuntabilitas perspektif amanah. Temuan Gafur et al., (2021) menjelaskan akuntabilitas religius dan spiritual. Laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan manusia untuk menyalurkan potensi ekonomi kepada pihak internal dan eksternal pasantren serta alam sekitar. Sedangkan, Randa & Daromes, (2014) menggunakan metode etnografi kritis inkulturatif dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja.

Kajian akuntanesia berbasis sektor publik dilakukan oleh (Jayasinghe et al., 2020) mengenai penganggaran partisipatif di dua komunitas adat Indonesia, menggambarkan bagaimana model neo-liberal yang disponsori Bank Dunia dari PB “rasional teknis” dibayangi oleh nilai-nilai dan kearifan lokal, yang terdiri dari rasionalitas canggih yang sudah ada sebelumnya untuk kepentingan publik. Akuntanesia menghasilkan inovasi konsep ekonomi baru di mana inisiatif neoliberal telah dikalahkan dalam proses melestarikan nilai-nilai dan kearifan lokal (Jayasinghe et al., 2020). Beberapa penelitian akuntanesia yang disampaikan di atas adalah sebagian kecil dari potensi besar dalam pengembangan kajian akuntanesia. Akuntanesia perspektif budaya dan suku dalam praktik ekonomi tradisional juga dilakukan oleh (Hanif et al., 2015; Hanif, 2015; Hanif, Rakhman, & Nurkholis, 2019; Hanif, Rakhman, Nurkholis, et al., 2019; Prabowo, 2017, 2018; Prabowo & Kalsum, 2021; Rahmah, 2017; S. Rohani et al., 2020; S. T. Rohani et al., 2020, 2019).

Akuntanesia bisa dilihat dari akuntansi manajemen, akuntansi keuangan (Hutasoit & Mulya, 2016; Mulya et al., 2014, 2016), akuntansi pendidikan, auditing (Lannai & Prabowo, 2016; Prabowo & Mulya, 2018), akuntansi pajak, akuntansi sektor publik, akuntansi hijau, akuntansi lingkungan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bidang-bidang akuntansi lainnya dari lokus budaya dan suku yang berbeda-beda. Berikut road map penelitian akuntanesia:



Gambar 5 Road map penelitian hasil analisa peneliti



## AKUNTANSI PERKEBUNAN

### SEJARAH PERKEBUNAN INDONESIA

**S**ejarah perkebunan di Indonesia sangatlah panjang, sejak dikenalnya kemewahan rempah-rempah di kerajaan-kerajaan dunia beberapa abad sebelum masehi, masyarakat Indonesia saat itu yang juga memiliki keahlian mengarungi lautan telah menjadikan rempah-rempah sebagai barang dagangan yang bernilai ekonomi tinggi. Perihal ini menarik atensi Belanda buat bisa memonopoli perdagangan bahan rempah di Jawa, Makasar serta Maluku. Pada akhir era ke- 18, Belanda alihkan fokus komoditi perkebunan berupa kopi, tembakau, tebu, lalu seratus tahun sesudah itu kina, teh, karet, kelapa sawit. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh Belanda berbasis korporasi, berbeda dengan sebelumnya yang semula hanya membeli dari rakyat sebagai produsen. Setelah terjadi pengambilalihan seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia, penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi berakhir. Penguasaan perkebunan lebih ekonomis semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengambilalihan kepemilikan perkebunan-perkebunan besar dari negara asing yang dikenal dengan sebutan “nasionalisasi” berkali-kali semenjak proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya konsolidasi manajemen perkebunan dan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan

setelahnya sesuai yang telah diatur dalam satu kesatuan struktur pemerintah Indonesia. Perkebunan Besar Swasta (PBS) mulai didirikan di akhir dekade 1980-an, dengan memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU) di daerah pesisir dan wilayah-wilayah transmigrasi terpencil. Perkebunan menjadi salah sektor paling berpotensi sebagai penghasil devisa negara semenjak pemerintahan orde baru. Hal ini terbukti Ketika Indonesia menghadapi krisis moneter pada tahun 1997, perkebunan menjadi salah satu penopang penting. Dari akumulasi sejarah dapat dilihat bahwa perkebunan akan lebih kokoh ditegakkan dengan menunjukkan dari kekuatan modal, manajemen, penelitian dan penemuan benih unggul, hingga pendidikan khusus dan pemasaran. Tak ayal perkebunan menjadi simbol agribisnis di Indonesia. Berikut data perkembangan perusahaan perkebunan besar menurut jenis tanaman 2019 s.d 2021 :

Tabel 7 Data Perusahaan Perkebunan Besar di Indonesia Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman Perkebunan Besar	Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman (Unit)		
	2019	2020	2021
Tanaman Tahunan			
Karet	286	286	324
Kelapa	107	-	-
Kelapa Sawit	2056	2335	2892
Kopi	89	95	92
Jenis Tanaman Perkebunan Besar	Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman (Unit)		
	2019	2020	2021
Kakao	72	73	62
Teh	93	96	98
Cengkeh	52	-	-

Kapuk	-	-	-
Kina	-	-	-
Tanaman Musiman			
Tebu	95	111	86
Tembakau	4	5	3

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Menurut data tabel 7 diatas, perusahaan perkebunan besar yang terus berkembang 3 (tiga) tahun belakangan ini yaitu perusahaan komoditi kelapa sawit.

Indonesia juga merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dunia, sekitar 50% pasokan minyak sawit mentah dunia berasal dari Indonesia.

#### Produsen CPO Dunia (Ton)

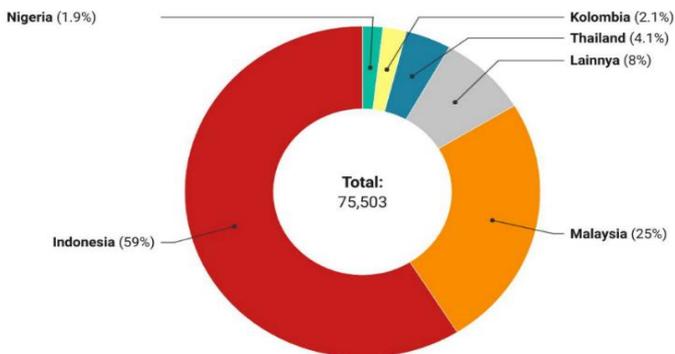


Chart: Robertus Andrianto • Source: Statista • Created with Datawrapper

Gambar 6 Produsen CPO (Ton)

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/>

Menurut pengertian PSAK, aktivitas perkebunan atau agrikultur (*agricultural activity*) meliputi pengelolaan transformasi biologis dan memanen aset biologis oleh entitas untuk tujuan ekonomis atau untuk diubah menjadi produk agrikultur atau menjadi

aset biologis tambahan. Menurut Narumondang B. Siregar (2019:1), kegiatan operasional perkebunan meliputi pengupayaan budidaya tanaman (persiapan pembukaan lahan dan pengelolaan, kemudian proses pembibitan, penanaman dan pemeliharaan), kegiatan produksi (Panen dan pengolahan hasil tanaman), perdagangan hasil produksi (pemasaran dan kegiatan usaha lainnya), termasuk usaha agrowisata dan agrobisnis, dan kegiatan usaha lainnya sebagai penunjang usaha perkebunan.

Sebagai entitas dengan keunikan tersendiri dikarenakan adanya aset biologis yang menjadi komoditas hortikultura, sector agrikultur memperlakukan aset biologis secara unik pula. Industri agrikultur dituntut untuk memberikan informasi secara benar dan memadai bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perusahaan. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) pada tahun 2001 menerbitkan IAS 41 yang mengatur akuntansi agrikultur, yang di dalamnya mengatur penyajian kinerja perusahaan agrikultur. Yang kemudian diamandemen oleh IASB pada tahun 2014 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016. Pada tahun 2015, Indonesia yang merupakan anggota negara G20, mengesahkan PSAK 69 Agrikultur hasil adopsi IAS 41 dan sejak 1 Januari 2018 efektif diberlakukan.

## **RUANG LINGKUP PSAK 69**

Aset biologis berupa tanaman produktif menurut PSAK 69 dikecualikan dari ruang lingkup PSAK 69 (IAI, 2015), hal ini berkaitan erat dengan berlakunya PSAK 16 yang menyatakan tanaman produktif termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 (IAI, 2015). Maka ruang lingkup PSAK 69 antara lain, aset biologis yang bukan tanaman produktif, produk agrikultur yang telah dipanen, dan aset biologis pemberian dari pemerintah. Namun, hal ini tidak berlaku untuk tanah yang digunakan atau terkait dengan aktivitas agrikultur, tanaman produktif kecuali produk dari tanaman itu sendiri, tanaman produktif yang diperoleh dari hibah pemerintah dan aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur.

Hewan atau tumbuhan hidup merupakan aset biologis, contohnya tumbuhan padi, kelapa sawit, hewan ternak, dan ikan. Aset biologis mengalami transformasi dalam dalam aktivitas agrikultur, dimulai dari proses tumbuh, berkembang biak, menghasilkan produk, dan prokreasi yaitu pertumbuhan aset biologis sampai pada titik tertentu kemudian menghasilkan. Adanya transformasi biologis ini mengakibatkan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyebabkan perbedaan nilai setiap asetnya (Rachmawati, Oktariyani dan Ermina, 2019).

Aset biologis	Produk agrikultur	Hasil Pemrosesan setelah Panen
Domba	Wol	Benang karpet
Pohon dalam hutan kayu	Pohon tebangan	Kayu gelondongan, potongan kayu
Sapi perah	Susu	Keju
Babi	Daging potong	Sosis, ham (daging asap)
Tanaman kapas	Kapas panen	Benang, pakaian
Tebu	Tebu panen	Gula
Tanaman tembaka	Daun tembakau	Tembakau
Tanaman teh	Daun teh	The
Tanaman Anggur	Buah anggur	Minuman anggur (wine)
Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
Pojon kelapa sawit	Tandan buah segar	Minyak kelapa sawit
Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet
<p>Beberapa tanaman, sebagai contoh, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet, memenuhi definisi tanaman produktif (<i>bearer plants</i>) dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Namun, produk yang tumbuh (<i>produce growing</i>) pada tanaman produktif (<i>bearer plants</i>), sebagai contoh, daun teh, buah anggur, tandan buah segar kelapa sawit, dan getah karet, termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur.</p>		

Gambar 7 Transformasi Aset Biologis

Aset biologis menurut PSAK 69 (IAI,2015) dapat dibedakan menjadi aset biologis produktif/ *bearer biological assets* (BBA) yaitu aset biologis yang menghasilkan produk agrikultur seperti getah karet yang dihasilkan oleh tanaman karet, dan aset biologis yang dapat dikonsumsi/ *consumable biological assets* (CBA) yaitu aset biologis yang diperuntukkan dijual atau diolah menjadi produk agrikultur, contohnya pohon jati. Aset biologis, khususnya yang berbentuk tanaman perkebunan menurut No. SE-02/PM/2002 Lampiran 13, diklasifikasikan menjadi tanaman semusim, tanaman keras, Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali tetapi bukan tanaman keras, tanaman hortikultura, tanaman non hortikultura, dan tanaman belum

menghasilkan. Menurut SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 , tanaman semusim dimasukkan pada akun inventory, dan sedangkan yang tidak semusim atau jangka panjang dimasukkan pada akun aset tetap.

## **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

Sejak diberlakukannya PSAk 69, perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia mulai menerapkan pengakuan aset biologis atau produk agrikultur yang harus memenuhi persyaratan jika, dan hanya jika:

1. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas;
3. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Untuk aset biologis yang pada saat awal pengakuan tidak memiliki harga pasar dan pengukuran nilai wajar alternatif yang digunakan kurang jelas dan tidak bisa diandalkan maka aset biologis diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai . Sebelum diberlakukan PSAK 69, nilai wajar dari aset biologis tidak mampu diukur secara andal sehingga akan berpengaruh pada kualitas dari informasi laporan keuangan (Muchlis, Suhartono, Khotimah, 2021) .

Menurut hasil penelitian Simanjorang dan Supatmi (2014), sejumlah PTPN di Indonesia dalam pengukuran aset biologis menggunakan harga perolehan sehingga timbul penyusutan, tidak sesuai dengan IAS 41 yang mengukur aset biologis sebesar nilai wajar dikurangi taksiran biaya untuk menjual. Hal ini dikarenakan dual standar yang digunakan pemerintah Indonesia yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP dan LKPD), apabila aset biologis (tanaman dan ternak) diperuntukkan dijual atau

diberikan kepada masyarakat, maka perlakuan akuntansinya sesuai PSAP 05 tentang Persediaan.

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3081-perlakuan-akuntansi-aset-biologis-menurut-sap-dan-sak.html>)

## **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan aset biologis sejak berlakunya PSAK 69 menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan di bidang perkebunan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis, seperti intensitas aset biologis, pertumbuhan perusahaan, jenis KAP, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas, tingkat internasionalisasi dan lainnya. Dalam penelitian Nur'aini, Sriyunianti dan Andriani (2020) mengungkapkan bahwa intensitas aset biologis dan tingkat internasionalisasi berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis setelah berlakunya PSAK 69 pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin besar intensitas aset biologis semakin besar nilai aset biologis perusahaan tersebut, dan menyebabkan pengungkapan aset biologis lebih terperinci dan lengkap.

## **PENYAJIAN**

Pada umumnya perusahaan perkebunan dalam menyajikan laporan keuangan mengacu pada PSAK no. 1 yang berlaku secara umum, yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Namun bagi untuk perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) penyajian mengacu pada SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan mengatur mengenai prosedur akuntansi khusus untuk industry perkebunan. Pada Entitas Perkebunan, perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan disajikan dalam rekonsiliasi.

Kegiatan atau aktivitas industri perkebunan ini dirangkum dalam suatu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi bagi *stakeholder*, salah satunya investor. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Tabel 8 Contoh Pencatatan Akuntansi Perkebunan

Berikut contoh jurnal tiap aktivitas dalam akuntansi perkebunan :

<b>Aktivitas</b>	<b>Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
<b>Pembelian bibit</b>	Bibit	xxx	
	Kas		xxx
<b>Pembibitan</b>	Pembibitan	xxx	
	Bibit		xxx
<b>Pembebanan biaya tenaga kerja bagian pembibitan</b>	Pembibitan	xxx	
	B.Gaji		xxx
<b>Pembayaran upah/gaji tenaga kerja bagian pembibitan</b>	B.Gaji	xxx	
	Kas		xxx
<b>Penanaman bibit ke area lahan</b>	TBM (Tanaman Belum Menghasilkan)	xxx	
	Pembibitan		xxx
<b>Pembelian pupuk</b>	Pupuk	xxx	
	Kas		xxx
<b>Pemberian pupuk untuk TBM</b>	TBM	xxx	
	Pupuk		xxx
<b>Pembelian Pestisida</b>	Pestisida	xxx	
	Kas		xxx

Aktivitas	Akun	Debit	Kredit
<b>Pengeluaran pestisida dari gudang untuk TBM</b>	TBM	xxx	
	Pestisida		xxx
<b>Reklasifikasi TBM ke TM</b>	Tanaman Menghasilkan (TM)	xxx	
	TBM		xxx

(Sumber: <http://ayuangelwhite.blogspot.co.id/2014/10/tugas-akuntansi-perkebunan.html>, Judul TA “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi komoditi Teh di PT Perkebunan Nusantara VIII”)



## AKUNTANSI MENTAL

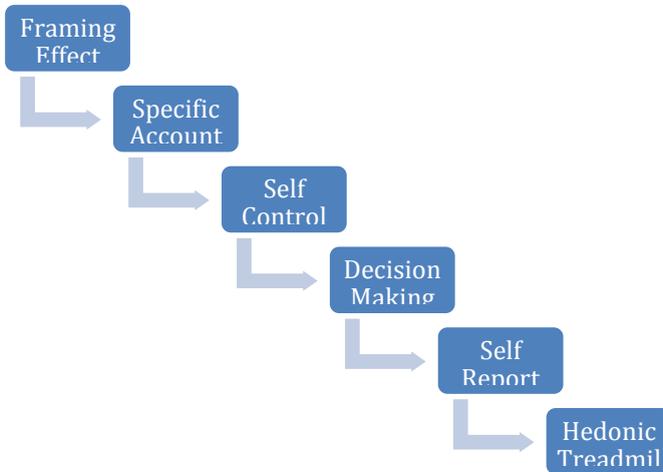
### **KONSEP MENTAL ACCOUNTING**

**S**ebuah konsep ilmu ekonomi perilaku yang menyatakan bahwa manusia memiliki nilai yang berbeda-beda terhadap fungsi uang, dan hal itu mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak-rasional. Bagaimana perilaku manusia dalam menilai fungsi uang? Hal ini sangat menarik dimana manusia dituntut untuk dapat mengelola uang yang diperoleh dari penghasilan rutin dan penghasilan lain-lain. Kemampuan manusia untuk mengelola uang sangat menentukan dalam Mental accounting lebih jauh lagi bahkan cara pandang manusia terhadap uang merupakan dasar dalam penggunaan uang. Pada umumnya manusia menginginkan kesejahteraan atau berkecukupan secara material. Lebih jauh karena kesejahteraan dapat mengantarkan manusia kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan tambahan (tersier). Manusia sebagai individu secara normal akan memiliki perasaan bahagia jika memiliki uang dan mampu memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Mentalitas seseorang dalam mengelola uang sangat bervariasi, hal tersebut dapat mempengaruhi rasionalitas pengambilan keputusan dalam penggunaan uang.

Konsep *mental accounting* diperkenalkan oleh Richard Thaler tahun 1999 dalam *paper* berjudul “*Mental Accounting Matters*,” (*Journal of Behavioral Decision Making*). Thaler menggambarkan bahwa manusia memiliki cara penilaian yang berbeda terhadap uang,

dan hal itu dapat tercermin dalam pengambilan keputusan yang tidak rasional. Teori ini menggunakan analogi bahwa manusia sama halnya dengan perusahaan, setiap manusia mencatat dan mengategorikan pengeluaran ke dalam akun-akun yang ada dalam pikiran mereka (Rospitadewi dan Efferin, 2017). Proses berpikir manusia dalam memutuskan suatu pembelian atau aktivitas ekonomi dapat disamakan dengan tahapan proses akuntansi seperti yang dilakukan dalam perusahaan yang meliputi pembukuan dan evaluasi pengambilan keputusan dalam melakukan konsumsi.

Secara sederhana dalam konsep ini seorang individu manusia mengklasifikasikan uang secara berbeda-beda berdasarkan kriteria subjektif, dan hal ini seringkali mengarahkan kepada pengeluaran yang tidak rasional dan keputusan investasi yang tidak produktif. Pada penerapan Mental Accounting berimplikasi bahwa uang dianggap memiliki kegunaan dan nilai yang sama, dan tidak disarankan untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal lain di luar perencanaan, dalam hal ini sebaiknya menggunakan uang untuk pengeluaran khusus yang sudah direncanakan. Model perilaku konsumen pada tahun 1985 mengalami perkembangan sebagai dampak dari meningkatnya tingkat konsumsi produk dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu model perilaku konsumen yang dikembangkan berdasarkan aspek psikologi dan ekonomi mikro hingga selanjutnya menghasilkan teori Mental accounting yang diperkenalkan oleh Thaler. Pikiran merupakan dasar yang menggerakkan perilaku manusia, pikiran meliputi aktivitas mental secara kognitif, maupun perasaan dan emosi.



Gambar 8 Tahapan *Mental Accounting*

Teori Perilaku ekonomi menyatakan bahwa secara mikro manusia akan berperilaku secara ekonomis karena kelangkaan sumber daya (uang, barang, jasa, waktu). Dalam halnya untuk mencapai tujuan secara ekonomi, baik individu maupun organisasi memiliki dasar prinsip yang sama yaitu optimalisasi tujuan dan efisiensi pengorbanan. Pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis harus berdasar pada analisis biaya – manfaat ; yaitu bagaimana tingkat manfaat yang dapat dicapai dibandingkan dengan pengorbanan yang telah di keluarkan. Berdasarkan berbagai hasil penelitian (Guyen & So- rensen, 2012; Thaler & Sunstein 2008) mengungkapkan analogi kesamaan mekanisme pikiran manusia dengan system akuntansi.

Tabel 9 Kesamaan Cara Kerja Pikiran dan Sistem Akuntansi

	Cara Kerja Pikiran	Sistem Akuntansi
Tahap 1	Observasi	Perekaman / Pencatatan
Tahap 2	Analisis	Penggolongan
Tahap 3	Positif - Negatif	Pelaporan
Tahap 4	Pengambilan keputusan	Penyajian Laporan Keuangan

Sumber : Guyen & So- rensen, 2012; Thaler & Sunstein 2008

Dari table 9 dapat di lihat bahwa proses berpikir adalah suatu proses menganalisis informasi untuk pengambilan sebuah keputusan. Mental bersifat psikologi yaitu berasal dari pola pikir yang selalu berkembang. *Mental Accounting* seseorang adalah cara / tahapan berpikir yang sesuai siklus akuntansi dalam pengambilan keputusan. Dalam hasil penelitiannya Thaler (1999) mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki cara penilaian yang berbeda terhadap uang yang berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak rasional.

Akuntansi memiliki karakteristik fungsi sebagai bahasa utama dalam Bisnis, (Lamberton, 2015) laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian laporan keuangan bertujuan sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) perusahaan terhadap stake holders dan share holders. Laporan keuangan dapat dilihat sebagai indikasi kinerja keuangan perusahaan, dalam hal ini laporan keuangan di dasarkan pada asumsi dasar, Prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan standar akuntansi sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan ini memiliki nilai intrinsik yang di ukur secara tepat, sehingga laporan keuangan dalam kategori berkualitas dan objektif. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, maksimalisasi profit sebagai tujuan utama perusahaan. Lamberton (2015:28) berargumen bahwa asumsi-asumsi yang membangun kualitas laporan keuangan Akuntansi itu adalah delusional, artinya dalam akuntansi bahwa objektivitas, independensi, dan kode etik penyajian laporan keuangan pada realitasnya adalah untuk tujuan utama kepentingan perusahaan semata untuk mencapai profitabilitas. Lebih jauh Lamberton berargumen mengenai peranan akuntansi dalam Bisnis dalam membangun kekuatan Bisnis besar dan berdampak pada egoisme keserakahan, eksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan.

## MENTAL AKUNTANSI DALAM PERILAKU EKONOMI

Dengan melihat perilaku manusia secara individu maupun manusia sebagai pelaku usaha dalam melihat fungsi uang sebagai komoditi yang dapat dipertukarkan. Bahwa dapat dilihat bahwa mentalitas mengelola uang tergantung pada beberapa faktor:

1. Tujuan
2. Cara pandang pada kebutuhan
3. Tingkat Penghasilan

Thaler mendefinisikan *Mental Accounting* sebagai satu set *system* operasi kognitif yang dimiliki individu dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas keuangan. Dalam teori *Mental Accounting* Thaler mempermasalahkan konsep fungsi uang yang dapat dipertukarkan. Konsep ini menyatakan bahwa semua uang dapat dipertukarkan secara timbal balik dan bahwa setiap individu harus memperlakukan semua uang dengan cara yang sama, terlepas dari tujuan penggunaan atau asalnya.

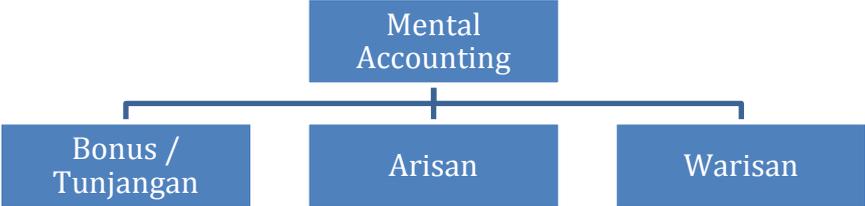
Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dapat memenuhi kelangsungan hidupnya. Uang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Vohs & Baumeister (2011) dalam hasil studinya menyimpulkan bahwa uang dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi manusia. Lebih lanjut lagi argument bahwa uang, barang dan jasa yang dibeli, dapat mendatangkan kebahagiaan masih kontroversi. Karabati & Cemalcilar (2010) menjelaskan dalam artikelnya bahwa kemampuan membeli barang-barang mewah dipersepsikan sebagai atribut, label dan statement mengenai tingkat kesuksesan seseorang.

Argumen dari Lamberton (2015) mengenai ilmu akuntansi yang objektif, independent, pemisahan entitas Bisnis dari individu adalah sebuah delusi dari egoisme, prioritas laba, dan dehumanisasi – pernyataan Lamberton membutuhkan argumentasi dan kritik yang dapat menyeimbangkan peran akuntansi. Beberapa pengembangan penelitian melampaui paradigma kritis yang sekularis dengan memasukkan unsur religious-spiritual-mistis dalam peranan akuntansi

(McPhail, 2011; Molisa, 2011; Triyuwono, 2000; Kamayanti, Triyuwono, Irianto, & Mulawarman, 2011; Efferin, 2015, 2016). Hasil penelitiannya menjadi referensi bagaimana peran akuntansi tidak delusional dan bagaimana mencapai kebahagiaan yang sejati dari materialitas – bagaimana manusia sebagai fitrahnya menjalani kehidupan-berperilaku ekonomi – menjalani dengan keseksamaan-kesatuan (*mindfulness*) – hingga mencapai kebahagiaan dengan berdasarkan cara berpikir yang berbasis *Mental Accounting*.

Sebagai contoh, jika seorang pegawai memperoleh Bonus kinerja akhir tahun sebesar Rp100 juta, maka ada kecenderungan bonus tersebut dapat digunakan untuk membeli barang mewah, liburan, dan pengeluaran lain yang tidak di penuhi dengan gaji rutin. Konsep ini mendeskripsikan bahwa manusia dapat berlaku *impulsive* dengan uang yang tidak terduga karena adanya penerimaan uang diluar rencana. Maka dalam studi tersebut Thaler merekomendasikan bahwa manusia sebaiknya menggunakan uang sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan, memperlakukan sama, tidak membedakan asal sumber uang tersebut.

**MENTAL ACCOUNTING DALAM FAMILY FINANCE**



Gambar 9 Mental Accounting dalam Family

Dalam pengelolaan pengawasan dana rumah tangga dibutuhkan prinsip 4A yaitu : (1). *Accounting*; (2) *Analysis* ; (3) *Allocation*; (4) *Adjustment*. Tahap pertama adalah kebiasaan mencatat,

baik itu secara pembukuan manual atau menggunakan aplikasi. atau merekam atau pembukuan. Tahap kedua adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan yang di hadapi. Ketiga adalah mampu mengalokasikan. Keempat adalah penyesuaian jika ada hal atau kondisi yang tidak terduga.

## **DISIPLIN TATA KELOLA DAN SIKAP TERHADAP UANG**

Rumah tangga atau keluarga dapat dikatakan sebagai suatu institusi yang terkecil namun memiliki peranan yang penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia. Tujuan orang menikah atau berumah tangga adalah memiliki keturunan, memiliki generasi penerus, memiliki rumah tangga yang langgeng hingga akhir hayat. Berdasarkan tujuan berumah tangga tersebut, maka perlu menetapkan (1) visi jangka Panjang, (2) program-program jangka pendek, (3) bagaimana memiliki aset, (4) kiat-kiat menjaga rumah tangga sehingga langgeng sampe generasi mendatang, (5) keberlanjutan. Sebuah keluarga merupakan suatu kesatuan atau gabungan antara dua pihak dengan perbedaan karakter, gabungan antara dua pihak dalam mengelola asset (dana rumah tangga) bersama, sehingga membutuhkan tata kelola yang baik atau kesepahaman. Berbagai artikel mengenai rumah tangga dapat menyimpulkan bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga maka utamanya adalah kepercayaan (*trust*) dan sikap bertanggung jawab (*akuntabel*). Proses berpikir suami dan istri sangat penting dalam menentukan pengelolaan keuangan rumah tangga.

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan perusahaan, dalam hal ini penggunaan keuangan dalam keluarga juga perlu tahapan manajerial yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Tahapan proses pengelolaan dana rumah tangga oleh suami dan istri dapat di analogikan dengan proses dalam siklus akuntansi. Keterbukaan sangat penting rumah tangga, bahkan menjadi keutamaan, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak dapat dilakukan satu pihak namun menyangkut keputusan bersama. Mengapa pengawasan penggunaan

uang dalam rumah tangga menjadi penting? Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara/Bisnis/individu agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, apalagi ini menyangkut uang dimana banyak orang yang tergiur untuk memilikinya. Pengelolaan uang bersifat sangat beresiko karena uang bersifat likuid / lancar. Pengawasan Dana Rumah tangga yang efektif: (1) tetapkan target (2) Perhatikan nilai uang di masa depan, seperti pada pinjaman berjangka (3) Dana Cadangan.

Tantangan dalam membina rumah tangga yang langgeng adalah kemampuan mengatasi masalah-masalah yang timbul selama perjalanan waktu pernikahan. Seperti halnya kurva pengalaman, maka usia perjalanan rumah tangga menentukan kedewasaan (*maturitas*) pengawasan rumah tangga. Jika kita melihat model pengawasan rumah tangga dan usia pernikahan, maka dapat dibedakan per dekade usia perkawinan.

Tabel 10 model pengawasan rumah tangga dan usia pernikahan

Usia Pernikahan	Kondisi Keuangan
Dekade I – 10 tahun	Step 1 – <i>Unstable income</i>
Dekade II – 20 tahun	Step 2 - <i>Saving and Investment</i>
Dekade III – 30 tahun	Step 3 - <i>Financial Freedom</i>

Penjelasan pada tabel 10 tentang model pengawasan rumah tangga dan usia pernikahan antara lain :

1. Dekade I – 10 tahun

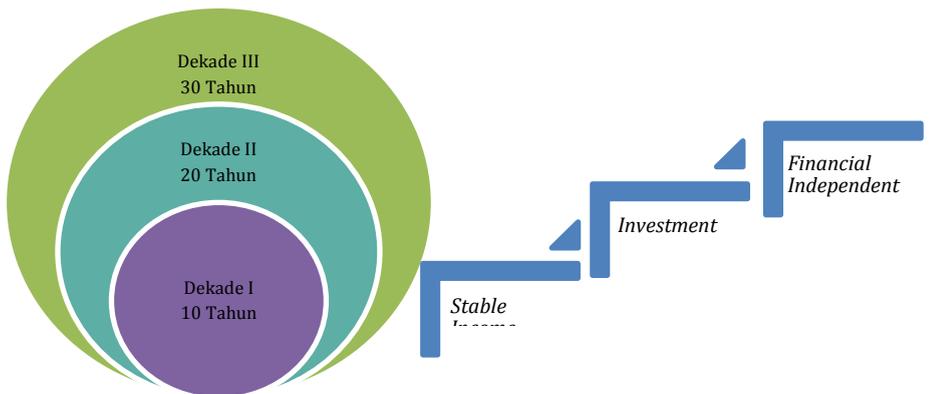
Pada usia pernikahan 10 tahun, yaitu satu decade pertama. Usia pernikahan pada awal-awal tahun pertama sangat rentan, hal ini dikarenakan usia kebersamaan masih di tahap awal dan masih dalam proses penyesuaian menyatukan pandangan – kebiasaan – tujuan dari dua orang yang berbeda. Hal yang kedua adalah pada dekade pertama ini kemampuan ekonomi masih belum stabil, dikarenakan kebutuhan akan pendidikan anak masih tinggi, kebutuhan primer seperti *property* atau kendaraan biasa dicukupi pada dekade awal, hal tersebut dapat menjadi ujian dalam mengelola rumah tangga.

2. Dekade II – 20 tahun

Pada usia pernikahan 20 tahun, yaitu dekade kedua. Pada dua dekade ini, biasanya kondisi keuangan keluarga sudah mulai tertata dengan baik, kebutuhan primer sudah terpenuhi, biasanya jenjang karir juga sudah mulai meningkat seiring waktu. Pada momen ini bahkan bisa menyisihkan keuangan untuk investasi masa depan.

3. Dekade III – 30 tahun

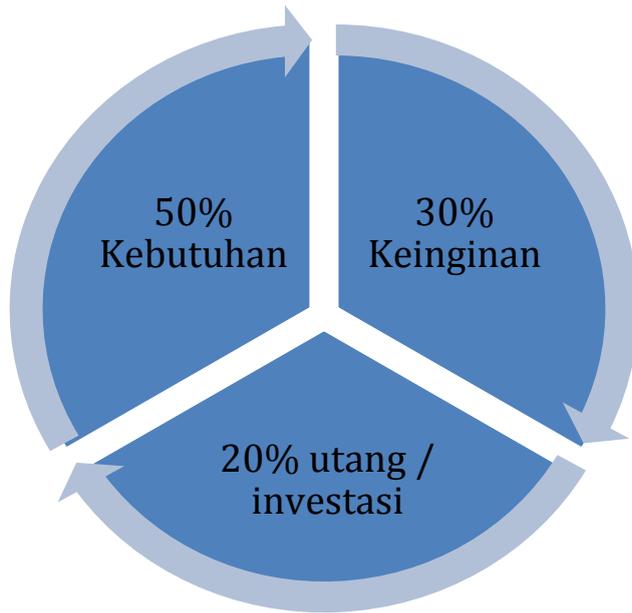
Pada usia 30 tahun, yaitu dekade ketiga. Dapat dilihat dari usia anak-anak sudah dewasa dan memasuki dunia kerja. Pada usia ini biasa sudah mempersiapkan jaminan hari tua dan utang-utang jangka Panjang sudah liable (selesai), sehingga kondisi keuangan terbebas dari kewajiban-kewajiban hutang (*financial freedom*). Apakah kondisi *financial freedom* ini otomatis di capai pada usia pernikahan ke-30? Hal tersebut bergantung pada proses berpikir mengenai dana keuangan rumah tangga, cara pengawasan, sikap mental terhadap uang (*mental accounting*) yang menentukan bagaimana tata kelola uang untuk mencapai keberlanjutan dana rumah tangga yang *going concern*.



Gambar 10 Keadaan Finansial dalam 3 Dekade

Mental akuntansi dalam rumah tangga adalah sikap terhadap fungsi uang. Tata kelola keuangan / Portofolio Rumah tangga. Pengelolaan keuangan sangat memerlukan ketrampilan untuk mengatur dan manajemen yang cermat dan baik. Proses monitoring

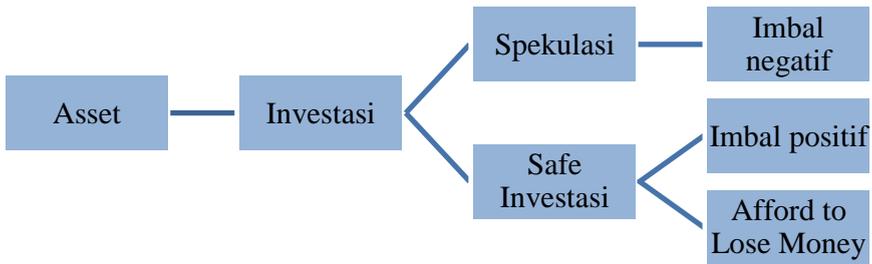
anggaran. (1) menentukan posisi keuangan (2) target dan realisasi anggaran (3) menghitung varian (4) sebab dan akibat (5) pengembangan dan *action*.



Gambar 11 Tata kelola keuangan / Portofolio Rumah tangga

### **MENTAL AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Mental akuntansi juga berlaku dalam investasi, seorang investor dapat memilih aset untuk diinvestasikan secara spekulasi dan pada portofolio yang aman. Investor memisahkan portofolio yang spekulatif sehingga imbal yang negative dari hasil yang akan diperoleh tidak mempengaruhi imbal yang positif dari hasil sebelumnya. Hal ini dapat berarti bahwa dapat diperoleh uang tambahan yang dapat diinvestasikan dan siap untuk kehilangan (*afford to lose*) pada investasi yang spekulatif.



Gambar 12 Mental Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan

Namun tingkat sanggup kehilangan uang adalah suatu bentuk bias dari Mental Accounting, karena pada dasarnya fungsi uang adalah sama, dan tidak ada keputusan yang dapat membenarkan suatu kehilangan uang yang dimiliki.

Beragam bentuk pencapaian kebahagiaan dari studi yang dilakukan oleh Efferein dkk (2017) adalah melalui sasaran tujuan hidup seperti :

1. Pencapaian tujuan hidup (*goal*) seperti pendapatan
2. Pendidikan
3. Berhasil melalui suatu perjuangan seperti sulitnya masa studi
4. Pernikahan
5. Dapat membeli materi ; pakaian ; hobi
6. Memiliki cukup materi
7. *Travelling*

Motivasi dalam mempelajari Mental Accounting adalah untuk mengembangkan pemahaman dari psikologi individu dalam menghadapi pilihan. Dengan melakukan observasi dari perilaku sehari-hari menyimpulkan aturan mereka sendiri, dari situ kita mempelajari Mental Accounting Aristantia & Lating (2021). Bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan akuntansi dari beberapa alternatif pilihan? (Thaler, 1999; Aristantia & Lating, 2021).

Inti dari Teori Mental Accounting adalah bagaimana Individu bereaksi merespon dan mengevaluasi situasi.

Terdapat tiga elemen yang membuat *Mental Accounting* adalah persepsi dari hasil (*outcome*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan:

(1) memastikan aktivitas untuk pencatatan yang spesifik, dan (2) menentukan limit atau (3) evaluasi periode dari akun, beberapa di evaluasi secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Tiga faktor ini mempengaruhi bagaimana mind-set dan pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi juga berlaku dalam lingkup keluarga karena keluarga juga memiliki Aset dan Hutang, untuk itu Akuntansi juga penting dalam membukukan besarnya biaya dan pendapatan dalam periode tertentu (Pahl, 2000).

### ***MENTAL ACCOUNTING FOR HAPPINESS***

Jika dilihat dari kegunaan akuntansi adalah seni pencatatan hingga pelaporan dalam proses mengelola keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagaimana implementasi mental accounting ini dalam mental pengelolaan uang dalam lingkup Bisnis maupun secara individu dan mencapai kebahagiaan dari pencapaian material ? Terdapat kesamaan pada proses berpikir manusia dan tahapan pada siklus akuntansi, yaitu dapat dijelaskan pada studi yang dilakukan efferin (2017) sebagai berikut:

#### ***1. Framing effect***

Sebagai seorang individu tentunya manusia melalui suatu perjalanan hidup yang memberikan pengalaman dan membentuk nilai-nilai yang tertanam dalam karakternya. Kurva pengalaman pada manusia tentunya berbeda-beda berdasarkan latar belakang budaya, keluarga, pendidikan, latar belakang ekonomi, perjalanan usia, pekerjaan, exposure dari domisili lokasi, dll. Seorang individu mengalami transformasi perubahan terus-menerus seiring waktu, dengan juga dipengaruhi oleh perubahan zaman pada sektor ekonomi, teknologi informasi, perubahan regulasi, digitalisasi. Banyak factor yang membentuk cara berpikir (*framing*) seseorang

yang menentukan prioritas hidup, pola konsumtif, orientasi ekonomi, kebiasaan (*habitual*). Framing seseorang akan menjadi pemandu (*guidance*) dimana nilai-nilai yang baik akan menjadi refleksi mengenai apa yang menjadi prioritas, apa yang memberikan utilitas (kemanfaatan) yang lebih diantara beberapa alternatif pilihan (*choices*). Sebagai contoh, jika kita terbiasa dalam berbelanja menggunakan perencanaan seperti belanja bulanan secara disiplin untuk menghindari pembelian yang berulang-ulang dalam jumlah eceran yang tidak ekonomis, maka kita akan menghindari pengeluaran belanja di luar perencanaan. *Framing effect* ini akan berimplikasi terhadap komponen-komponen lainnya dalam *Mental accounting*.

## 2. *Specific account(s)* dan *self control*

Dalam proses berpikir manusia dengan *framing* yang membingkai pola pikir maka sangat membantu dalam memilah informasi atau menggolongkan. Dalam hal pengelolaan keuangan adalah menggolongkan penerimaan dan pengeluaran, maka di harapkan lebih dapat mengelola dengan lebih baik. Penerimaan perlu di golongkan ke dalam likuid ataupun penerimaan di masa yang akan datang, pendapatan tidak tetap. Karena pendapatan adalah sumber dana. Yang penting dilakukan adalah dengan membuat pos penerimaan baik yang utama maupun pendapatan sampingan. Dalam tata kelola dana keluarga perlu disiplin menjadwalkan pengeluaran mengidentifikasi dan memberi label. Manusia akan dihadapkan pada kelangkaan, keterbatasan sumber daya, maka penting dalam melakukan prioritas dan menetapkan tujuan secara efektif sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Dengan membuat pos-pos pengeluaran (*specific account*) harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, hal ini sangat membantu agar kita melakukan pengeluaran pembayaran secara teratur, terencana, dan tepat waktu.

Perencanaan sangat membantu tercapainya tujuan, dengan berjalannya waktu maka kita melakukan pengeluaran secara terencana dan spesifik. Kemudian dilakukan evaluasi atas

perencanaan, misalnya simpangan atas anggaran, apakah ada yang belum bisa dilaksanakan, ataupun pengeluaran (kegiatan) tidak terduga di luar perencanaan. Dalam mengelola keuangan ini sangat perlu pengendalian dan pengawasan secara pribadi (*self control*) dalam pengambilan keputusan seperti dalam melakukan pengeluaran, terkait prioritas kebutuhan dasar, kebutuhan Kesehatan, pendidikan, atau hiburan, menghindari pembelian konsumsi yang tidak bermanfaat. Dalam *mental accounting* manusia memiliki pola pikir yang membentuk akun-akun penerimaan uang dan akun-akun pengeluaran uang, juga simpangan jika ada pengeluaran atau hal tak terduga di luar perencanaan.

### 3. *Self Report*

Tahap ketiga adalah melakukan evaluasi atas pengambilan keputusan, hal ini berkaitan dengan apakah keputusan yang diambil sudah benar atau untuk dapat dilakukan perbaikan di masa depan. Setelah melakukan pengeluaran, kita akan berpikir kembali seperti halnya mengingat dan melakukan *self-report* (Thaler, 1999) untuk mengevaluasi keputusan yang diambil, apakah sudah mendapatkan manfaat yang optimal, apakah sebaliknya mendapat kerugian atau penurunan nilai ?

### 4. *Hedonic Treadmill*

Aktivitas ekonomi dalam melakukan transaksi pembelian akan berakhir ketika kita mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Pada saat kita mendapatkan apa yang diinginkan dan mengevaluasi putusan pembelian, maka kita akan merasakan tahapan adaptasi dimana kita akan kembali ke tahap nol, seperti kita pada proses merencanakan sesuatu yang baru dari awal. Pada tahap ini jika kita mengalami kepuasan atau pun kekecewaan karena mendapatkan sesuatu, hal ini hanya berlangsung sementara dan setelahnya perasaan tersebut akan berganti ke titik nol, tahap ini dikatakan sebagai tahap *hedonic treadmill*. Perasaan ini menjadi ilusi kebahagiaan dari mendapatkan suatu barang/jasa, tahap adaptasi terjadi Ketika perasaan itu memudar dan secara manusiawi kita menginginkan perasaan itu kembali ; sehingga

siklus ini berulang dan kita melakukan kembali pembelian berulang.

Saat *mental accounting* dibuat lebih sistematis untuk diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan, sistem anggaran, penilaian kinerja, pemberian imbalan dan hukuman, pembuatan rencana, dan sebagainya, maka ilusi tersebut melahirkan konsep-konsep akuntansi yang dikatakan oleh Lamberton (2015) sebagai delusi tentang objektivitas, kewajaran, independensi dan akurasi. Objektifikasi ini pada gilirannya justru memperkuat cara kerja pikiran yang berbasis *mental accounting*. Jadi, apa yang semula ada di ilusi pikiran, sekarang “menjelma” menjadi sebuah *pseudo* realita eksternal yang “objektif” dan akan digenggam makin kuat oleh para partisipan dalam dunia bisnis. Konsep-konsep ini digenggam kuat oleh para pelaku bisnis sebagai indikator “objektif” yang menentukan kesuksesan bisnis mereka. Jika perusahaan saya dapat mengambil dari luar sebanyak-banyaknya, maka yang di dalam akan semakin berbahagia. Jadi, akuntansi hanyalah upaya merasionalisasi apa yang sebenarnya diinginkan sejak dari pikiran awal, bukan sebuah konsep objektif “di luar” yang menunggu untuk ditemukan.

Akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan berbasis pada logika persamaan akuntansi dan penggolongan akun yaitu kelompok aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan profit. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari total nilai Asset perusahaan, atau nilai ekuitas, atau dari nilai harga saham. Untuk memenuhinya, perusahaan perlu perencanaan dan pengendalian berupa *budgeting* beserta akun-akunnya dengan limit masing-masing sebagai kendali operasional perusahaan. Inilah *self control* yang dikenal sebagai *planning and budgeting*.



## AKUNTANSI RUMAH TANGGA

### PENGERTIAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA

**R**umah tangga merupakan bagian dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau fasilitas dalam hidup, dan dapat terdiri dari satu keluarga atau serangkaian orang. Suatu tempat tinggal dikatakan terdiri atas sejumlah rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah pokok bagi bagian analisis dalam banyak cara sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan selaku sesi penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga (KBBI).

Keluarga adalah sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat umum. Posisi keluarga yang damai dan harmonis dapat menjadi tolak ukur wujud yang modern. Jika ada masyarakatnya modern dan berpendidikan akan memberikan dampak pada negara. Sehingga dapat disebut negara yang maju pasti didalamnya berdiri sebuah keluarga yang sejahtera.

Kerumitan dalam kehidupan keluarga yang utuh tidak bisa lepas dengan beratnya biaya yang harus dikeluarkan dalam keluarga untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sehingga kegunaan

pengelolaan dan bagaimana kita mulai menyusun yang digunakan dalam keuangan keluarga sangat dibutuhkan guna bisa menyiasati penerimaan dan biaya yang akan keluar dalam keluarga dengan baik dan benar. Bagaimana posisi akuntansi dalam hal ini sangat diperlukan sehingga harus dimengerti dan diimplementasikan di rumah tangga. Hal ini akan meyakinkan kita bahwa keuangan rumah tangga selalu dikelola dengan baik untuk menghindari pinjaman yang menunggak, untuk menjalankan semua keperluan keluarga, dan untuk terhindar dari masalah ekonomi lain yang bisa mengakibatkan terjadi masalah kecil dalam rumah tangga.

Keluarga kadang didalam ada dari suami, istri dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang suatu saat pertumbuhan yang beraanjak dewasa dan diawal dapat menunjukkan bagaimana kita mengenal arti diri sendiri, dan sehingga mengajari kita untuk mengenal diri sendiri tersebut Apa yang menjadi petunjuk, diakhirnya akan memberikan sebuah peristiwa individual. Dari mulai sini akan ia mulai terkenal sebagai individu. Individu ini pada level selanjutnya mulai merasakan bahwa sudah ada individu-individu lainnya yang berkaitan secara bagaimana manfaat yang akan diperoleh. Individu-individu tersebut adalah keluarga yang memelihara metode lihat dan metode menempuh masalah-masalahnya, membinanya dengan cara menelusuri dan apa yang akan terjadi pada hari esoknya, persiapan pendidikan, keterampilan dan akhlak. Yang pada akhirnya keluarga akan menjadi semacam bentuk untuk mengartikan itu merupakan keluarga yang *broken home*, *moderate home*, dan keluarga sukses.

## **AKUNTANSI DALAM RUMAH TANGGA**

Akuntansi adalah bagian ilmu pengetahuan yang sangat berharga, sehingga dapat dijadikan acuan sebagai salah satu cara untuk menguatkan kehidupan masyarakat dalam rangka cara mengelola keuangan yang ada di dalam rumah tangga (Yuliana, Setiawan, and Auliyah 2020). Akuntansi rumah tangga dilihat garis besar bisa dilihat dari arti secara terminologi, memaparkan bahwa akuntansi dalam rumah tangga merupakan penerapan cara

mengatur keuangan dalam rumah tangga dengan implementasikan unsur-unsur akuntansi (Yulianti 2016).

Akuntansi rumah tangga implementasikan dilaksanakan berdasarkan keinginan dari diri sendiri dan yang memiliki sifat berubah rubah karena tidak ada prosedur yang jelas ataupun ketentuan yang digunakan untuk mengaturnya. Beda halnya dengan akuntansi yang diimplementasikan oleh unit Lembaga berupa pemerintah atau bisnis yang mempunyai dasar dan aturan didalam pencatatan dan pelaporan (Espa 2011). Akuntansi rumah tangga sangat diperlukan dalam mengelola penerimaan dan biaya yang keluar dalam keuangan, mengingat situasi kehidupan dan keperluan yang bertambah banyak dan lebih komplek untuk mengharukan setiap anggota keluarga untuk dapat bertahan kelanjutannya untuk hidupnya (Suarni and sawal, 2022)

## **PENGANGGARAN**

Penganggaran adalah bagian dari cara akuntansi yang artinya dalam kehidupan sehari hari dalam rumah tangga. Penganggaran adalah kegiatan menggabungkan peristiwa, menilai kekuatan dari penerimaan yang diperoleh guna didistribusikan ke pengeluaran yang berharga dalam yang menjadi visi dan misi dalam keluarga. Perencanaan penganggaran yang baik sangat diperlukan guna terpenuhinya kebutuhan pada waktu yang akan datang dipakai oleh seseorang sebagai cadangan dalam meramalkan seluruh kemungkinan belum pasti pada masa depan (Yulianti 2016).

Menurut Kusufi and Halim (2014) anggaran merupakan berkas yang terdiri atas ramalan kerja, baik berupa pemasukan dan biaya keluar yang dipaparkan dalam bentuk moneter yang akan diraih pada masa waktu tertentu dan melibatkan data masa lalu sebagai macam pengendalian dan penilaian kinerja. Penganggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk disarankan bagi kelanjutan keuangan rumah tangga, penganggaran adalah cara yang memberikan akomodasi untuk mengendalikan dalam mengelola

dan mengawasi keuangan dalam rumah tangga (Setiowati 2016).

## **PERENCANAAN**

OJK (2017) memaparkan bahwa membuat rencana berupa keuangan rumah tangga yaitu sebuah kepiintaran khusus dalam membuat rencana dan mengatur keuangan rumah tangga sehingga menjadi lebih rinci dalam alokasi keperluan rumah tangga yang bagian dari kebutuhan bukan jangka panjang, menengah, ataupun jangka panjang. Perencanaan keuangan yang bagus akan memperoleh akibat dapat dengan mudah melaksanakan pengendalian dalam pengeluaran biaya rumah tangga juga distribusi dana yang telah dibuatkan anggaran sebelumnya..

Perencanaan keuangan rumah tangga merupakan sebuah cara untuk menggapai arti kita hidup dalam rumah tanggai melalui manajemen keuangan yang telah direncanakan, baik dalam jangka tidak Panjang maupun jangka tidak pendek Yang merupakan bagian dari perencanaan keuangan adalah untuk menghindari kondisi dimana defisit keuangan, karena situasi ini dapat menimbulkan pinjaman yang dimasa yang akan datang dan akan menimbulkan berbagai bermacam macam masalah rumah tangga (Probowati 2021). Perencanaan keuangan tidak hanya berhubungan dengan organisasi atau perusahaan, perencanaan keuangan tidak serta merta berkaitan dengan kegiatan bisnis atau komersial. Perencanaan keuangan juga merupakan informasi penting yang harus dipahami oleh setiap individu atau keluarga. Perencanaan keuangan akan membantu keluarga membagi dana yang diterima ke dalam posisi-posisi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan keluarga (Hasanah 2019).

## **PENCATATAN**

Perencanaan merupakan aktivitas guna menetapkan visi dan misi yang akan digapai di jangka yang mendatang baik yang bersifat jangka tidak pendek maupun bersifat jangka panjang panjang (Purwaji 2016). Menurut Mulyadi (2008) pencatatan merupakan

aktivitas yang diperuntukan guna memberikan jaminan dalam penanganan secara serupa kegiatan perusahaan dalam mengatur perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan uraian tersebut, pencatatan dapat diartikan sebagai membuat catatan akuntansi, kejadian yang terjadi, dihitung secara terencana dan teratur. Pencatatan terhadap sumber–sumber penerimaan dan biaya yang dikeluarkan dalam rumah tangga merupakan langkah yang tepat untuk memantau dan mengendalikan barang yang harus dibayar atau biaya yang keluar dalam rumah tangga.

Berbicara tentang keuangan dalam keluarga, kadang banyak hal yang perlu dibicarakan dan perlu direncanakan karena kebutuhan dalam keluarga banyak yang terduga. Sehingga kita perlu melakukan hal-hal di dalam perencanaan dalam keluarga yaitu:

1. Luangkan Waktu

Mungkin kita perlu luangkan waktu paling tidak satu kali dalam sebulan untuk membicarakan bersama membahas terkait keuangan rumah tangga. Manager keuangan keluarga harus merencanakan laporan biaya keluar dan juga memantau kondisi jumlah asset serta utang rumah tangga.

2. Simpan Argumen hanya untuk masalah yang besar

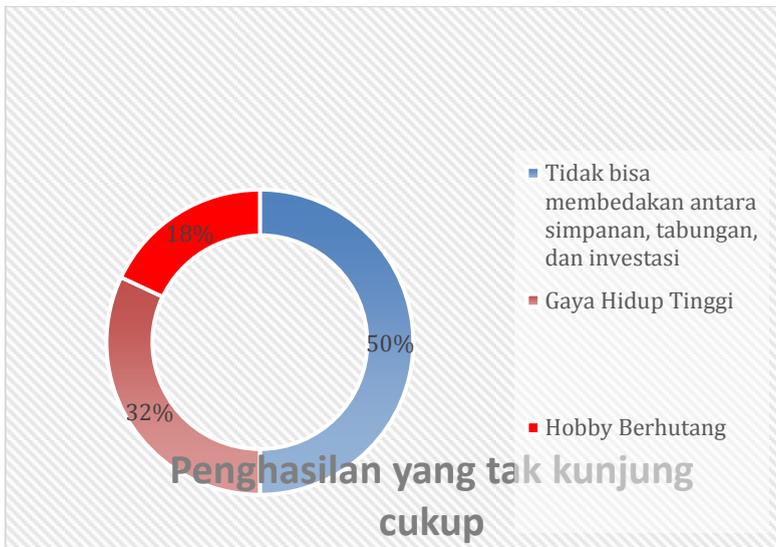
Perhatikan alokasi dalam jumlah yang direncanakan dalam pos biaya yang harus keluar untuk kita membelanjakan kebutuhan pribadi masing masing. contohnya, suami istri punya pos belanja sebesar Rp.555 ribu setiap bulan. Sehingga, anda berdua tetap mempunyai kebebasan dalam memutuskan pilihan pengeluaran namun tetap dalam batasan yang telah dibicarakan Bersama.

3. Libatkan Anggota Keluarga

Ada masalah yang masih kita perdebatan tentang keuangan yang bisa mengajak anak-anak anda. Contohnya pada saat kita akan merencanakan liburan, ada baiknya anda mengajak anak-anak untuk mengungkapkan solusinya. Mau liburan kemana memberikan konsekuensi jumlah biaya yang sebaiknya perlu diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Yakinlah, anak-anak anda akan belajar dari tahap ini.

#### 4. Menjadi pendengar Aktif

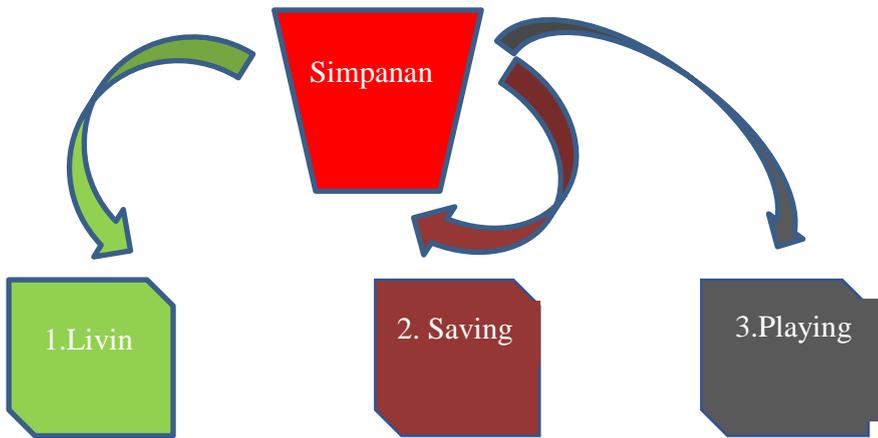
Komunikasi yang baik dan efektif memerlukan kemampuan mendengar. Mendengar dalam arti sebenarnya melibatkan indra telinga, mata, dan juga hati. Coba pikirkan kembali, bila kita mulai dengan tidak setuju dengan pendapat pasangan kita, apakah dalam hati kita mulai sibuk dengan menyiapkan beberapa pendapat defensif? Sadarkah anda, saat pikiran mulai berpindah, kita seharusnya stop untuk mendengarkan? Dengarkan fokus pada inti apa argumen suami istri, memberikan pertanyaan jika ada yang kurang anda pahami. Cukup kita untuk berhati hatilah untuk tidak menghakimi, melawan bicara untuk mengekspresikan pendapatnya.



Gambar 13 Penghasilan yang tak kunjung Cukup

Berdasarkan gambar 13 menjelaskan bahwa **50%** tidak bisa membedakan antara simpanan, tabungan, dan investasi. Sebagian besar pegawai mendapatkan gaji bulanan di sebuah rekening “tabungan”. Namun, jika setiap bulan kita rajin mengeprint buku rekening, coba cek kembali, berapa banyak jumlah mutasi debit yang anda lakukan dibandingkan mutasi kredit?. Umumnya mutasi debit jauh lebih banyak daripada mutasi kredit. Padahal, tabungan itu harusnya

banyak mutasi kredit, dan hanya didebit sesekali saat untuk keuangan tujuan finansial yang telah ditentukan. Sedangkan untuk **18%** adalah hobi berutang dan golongan ini paling suka sekali belanja dengan menggunakan kartu kredit dan dijadikan sebagai tambahan lini sebagai penambahan dalam penerimanaan. Untuk **32%** selanjutnya adalah gaya hidup tinggi, tidak bisa dipungkiri ini adalah penyakit yang hingga sekarang belum ada penyembuhnya, terutama bagi memiliki penghasilan tinggi



Gambar 14 Membagi 3 Rekening tabungan

Pada gambar 14 menjelaskan bahwa *living* mencakup pengeluaran rutin untuk keperluan sehari-hari misalkan makan, belanja bulanan, biaya rumah tangga, biaya tetap yang setiap bulan dikeluarkan seperti listrik, telepon, dan langganan TV, juga biaya pendidikan untuk anak. Jika kita memiliki cicilan berupa utang, yang mencakup seluruh cicilan bulanan kita atas kepemilikan rumah, kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, atau utang kartu kredit dan utang pribadi lainnya juga bisa masuk pos ini. Kemudian *Saving* yang mencakup alokasi rutin untuk menabung dan berinvestasi. *Saving* dilakukan pada saat kita menerima gaji setiap bulan, wajib di sisihkan terlebih dahulu. Dan Kemudian *Playing*

terdiri atas biaya keluar yang digunakan untuk hiburan, liburan, keanggotaan, olahraga, langganan majalah, dan bantuan saudara, hadiah serta sosial.

## **8 INDIKATOR SEHAT FINANSIAL DALAM KELUARGA**

Hal terpenting untuk menggapai apa yang menjadi tujuan keuangan itu yaitu dengan mengetahui terdapat indikator terkait keuangan yang sehat. Jika keuangan keluarga yang tidak sehat, maka akan sulit kita untuk menggapai apa yang menjadi tujuan keuangan itu sendiri. Contohnya saja keluarga anda bisa membeli rumah tinggal baru, namun pola hidup kita selalu menghabur haburkan uang. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa membeli rumah ketika biaya keluar lebih banyak dari pada menyimpan uang kita dibank. Sehingga ada 8 area yang harus anda perhatikan untuk menentukan seberapa sehat keuangan kita, dan seberapa jauh anda dalam menggapai berbagai apa yang menjadi cita-cita kita dalam hidup.

### **1. Punya dana darurat**

Setiap manusia punya wajib dana darurat kurang lebih 3x biaya keluar secara rutin setiap bulanan. Jadi, kalau tiap bulan perlu 5 juta untuk hidup, jumlah dana darurat minimal 15 juta. Meskipun itu, sangat disarankan kita memiliki target sebesar 12 kali biaya keluar yang rutin dalam bulanan, mengingat situasi ekonomi dunia yang masih belum stabil. Dana mendesak tersebut digunakan sewaktu waktu ada keperluan yang mendesak sehingga kita wajib mengeluarkan dana tersebut dengan mudah. Dana darurat boleh dalam bentuk tabungan atau deposito.

### **2. Mampu Mengelola Utang**

Kita tambahkan semua yang harus kita bayar minimum utang kita. Salah satunya kartu kredit yang kita miliki, kredit kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, KPR rumah, dan pinjaman kepada pihak ke 3. Total yang digunakan untuk membayar segala cicilan utang anda tidak boleh melebihi 35% dari penerimaan rutin bulanan. Khusus untuk KPR perumahan, porsinya tidak bisa melebihi 30% dari penerimaan setiap bulanan.

Contohnya gaji bulanan Rp 10 Juta, maksimal cicilan adalah Rp.3 Juta jika cicilan anda melebihi itu,kita harus menghasilkan keuangan lebih guna pokok utang agar cicilan per bulan bisa mulai pengurangan. Apabila kita akan menambah hutang dan posisinya lebih dari 30% dari gaji maka harus stop kita untuk berhutang, atau ada hutang yang perlu dilunasi terlebih dahulu.

### 3. Punya Rumah Tinggal

Kebutuhan primer seorang individu yaitu untuk sandang, pangan, dan papan. Jadi, memiliki rumah tinggal seharusnya bisa dijadikan indikator apakah keuangan anda sehat atau tidak. Mengapa kita bisa santai saja mencicil gadget terbaru setiap bulan, tapi masih enggan mencicil rumah?. Rumah tinggal merupakan yang penting apabila kita dalam mengatur keuangan. Daripada uangnya untuk kontrak yang setahun anggap saja 24 juta pertahun, alangkah baiknya kita gunakan untuk cicilan rumah KPR. Apalagi pemerintah sekarang lagi menggalkan KPR Rumah dengan DP 0%.

### 4. Punya Dana Pendidikan

Di rakyat Indonesia, biaya untuk Pendidikan merupakan hal yang menakutkan bagi sebagian banyak orang tua. Bagaimana tidak, dengan meningkatnya biaya Pendidikan kalua rata rata bisa mencapai 15% per tahun, kita tidak dapat *trial and error* dalam menyiapkan masa yang akan datang untuk si buah hati. Pastikan kita sudah memperhitungkan seberapa keperluan dana untuk Pendidikan anak kita dan kita sudah berinvestasi untuk menggapainya. Kebutuhan Pendidikan dari tahun ke tahun selalu naik jadi kita perlu mencadangkan dana Pendidikan untuk sampai kuliah anak anak kita.

### 5. Punya tabungan hari tua

kita yang pegawai pasti akan merasakan yang disebut pensiun. kita yang punya usaha ada masanya dapat diwariskan ke anak. Merencanakan dana hari tua sangat penting untuk kita yang tidak rela punya pola hidup yang menurun di masa depan. Sehingga gaji kita yang sekarang perlu ada alokasi dana untuk tabungan kita hari

tua, yang diharapkan masa tua kita tinggal menikmati hasil kerja kita dimasa muda.

6. Mampu Mengendalikan Gaya Hidup

Punya gaya hidup tinggi terutama di kota besar seperti Jakarta tentu sah saja. Tapi pastikan kita memang punya penerimaan guna membiayai itu semua, dan bukan pakai utang. Ingat persamaan, Penghasilan = Pengeluaran + Tabungan. Jangan sampai kita melebihi budget yang kita miliki dan ambil pinjaman, apalagi sekarang untuk pinjaman online cukup mudah dengan hanya melampirkan KTP dan kontak HP.

7. Punya Asuransi

Melindungi harga asset dan yang memiliki nilai ekonomi jiwa kita merupakan hal yang menjadi penting. Satu peristiwa dimana kita ada sakit keras atau musibah yang dapat melenyapkan rumah, bisa membuat keluarga kesehatan keuangan anda. Perlindungan di dapatkan diperoleh dengan asuransi, meningkatkan penambahan kekayaan didapatkan dengan menabung dan berinvestasi. Asuransi wajib apalagi untuk asuransi kesehatan, sehingga sangat membantu kita pada saat sakit yang mengharuskan rawat inap dirumah sakit seperti BPJS.

8. Tahu portofolio keuangan keluarga

Apa yang dimaksud aset kita hanya ada dirumah tinggal atau sudah tersebar sebagaimana dalam berupa asset finansial? Atau hampir 100% uang anda ada ditabungkan dan deposito. Kita harus tahu alur keuangan keluarga kita.

Berikut Contoh arus kas bulanan keluarga yang sederhana

Tabel 11 tentang Arus Kas Sederhana Keluarga

Aset		Contoh	Pribadi
<b>Aset Lancar</b>	Kas di Tangan	Rp 2.000.000	
	Tabungan	Rp 5.000.000	

	Deposito	Rp	20.000.000	
	Reksa dana Saham	Rp	10.000.000	
	Emas/ Logam Berharga	Rp	50.000.000	
	Lain-Lain	Rp	-	
<b>Total Aset Lancar</b>		Rp	87.000.000	
<b>Aset Tetap</b>	Saldo DPLK	Rp	10.000.000	
	Rumah (Kosong)	Rp	-	
	Tanah	Rp	-	
	Nilai Bersih sebuah bisnis	Rp	-	
	Ruko	Rp	-	
<b>Aset</b>	<b>Contoh</b>	<b>Pribadi</b>		
	Lain-lain	Rp	-	
	Pehiasan	Rp	-	
	Rumah ditempati	Rp	1.000.000.000	
	Mobil	Rp	150.000.000	
	Motor	Rp	-	
<b>total aset tetap</b>		<b>Rp</b>	<b>1.160.000.000</b>	
<b>total aset</b>		<b>Rp</b>	<b>1.247.000.000</b>	

	<b>Kewajiban</b>	<b>Contoh</b>	<b>Pribadi</b>
<b>Kewajiban jangka pendek</b>	Kartu kredit	Rp	-
	Pinjaman pribadi	Rp	-
	pinjaman mobil	Rp	50.000.000
	Pinjaman KTA	Rp	-

	<b>total kewajiban lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
	Pinjaman Rumah	Rp	750.000.000
	Pinjaman Lainnya	Rp	-
	<b>total kewajiban jangka panjang</b>	<b>Rp</b>	<b>750.000.000</b>
	<b>Total Kewajiban</b>	<b>Rp</b>	<b>800.000.000</b>
	<b>net worth (Aset-Kewajiban)</b>	<b>Rp</b>	<b>447.000.000</b>

Tabel 11 tentang arus kas sederhana dalam keluarga menunjukkan bahwa setiap pengeluaran dalam keluarga selalu ada pencatatan. Sehingga dengan adanya arus kas atau laporan dalam keluarga ini diharapkan bisa kita membuat keputusan terkait dengan penambahan pinjaman pihak ketiga atau perbankan.

## **MERENCANAKAN DANA HARI TUA**

Tidak seterusnya kondisi tubuh bekerja keras guna mencakup semua kebutuhan hidup, karena kondisi tubuh yang mungkin tidak bisa lagi diwajibkan kita untuk bekerja secara tidak minimal. Masalah ini dapat mengakibatkan pada situasi keuangan, yang mana antara penerimaan dan biaya keluar menjadi tidak sama, karena saat pengeluaran bertambah lantaran harus melaksanakan semua keperluan harian *plus* kebutuhan ekstra di hari tua (seperti *diapers* dan obat-obatan yang harganya terus meningkat), namun penerimaan dana malah semakin surut.

Lalu apa yang harus kita lakukan pada waktu kita sudah mulai mendekati masa usia tua? Atau mungkin kiat sudah memantau bagaimana orang-orang di lingkungan kita pada saat melaksanakan

usia pensiunnya. Sebagian besar orang pasti mengharapkan bahwa hari tuanya happy, bersyukur apa yang kita dapat berupa penerimaan seumur hidup untuk memelihara kesejahteraan diri sendiri dan keluarga tanpa menjadi beban kita kepada anak cucu dan orang lain. Langkah terbaik untuk memberikan jaminan itu semua agar tujuan hari tua kita tercapai adalah kita harus memulai dengan buat perencanaan keuangan masa pensiun dari sekarang, salah satunya dengan persiapan dana pensiun.

Ada beberapa sumber penghasilan yang membantu kita dalam merencanakan dana untuk hari tua kita, diantaranya:

1. Jaminan Hari Tua ( JHT)

Program ini jaminan hari tua yang dikelola oleh pemerintah yang dibawah naungan dari BPJS ketenagakerjaan adalah tabungan bagi para pekerja yang diatur oleh pemerintah. Penerimaan kotor kita akan disisihkan dengan jumlah 5,7% iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja (3.7%) dan kita sendiri (2%). Saldo JHT akan dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan dan akan diberikan manfaatnya dalam bentuk bagi hasil setiap tahunnya dengan disesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku pada tahun berjalan tersebut.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Program investasi untuk masa pensiun bisa memakai produk dari dana lembaga keuangan atau DPLK. Program ini digunakan untuk pegawai sebuah organisasi atau perusahaan.

3. Penghasilan dari Aset Investasi

Apakah kita sudah memiliki JHT atau DPLK? Jika sudah, kita termasuk orang yang selangkah lebih maju untuk mencapai pensiun yang nyaman. Namun dengan tingginya gaya hidup yang sudah dinikmati saat ini, dana yang disiapkan bisa tidak cukup. Sehingga, kita wajib membuah alur dana pensiun sendiri dengan langkah mengakumulasi aset aset investasi. Aset ini suatu saat akan menjadi aset produktif, yang bisa mampu memberikan penghasilan pasif bagi kita dihari tua. Berapa banyak jam yan harus kita berikan untuk diri sendiri tergantung dari seberapa kita kuat untuk

mencapai impian dalam rangka mewujudkan impian hari tua yang nyaman. Sebagai gambaran kita sebaiknya menyisihkan antara 10% - 15% dari penghasilan setahun untuk dana pensiun

Tabel 12 macam orang dalam megembangkan dana hari tua.

Mimpi kita	Apa yang harus dilakukan	Pilihan Anda
Tetep kaya	Sisihkan setidaknya 20% dari penghasilan	
Kaya	Sisihkan 10% - 20% dari penghasilan	
kelas menengah	sisihkan 5% - 10% dari Penghasilan	
Miskin	Berencana untuk menyisihkan penghasilan tapi NO ACTION	
Bangkrut	tidak perlu menyisihkan penghasilan bahkan masih harus berhutang untuk membayar biaya hidup	

Tabel 12 menjelaskan bagaimana dengan macam macam karakter ekonomi dalam menyisihkan untuk kebutuhan hari tua yang anggap kadang kurang penting. Tetep kaya akan alokasikan dana sebesar 20% dari penghasilan misalkan gaji per bulan Rp.10 Juta maka alokasi pensiun sebsar Rp.300Rb. Yang berikutnya kategori kaya maka akan alokasi dana hari tua maksimal nilainya Rp.200rb sehingga sisanya bisa digunakan untuk pengeluaran dan vitamin. Untuk kelas menengah mereka kan menyisihkan penghasilannya sebesar 10% yaitu sebesar Rp.100rb dengan nilai penghasilan Rp.10 Juta. Berikutnya miskin dalam kategori ini hanya menyisihkan tanpa ada batas maksimal. Dan yang terakhir bangkrut dimana tidak sama sekali wajib untuk menyisihkan hari tua.



## AKUNTANSI KESEHATAN

Untuk memberikan pelaporan berkaitan dengan keuangan untuk manajemen, mendeskripsikan bahwa sangat bermanfaatnya akuntansi dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Implementasi praktek akuntansi yang baik untuk meningkatkan berbagai hal, termasuk dapat tidak menambahkan atau menghapuskan ketidakefisienan, kendala, dan pemborosan yang sering kita jumpai dalam fasilitas/ruang perawatan medis. Untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi, sangat diperlukan fasilitas prosedur dan praktik akuntansi yang memungkinkan penyajian laporan terkait keuangan menjadi valid. Hal ini terkait dengan peran informasi akuntansi dalam mendukung manajemen dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran.

### ***REVENUE CYCLE MANAGEMENT (RCM) DAN MASALAH DALAM AKUNTANSI***

Menurut Infinger (2017) manajemen siklus pendapatan (*Revenue Cycle Management/RCM*) dalam layanan kesehatan berfungsi mengelola pembayaran atas pelayanan medis yang telah diberikan, pemrosesan klaim, dan pendapatan yang dihasilkan secara umum. Pengelolaan siklus pendapatan pasien secara efektif untuk fasilitas medis memerlukan penggunaan perangkat lunak penagihan medis khusus, untuk secara akurat mengawasi pemrosesan klaim. Faktanya, siklus pendapatan dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa prosedur akuntansi dasar, seperti mengumpulkan

pembayaran, menentukan kelayakan, memastikan pengkodean dilakukan secara akurat, melacak klaim, dan menindaklanjuti klaim yang ditolak.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jika staf akuntansi gagal memastikan pasien membayar tagihannya, atau gagal membuat laporan lebih akurat mengenai perusahaan asuransi yang membayar tagihan tersebut, maka pelunasan tagihan, tanggung jawab penggajian, dll akan terganggu. Masih mengacu pada pendapat Infinger (2017), di luar persoalan tagihan pasien yang tidak terbayar, masalah juga dapat dipicu dari faktor staf akuntansi. hal ini dapat terjadi apabila :

1. *Accounting staff hasn't been properly educated or trained in proper accounting procedures/processes*

Optimalisasi RCM dapat dibandingkan dengan supply chain. Kegagalan satu staf administrasi dalam melakukan tugasnya dapat memengaruhi seluruh rantai/supply chain. Tidak melakukan pengkodean dengan benar, entri data yang tidak akurat, atau gagal melakukan tugas tertentu yang dapat secara negatif mempengaruhi laporan yang disajikan.

2. *Poor staff-to-staff communication*

Meskipun sibuk dalam melakukan banyak tugas, staf dapat memperoleh masalah apabila meremehkan peran mereka dalam proses akuntansi. Dokter dan manajer tidak dapat hanya berasumsi bahwa mereka melakukan pekerjaannya sendiri, begitu juga sebaliknya. Pertemuan rutin perlu dilakukan sehingga laporan keuangan dapat ditinjau mengenai keakuratannya dalam penagihan, pendapatan, dan piutang.

3. *Improper Workflow*

Para staf akuntansi yang telah dilatih dengan benar harus dapat memastikan kelayakan pasien, status asuransi, dan jumlah pembayaran yang seharusnya. Membandingkan slip biaya dengan biaya yang hilang (jika ada) juga diperlukan. Jika tidak ada alur kerja yang baik, langkah-langkah dalam proses RCM dapat dilewatkan, tugas-tugas mungkin dilupakan, dan jumlah kesalahan dapat meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan yang menimbulkan biaya.

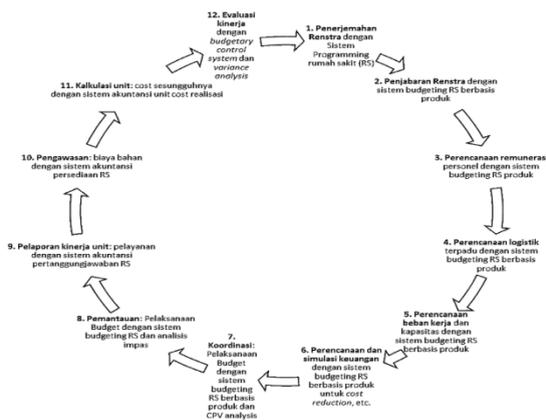
## MENGAPA AKUNTANSI DALAM PELAYANAN KESEHATAN MENJADI PENTING?

Selain kendala/masalah yang telah disebutkan, terdapat hal yang tidak dapat diabaikan. Menurut Infinger, sekitar 26% dari klaim yang diajukan secara cepat dan akurat juga ditolak dengan cepat. Dan sekitar 40% dari klaim yang ditolak tersebut, untuk beberapa alasan tidak pernah diajukan kembali. Hal ini menimbulkan kerugian substansial dari pendapatan fasilitas layanan kesehatan.

Praktik akuntansi yang buruk tidak selalu menyebabkan kebangkrutan, namun akan mempengaruhi berbagai proses. Seluruh operasi yang berkaitan dengan akuntansi harus ditinjau dan diperiksa ulang demi akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi. Setidaknya, pastikan bahwa setiap SDM mengerti betapa pentingnya akuntansi yang dikelola dengan baik untuk kelangsungan hidup seluruh organisasi.

Manajemen keuangan Rumah Sakit

Pengelolaan keuangan di rumah sakit terdiri dari empat siklus yaitu perencanaan keuangan (*planning*), organisasi sumber daya untuk pengelolaan (*organizing*), pelaksanaan atau implementasi rencana keuangan (*actuating*), dan pengawasan rencana keuangan (*controlling*)



Gambar 15 Siklus keuangan Rumah Sakit Setyawan, J. (2020). *Urgent Priciple Shift of Healthcare (Hospital) Accounting* (Materi Webinar)

### 1. Perencanaan Keuangan (*Planning*)

Siklus perencanaan dan penganggaran keuangan memainkan peran penting dalam fungsi keuangan setiap layanan kesehatan. Perencanaan mencakup keseluruhan proses persiapan keuangan dimasa data dan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi kesehatan tersebut. Perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1). Rencana strategis yang berisi aktivitas membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan perusahaan yang biasanya untuk kurun waktu 5 – 10 tahun; dan (2). Rencana operasional yang disusun untuk melaksanakan aktivitas jangka pendek terkait pengelolaan harian perusahaan (Warren, et.al., 2018)

### 2. Pengorganisasian Rencana Keuangan (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan sebuah fungsi manajemen yang berkolaborasi dengan pemberdayaan struktur organisasi dan alokasi sumber daya manusia guna meyakinkan pencapaian rencana keuangan yang telah disusun. Struktur organisasi memperlihatkan kerangka kerja dan koordinasi. Pengorganisasian juga melibatkan pembagian dan desain tugas individu dalam organisasi. Desain organisasi sangat penting dan harus disusun secara detail bagaimana tugas dan tanggungjawab setiap individu serta metode pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap individu serta metode pelaksanaan tugas tersebut.

### 3. Implementasi Rencana Keuangan (*Actuating*)

Siklus pelaksanaan (*actuating*) merupakan bagian dari manajemen keuangan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan setiap hari. Setelah suatu organisasi kesehatan melakukan perencanaan keuangan, pengorganisasian tanggung jawab dan tugas kepada para pengelola keuangan, langkah penting yang harus dilakukan adalah memberikan arahan dan motivasi supaya setiap bagian perusahaan mampu mencapai tujuan keuangan yang telah dilaksanakan. Secara spesifikasi, siklus ini menyangkut aspek personalia dari pengelolaan organisasi kesehatan yang berkaitan secara langsung guna memberikan

pengaruh, memberikan bimbingan, memberikan pengawasan, motivasi tingkat bawah guna pencapaian visi dan misi organisasi.

Fungsi *actuating* dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, yaitu:

- a. Supervisi merupakan fungsi dengan para pengelola keuangan yang mengawasi pekerjaan staf keuangan. Supervisi juga menyangkut pemberian arahan kepada para pegawai keuangan.
  - b. Motivasi yang artinya memberikan inspirasi guna stimulasi, atau memberikan dorongan kepada staf keuangan agar semangat dalam bekerja. Insentif positif, negative, moneter, non-moneter sehingga digunakan untuk meningkatkan motivasi staf keuangan.
  - c. Kepemimpinan merupakan proses dengan manager keuangan yang membimbing dan mempengaruhi pekerjaan staf keuangan ke arah yang diinginkan.
  - d. Komunikasi ditandai dengan aktivitas penyampaian berita atau informasi, pengalaman, memberikan *argument* dari satu orang ke orang lain sehingga terjadi tranfer pengetahuan.
4. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Aspek pengendalian dalam manajemen keuangan bertujuan untuk memverifikasi apakah semua aktivitas manajemen keuangan dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga, aspek pengendalian juga mengevaluasi apakah alokasi sumber daya organisasi telah ditempatkan secara efisiensi dan efektivitas guna menggapai mencapai tujuan yang telah dibuat sesuai dengan rencana jangka panjang. Dalam siklus ini perlu dilakukan dokumentasi pengukuran penyimpangan kinerja actual dari kinerja standar yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini tidak kalah penting karena penyebab penyimpangan tersebut dapat ditemukan sehingga hal tersebut dapat membantu pengambilan tindakan korektif sehingga masukan dalam penyusunan rencana keuangan pada siklus berikutnya.

## Pengertian Penganggaran dan Anggaran Kesehatan.

Pengertian secara luas anggaran bisa disebut sebagai *planning* keuangan yang memberikan pilihan keputusan bagi perusahaan untuk suatu waktu masa yang akan datang dipaparkan berupa angka-angka. Daripada itu, anggaran (budget) dapat diartikan sebagai hasil perencanaan yang berhubungan dengan macam macam aktivitas secara keseluruhan yang disajikan dalam bentuk anggaran satuan uang dalam masa waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Dan dapat diartikan bahwa anggaran adalah sederet daftar atau pernyataan - pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tujuan dalam masa waktu tertentu.

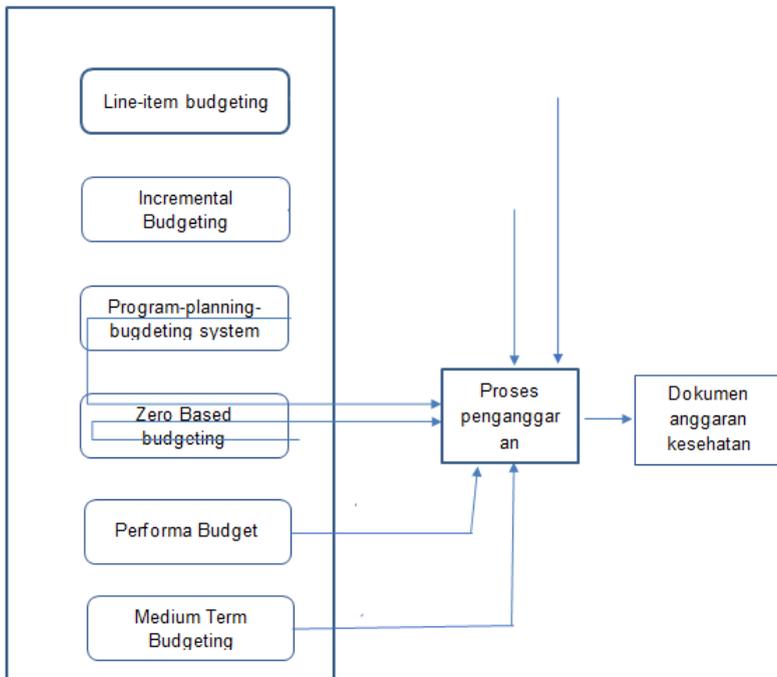
Anggaran secara umum mengarahkan kepada susunan semua biaya keluar yang telah dibuatkan. Sebuah anggaran untuk diri sendiri memberikan cara agar mengatur biaya yang akan dikeluarkan dan membuatkan bagaimana kita akan membelanjakan pendapatan yang telah diterima untuk kehidupan kita yang akan datang. Sebuah anggaran merupakan susunan dari semua biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang telah dibuatkan rencana sebelumnya. Ini merupakan rencana bagaimana kita agar menyimpan dana yang kita miliki, meminjam dana yang ada pada kita, dan mengatur belanjakan dana. Anggaran merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi mikro yang memakai metode dengan garis anggaran dengan mendeskripsikan bagaimana saling beradaptasi antara dua atau lebih barang. Anggaran kesehatan adalah semua anggaran yang berkaitan langsung guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara umum dan semua hal yang menopang bagi kesehatan. Semua kebutuhan terkait anggaran kesehatan dalam organisasi kesehatan ini dipergunakan untuk mendanai setiap peristiwa.

Karakteristik anggaran kesehatan terdiri atas hal berikut:

1. Anggaran kesehatan dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran kesehatan umumnya jangka waktu tertentu: satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran kesehatan berisi komitmen dan kesanggupan manajemen
4. Usulan anggaran kesehatan ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran kesehatan hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Sistem Penganggaran Kesehatan dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 16 Sistem Penganggaran Kesehatan

Pada umumnya, distribusi barang dan jasa dalam suatu masyarakat bisa dilaksanakan kurang lebih menggunakan dua mekanisme yaitu mekanisme pasar (*market mechanism*) dan mekanisme birokrasi (*Bureaucratic mechanism*). Dengan berbagai situasi yang diwajibkan, prosedur pasar dianggap sebagai prosedur yang dapat menunjang penggunaan sumber daya yang efisiensi dan efektif ( Musgrave & Musgrave, 1984), (Brown dan Jakson, 1987),

(UPP UT, 2020). Berkelanjutansistem anggaran kesehatan terjadi sejajar dengan usaha dalam pendistribusian sumber daya kesehatan dengan berjalannya waktu semakin membaik dalam memfasilitasi hamper sebagian besar prinsip penganggaran kesehatan. Sistem penganggaran telah semakin maju sesuai keberhasilan dalam kualitas yang lebih baik. Berikut ini merupakan jenis anggaran kesehatan yang dianggap penting untuk kita ketahui.

1. *Line Item Budgeting*

*Line item budgeting* diartikan sebagai pengaturan anggaran yang didasarkan kepada dan dari asal usul keuangan tersebut berasal (pos-pos penerimaan) serta untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini *relative* dianggap paling lama dan banyak terdapat kendala hambatan atau sering pula disebut *traditional budgeting*. Meskipun tidak bisa dibantahkan bahwa *line item budgeting* sangat terkenal penggunaanya karena menganggap lebih gampang untuk dilaksanakan dibandingkan dengan metode yang lain( Wildavsky, 2000), ( UPP UT, 2020)

Tabel 13 Contoh Format Anggaran Line Item

Anggaran Pemerintah Daerah					
Pengeluaran					
	Rutin:				
		1. Belanja Pegawai	xxx		
		2. Belanja Barang	xxx		
		3. Belanja Pemeliharaan	xxx		
		4. Belanja Perjalanan Dinas	xxx		
		5. Pengeluaran tak disangka	xxx		
				xxx	
	Pembangunan				
		1. Bidang Ekonomi	xxx		
		2. Bidang Sosial	xxx		
		3. Bidang Umum	xxx		
		4. Subsidi Pembangunan kepada daerah bawahan	xxx		
		5. Pembayaran kembali Pinjaman	xxx		

				xxx	
Penerimaan					
	Rutin:				
		1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu			
		2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi			
		3. Pendapatan Asli Daerah sendiri			
		- Pajak Daerah	xxx		
		- Restribusi Daerah	xxx		
		- Bagian Laba dari BUMD	xxx		
				xxx	
Penerimaan					
		4. Pinjaman		xxx	
					xxx
	Pembangunan				
		1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu		xxx	
		2. Pendapatan berasal dari pemerintah dan instansi lebih tinggi		xxx	
		3. Pendapatan asli daerah sendiri		xxx	
					xxx
					XX
					XX

## 2. Incremental Budgeting

*Incremental budgeting* merupakan metode anggaran belanja dan pendapatan yang sangat mungkin untuk perbaiki kembali selama tahun berjalan sekaligus sebagai pokok penentuan pendapatan anggaran waktu tahun berikutnya. Angka di pos pengeluaran kesehatan merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Masalah yang harus diberikan keputusan secara

bersama yaitu sistem kenaikan atau penurunan (incremental) dari menggunakan angka anggaran kesehatan tahun sebelumnya. Logika metode anggaran ini merupakan semua aktivitas yang dilakukan adalah berkelanjutan aktivitas dari tahun sebelumnya.

### 3. Program *Planning Budgeting System* (PPBS)

Sebagai akibat dari berbagai munculnya masalah fundamental yang dihadapi line item *budgeting*, sistem penganggaran baru muncul antara lain adalah *planning, programming, budgeting system* (PBBS), *zero based budgeting* (ZBB), dan *performace budgeting*. *Planning programming budgeting system* merupakan suatu tindakan berkelanjutan dari merencanakan, membuat program, dan menganggarkan terhubung dengan sebuah sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat pisah. Dan intinya terkadang identifikasi apa yang menjadi tujuan organisasi dan masalah yang sering dihadapi dalam kita melakukan proses organisasi, koordinasi, dan memberikan pengawas terhadap semua aktivitas yang dibutuhkan dan guna menerapkan mengambil keputusan terhadap berbagai macam aktivitas di masa depan.

### 4. *Zero Based Budgeting* (ZBB)

Munculnya ZBB adaah solusi untuk melogika proses penyusunan anggaran. Dalam sistem ZBB, tumbul yang diartikan sebagai unit keputusan (decision units). Decision unit mendapatkan berbagai cara alternatif anggaran yang dibentuk guna motivasi anggaran organisasi yang lebih responsive terhadap keperluan masyarakat dan terhadap naik turunnya jumlah anggaran. Dalam praktiknya ZBB memerlukan banyak kertas kerja (paper work), data, dan menuntut implementasi sistem manajemen data yang cukup baik dan itu semua dianggap sebagai kendala utama penerapan ZBB.

Monev Banteng 2				
Laporan Perbandingan Anggaran dan Realisasi				
Bulan April 2010				
Kerangka		Anggaran	Realisasi	Presentasi
Anggaran Pendapatan		Rp.50.000.000,-	Rp.50.000.000,-	100%
Anggaran Pengeluaran				
Jenis Kegiatan Pendidikan				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentasi
1	Alat Tulis Kantor	Rp.1.000.000,-	Rp.750.000,-	75%
2	Cetak Seal	Rp.250.000,-	Rp.500.000,-	87%
Total Anggaran Alat Tulis Kantor		Rp.1.250.000,-	Rp.1.250.000,-	71%
Jenis Kegiatan Sarana dan Prasarana				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentasi
1	Seban Air	Rp.1.000.000,-	Rp.700.000,-	70%
2	Seban Listrik	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	100%
3	Seban Telepon dan Internet	Rp.1.250.000,-	Rp.1.150.000,-	92%
Total Anggaran Sarana dan Prasarana		Rp.3.750.000,-	Rp.3.350.000,-	89%
Jenis Kegiatan Pendidikan				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentasi
1	Gaji Tenaga Pengajar Tingkat I	Rp.7.500.000,-	Rp.7.500.000,-	100%
2	Gaji Tenaga Pengajar Tingkat II	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	100%
3	Gaji Admin & Finance	Rp.7.000.000,-	Rp.7.000.000,-	100%
4	Gaji Diri dan Penjaga Malam	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	100%
5	Gaji Manajer	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	100%
Total Anggaran Pendidikan		Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-	100%
Total Anggaran Pengeluaran		Rp.41.000.000,-	Rp.40.000.000,-	98%

Gambar 17 Laporan perbandingan anggaran dan realisasi

## 5. *Performace budgeting*

*Performance budgeting* merupakan cara anggaran yang berfokus pada hasil lembaga serta berhubungan sangat penting dengan visi, misi dan rencana strategis lembaga. Di sektor kesehatan, *performance budgeting* merupakan alokasi sumber daya pada program kesehatan, bukan unit lembaga kesehatan saja dan menggunakan output measurement sebagai yang menjadi acuan kinerja organisasi kesehatan. Lebih jauh, pengaitan biaya dengan output organisasi kesehatan adalah bagian integral dalam data yang digunakan dalam anggaran. Sehingga *performace budgeting* kesehatan merupakan cara penyusunan anggaran kesehatan

berdasarkan bahan pertimbangan sehingga beban kerja dan biaya unit dari setiap kegiatan pembangunan kesehatan yang menggunakan struktur yang baik.

Program/ Uraian	Indikator Kinerja	Output	Rencana Tingkat Capaian / tahun	Volume	Satuan (Rp)	Rencana (Rp jutaan)	Realisasi (Rp jutaan)
Pemeriksaan Ibu hamil	Kesehatan bumil terkontrol dengan frekuensi minimal 12 kali	15.000 x 12	100% bumil terkontrol 10 kali	150.000 x 10	150.000	27.000	22.500
Senam Ibu hamil	Semua bumil mengikuti senam hamil	15.000	75 % bumil melakukan senam hamil	11.250	250.000	3.750	2.812,5
Seminar ibu Hamil	Semua ibu hamil ikut seminar	15.000	80% diikuti bumil	12.000	1.000.000	15.000	12.000
Operasi Persalinan	Maksimal 5 % bumil resiko tinggi yang dioperasi (zero BBLR)	450	Maksimal 5 % dari ibu hamil	750	10.000.000	4.500	7.500
Persalinan normal	97% Bumill persalinan normal (Zero BBLR)	14.550	95% bumil persalinan normal	14.250	3.000.000	43.650	42.750
Perawatan Persalinan	Semua bumil rawat inap pasca persalinan	15.000	100% bumil rawat inap pasca persalinan	15.000	1.000.000	15.000	15.000

Gambar 18 Contoh dari *Budgeting* berdasarkan *performance* atau kinerja

## STRUKTUR TRANSAKSI RUMAH SAKIT



Gambar 19 Struktur Transaksi Rumah Sakit

Setelah terjadi peristiwa ekonomi atau transaksi maka selanjutnya akan mengarah ke:

### 1. Siklus Pendapatan

Memberikan jasa terbaik untuk pasien di rumah sakit kepada pasien atau pihak ketiga dan menerima pembayaran dari pasien

atau yang harus dibayarkan oleh pihak ke 3. Baik tagihan dari asuransi pemerintah maupun swasta. Transaksi tersebut akan ditulis pada siklus pendapatan. Dan juga fungsi apa saja yang berkaitan dengan siklus ini.

## 2. Siklus Pengeluaran

Menyediakan barang dan/atau jasa dari pihak ketiga dan dalam melunasi kewajiban dan kewajibannya. Dan beberapa tagihan dari biaya Fix Cost misalkan biaya listrik, biaya perawatan, biaya telpon dan biaya yang setiap bulan rumah sakit keluarkan. Dan berkaitan pula dengan fungsi fungsi yang ada pada siklus pengeluaran.

## 3. Siklus Pelayanan

Ada yang perlu dirubah didalam sumber daya rumah sakit menjadi jasa layanan rumah sakit. Dalam bagan alur ini rumah sakit harus memberikan SOP yang jelas untuk pasien atau pihak ke 3 yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit.

## 4. Siklus Keuangan

Mendapatkan dana modal (*capital fund*), contohnya modal kerja yang berasal dari dana kas atau dana yang mudah dicairkan dalam bentuk kas lainnya dan sumber dana yang memiliki masa yang lama. Perolehan dana ini dapat dari pihak ke 3 baik investor dan perbankan. Dan dalam siklus ini juga akan berkaitan erat dengan perpajakan.

Setelah melalui keempat bagan tersebut, maka akan masuk ke dalam bagan laporan keuangan yang tidak berkaitan dengan keempat bagan operasional sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya.

Bagan dalam melaporkan keuangan mendapat data yang digunakan dalam kegiatan sehari hari dan akuntansi yang berasal dari bagan lain dan memproses data tersebut menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya.

Laporan keuangan tersebut pada akhirnya dipergunakan oleh pemakai luar sebagai contoh masyarakat, pemerintah dan donatur,

maupun pengguna dalam perusahaan seperti manajemen perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

## **SIKLUS AKUNTANSI RUMAH SAKIT BESERTA CONTOHNYA**

Kita sudah mengetahui bagan transaksi di rumah sakit, maka berikutnya akan dijabarkan tentang bagan yang digunakan dalam akuntansi rumah sakit. Setelah memperoleh transaksi, maka kegiatan kegiatan tersebut akan diproses pada bagan berikut ini.

### 1. Jurnal

Memberikan catatan untuk setiap transaksi ekonomi yang terjadi di rumah sakit. Jurnal berisikan tentang:

- a. Tanggal terjadinya sebuah transaksi
- b. Nama akun dan jumlahnya yang harus didebet dan dikredit
- c. Keterangan atas transaksi
- d. Pencatatan debet dicatat di sisi kanan dan pencatatan kredit di sisi kiri.

### Contoh Jurnal Akuntansi Rumah Sakit

Tanggal 5 Juni 2020, terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar Rp Rp1.033.333.

Tanggal 7 Juni 2020, dicatat pendapatan dari pasien umum. Berdasarkan formulir kuitansi yang diperoleh dari kasir, maka rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp20.000, biaya pemeriksaan dan tindakan Rp50.555 dan biaya obat Rp70.000

Maka pencatatan sebagai berikut:

Tabel 14 Contoh Jurnal Akuntansi Rumah Sakit

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
5 Juni 2020	Farmasi Kas		Rp.1,033,333	Rp.1,033,333
7 Juni 2020	Kas Pend.Pendaftaran Pend.Obat Pend. Pemks &Tind		Rp.140,555	Rp.20,000 Rp.60,000 Rp.50,555

## 2. Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) merupakan akun yang digunakan secara individu yang diperoleh dalam laporan keuangan. Setiap buku besar punya kode akun yang sesuai dengan yang diuraikan di laporan keuangan. Buku besar juga mencatat perubahan saldo setiap rekening individual. Jadi, terjadi pemindahan akun yang dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

- Pertama kita masukan kedalam jurnal tanggal posting, penambahan yang berada pada sisi debet dan yang masuk kedalam dikredit di dalam jurnal dan ke dalam kolom-kolom yang telah ditentukan di dalam buku besar.
- Di dalam kolom referensi pada jurnal, masukkan nomor akun buku besar.

Contoh Buku Besar Akuntansi Rumah Sakit

Tabel 15 Contoh Buku Besar Akuntansi Rumah Sakit

### Buku Besar Kas

#### Saldo kas Rumah sakit dan modal sebesar Rp.20,000,000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
Saldo					Rp.20,000,000
5 juni 2020	Farmasi			Rp.1,000,000	Rp.19,000,000
7 Juni 2020	Pemeriksaan		Rp.140,000		Rp.19,140,000

### Buku Besar Modal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
Saldo					Rp.20,000,000

### Buku Besar Pend.Obat

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
7 Juni 2020				Rp.70,000	Rp.70,000

### Buku Besar Pend.Pemeriksaan & Tindakan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
7 Juni 2020				Rp.50,000	Rp.50,000

### Buku Besar Pend.Pendaftaran

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
7 Juni 2020				Rp.40,000	Rp.40,000

## Buku Besar Farmasi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
7 Juni 2020			Rp.1,000,000		Rp.1,000,000

### 3. Neraca Saldo

Untuk menyusun sebuah neraca saldo berpacu pada saldo akhir yang berada ke dalam setiap transaksi individual atau buku besar. Dalam kta menyusun dilaksanakan pada akhir periode ketika akan mengerjakan laporan keuangan.

Contoh Neraca Saldo dalam Akuntansi Rumah Sakit

Tabel 16 Contoh Neraca Saldo dalam Akuntansi Rumah Sakit

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kas		Rp.19,140,000	
Modal			Rp.20,000,000
Pend.Obat			Rp.70,000
Pend.Pemeriksaan & Tindakan			Rp.50,000
Pend.Pendaftaran			Rp.20,000
Farmasi		Rp.1,000,000	
		Rp.20,140,000	Rp.20,140,000

### 4. Jurnal Penyesuaian

Membuat jurnal penyesuaian ada tujuan guna memberikan dalam menyesuaikan apa yang kita tulis dalam akun atau rekening pada akhir masa akuntansi rumah sakit. Hal ini dilaksanakan karena hal-hal seperti:

- a. Transaksi tidak dimungkinkan untuk dicatat secara harian dengan alasan efisiensi.
- b. Beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu, karena biaya yang dimaksud terkait dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari.
- c. Transaksi tidak dicatat dikarenakan alasan lain

Dalam membuat Jurnal penyesuaian digunakan menjadi *deferrals* dan *accrual*. *Deferrals* terdiri atas *prepaid expenses* yang berarti beban/biaya yang harus dibayar dengan menggunakan pembayaran secara tunai dan ditulis sebagai harta yang belum pernah dipakai atau digunakan atau dikonsumsi dan *unearned revenue* yang berarti kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang (kewajiban) sebelum pendapatan diperoleh.

Sementara *accrual* terbagi atas *accrued revenues* yang adalah sebuah pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilaksanakan penulisan dan *accrual expenses* yang merupakan beban telah dilakukan tetapi kas belum ada pembayaran atau belum dilaksanakan penulisan.

Contoh Jurnal Penyesuaian

a. *Prepaid Expense*

Tanggal 5 Mei 2020 membayar polis asuransi sebesar Rp1.000.00, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2021. Jurnalnya sebagai berikut:

Biaya Asuransi XXXX

Asuransi dibayar Dimuka XXX

b. *Unearned Revenue*

Tanggal 5 Mei 2020 rumah sakit menerima dan jamkesmas sebesar Rp2.123.000 dan tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan analisis yang dilakukan, pendapatan terealisasi sebesar Rp1.000.456 5 Mei Piutang Asuransi Rp.2,123,00

Pendapatan Rp.2,123,000

31 Mei Kas Rp.1,000,456

Piutang Asuransi Rp.1,000,456

Kemudian, bagan akuntansi akan dilanjutkan dengan menggunakan sebuah kertas kerja (*worksheet*) yang sebagai sarana untuk seorang akutan menciptakan laporan neraca saldo, membuat penyesuaian, mengelompokkan aktivitas ke dalam neraca, dan kemudian kita mulai dengan menyusun laporan keuangan. Setelah semua dibuat dengan sempurna, kita mulai melanjutkan ke jurnal penutup yang berfungsi

untuk menutup akun temporer atau sementara dan memutasikan ke dalam akun yang terjadi surplus ke akun permanen atau tetap ke dalam neraca. Kemudian ada yang disebut dengan jurnal pembalik yang menjadi pilihan karena bisa dilaksanakan ataupun tidak, namun jurnal pembalik mempermudah kita ke dalam proses akuntansi rumah sakit di masa yang akan datang.



## ASSET BERSEJARAH

### PENGERTIAN ASSET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)

**D**i dalam bidang Akuntansi terdapat suatu perlakuan terhadap Aset tetap yang memiliki nilai sejarah. Perlakuan terhadap aset tetap yang memiliki nilai sejarah menjadi isu yang sedang di perbincangkan di dunia akuntansi. Hal ini berkenaan dengan pengungkapan dan perlakuan aset yang menjadi peninggalan sejarah. Pengungkapan dan Perlakuan di dalam akuntansi Aset Bersejarah saat ini di Atur di Dalam PSAP No 7 Tahun 2010. Di dalam PSAP No 7 Tahun 2010 di katakan Bahwa:

“Beberapa properti, pabrik dan peralatan ditetapkan menjadi aset bersejarah karena signifikansi nilai budaya dan sejarah serta lingkungannya. Berbagai bukti dari aset bersejarah adalah monumen, bangunan bersejarah, reruntuhan seperti candi dan karya seni.”

Akuntansi aset bersejarah (warisan) masih menjadi topik perdebatan hangat di kalangan profesional. Bahkan, beberapa standar telah ditetapkan sebagai hasil diskusi para ahli sebelumnya. Standar ini mengatur berbagai aspek yang dapat dievaluasi oleh pihak akuntansi yang berbeda. Harta bersejarah disebut harta yang sangat istimewa karena dapat diperoleh dengan berbagai cara, tidak hanya melalui pembangunan, tetapi juga melalui pembelian, hadiah, warisan, penjarahan, dan perampasan. Sebagai contoh banyak bangunan zaman peninggalan sejarah Indonesia yang masih kokoh berdiri, bangunan

bangunan ini oleh pemerintah sebagian masih di manfaatkan untuk menjalankan operassional Pemerintahan. Untuk tujuan akuntansi, penilaian aset tetap termasuk bangunan bersejarah yang dibangun puluhan tahun hingga ratusan tahun yang lalu dan masih berdiri hingga saat ini, sekaligus memberikan dasar yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan aset tetap pemerintah. Ada banyak definisi yang menggambarkan properti bersejarah karena kriteria yang digunakan untuk menentukan definisi ini berbeda. IPSAS (Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional) 17 (dalam Aversano dan Ferrone, 2012) standar yang mengatur aset tetap, dll.)

Meskipun ada kemungkin tidak memperlakukan aset sejarah dengan cara yang sama, kita dapat mengnentuan tujuan yang sama dalam pelestarian warisan leluhur kita. Pengertian benda bersejarah adalah:

1. Webster's New 20th Century Dictionary (1983) mendefinisikan istilah warisan sebagai:“Karakteristik, budaya, tradisi, dll yang diwarisi dari nenek moyang dan masa lalu...”
2. Pernyataan Kebijakan ASB mendefinisikan aset sebagai:“Hak atau akses lain untuk kepentingan ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu”
3. Menurut Persyaratan dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan (2003), APS No.3 :Penilaian Aktiva Tetap (2004) danf. APS No.5 Aset Warisan atau Aset Budaya, telah diterbitkan di negara Australia, adalah asset sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut yaitu keunikan budaya, sejarah, geografis, pengetahuan dan/atau sumber daya yang ingin dilindungi oleh Pemerintah tanpa batas waktu, atau aset dengan karakteristik lingkungan.

Standard-standard diatas menyatakan pemerintah tidak diharuskan untuk memasukkan asset bersejarah ataupun budaya dalam laporan neraca mereka, tetapi asset tersebut tetap harus disajikan dalam Laporan CALK. Ditetapkan sebagai monumen yang memiliki nilai sejarah karena merupakan kepentingan umum dari sudut pandang budaya, lingkungan dan sejarah. Misalnya, bangunan yang memiliki

nilia sejarah, situs kuno seperti bangunan candi dan karya seni serta monumen. Berdasarkan beberapa pengertian benda bersejarah di atas, maka benda bersejarah dapat didefinisikan sebagai: Mereka percaya bahwa bangunan bersejarah harus menjadi bagian dari aset nasional yang berharga yang tidak merugikan dan digunakan untuk pelayanan publik atau kepentingan masyarakat kecuali digunakan. Hal ini dalam produksi. Aset sejarah memainkan peran penting dalam perkembangan budaya suatu negara.

### **KARAKTERISTIK ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)**

Di dalam Pernyataan Sandar Akuntansi Pemerintah No 07 Tahun 2010 di katakan bahwa yang termasuk aset bersejarah meliputi:

1. Nilai budaya, pendidikan, lingkungan serta budaya yang memiliki nilai aset bersejarah ini tidak semuanya mencerminkan nilai moneterinya.

Penentuan suatu aset di katakan sebagai aset bersejarah tentunya harus memenuhi beberapa karakteristik yang unik, karakteristik ini tentunya tidak di miliki oleh aset tetap lainnya. Hal ini lah yang menjadi pembeda aset tetap bersejarah dengan aset tetap lainnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam aset tersebut menunjukkan adanya suatu nilai yang tidak di miliki oleh aset tetap lainnya. Sebagai contoh nilai budaya, nilai budaya ini menjadi salah satu poin di dalam penentuan karakteristik aset bersejarah karena tidak semua aset tetap memiliki nilai budaya, aset tetap yang memiliki nilai budaya akan tetap di pertahankan oleh pemerintah karena nilai budaya tidak di dapat begitu saja dan perlu adanya pengakuan dari pemerintah terkaik nilai budaya dari suatu bangunan.

Indonesia adalah negara dengan jumlah suku terbanyak ke dua di dunia setelah India, dengan predikat sebagai negara dengan jumlah suku terbanyak tersebut, sudah sepatutnya banyak budaya yang berbeda di setiap daerah nya. Budaya-budaya tersebut tentunya telah memiliki usia yang panjang dan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai budaya ini pastinya Indonesia akan

melestarikan nilai-nilai budaya tersebut. Tidak hanya budaya yang bersifat tarian dan adat istiadat, tetapi juga budaya dari suatu bangunan. Nilai-nilai budaya yang terkandung dari suatu bangunan tersebut tentunya harus di jaga oleh pemerintah sebagai bentuk pelestarian kebudayaan dari suatu daerah.

2. Aturan dan undang-undang yang ada dengan tegas membatasi pelepasan untuk di jual.

Di dalam lingkup peraturan dan hukum, asset bersejarah ini di atur di dalam PSAK No. 07 Tahun 2010, kemudian di dalam aturan Pelestarian Cagar Budaya Khusus Bangunan Bersejarah di katakan bahwa terdapat 2 Jenis cagar budaya berupa Bangunan. Yang pertama adalah cagar budaya berupa bangunan yang kepemilikannya di miliki oleh orang pribadi, dan yang kedua adalah cagar budaya berupa bangunan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada pengakuan asset bersejarah sesuai dengan PSAP No 07 Tahun 2010 ini di khususkan untuk cagar budaya berupa bangunan yang di miliki oleh pemerintah sehingga jelas di atur di dalam peraturan dan hukum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Bab IV Pasal 16 Poin 4 di katakan bahwa “Cagar Budaya yang dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya”. Sehingga jelas bahwa Aset Bersejarah yang di miliki oleh negara tidak dapat diperjualbelikan.

3. Bangunan sejarah tidak dapat di gantikan oleh yang lain karena memiliki nilai yang tidak dapat di gantikan walaupun secara fisik nilai nya turun.

Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran yang disusun secara ilmiah dan lengkap tentang masa lalu manusia sebagai makhluk sosial dan lingkungannya. Sebuah cerita berisi serangkaian fakta dari waktu, dengan interpretasi dan penjelasan untuk memahami sesuatu di masa lalu. Agar sejarah tidak terulang kembali, tetapi pola sejarah akan terus berlanjut di masa depan. Bangunan-bangunan sejarah biasanya menyimpan nilai-nilai yang sangat berharga yang tidak akan terulang, namun polanya akan terbaca sehingga perlu adanya perawatan bangunan dengan baik

sehingga sejarah tersebut akan terus tercatat. Banyak bangunan bangunan bersejarah yang masih menyimpan berbagai informasi dari masalalu, sehingga Negara memiliki kewajiban untuk dapat merawat bangunan tersebut sehingga tetap dapat di nikmati oleh generasi yang akan datang. Di lihat dari fisik bangunan memang mengalami pengapukan namun nilai sejarah yang terkandung akan membuat bangunan tersebut memiliki nilai yang semakin tinggi.

4. Memiliki nilai manfaat yang panjang, sehingga dapat di manfaatkan untuk waktu yang lama, dalam beberapa kasus bisa mencapai 50 tahun.

Aset Tetap Berupa Bangunan biasa nya memiliki masa manfaat yang panjang, dalama beberapa kasus bisa mencapai puluhan tahun. Begitu pun dengan masa manfaat asset bersejarah, asset bersejarah biasanya adalah bangunan bangunan peninggalan sejarah yang memiliki masa manfaat hingga ratusan tahun. Seperti contohnya adalah bangunan peninggalan penjajahan belanda. Yang mana usia bangunan mencapai ratusan tahun dan masih di fungsikan oleh pemerintah sebagai bangunan operasional. Sehingga pengakuan untuk bangunan bersejarah akan berbeda dengan bangunan yang tidak memiliki nilai sejarah.

5. Aset bersejarah dilindungi secara sosial, ada untuk mewariskan sejarah masa lalu sebagai peninggalan kepada generasi mendatang, lebih meningkatkan daya tarik dan budaya pariwisata negara, dan membawa kemakmuran bagi negara.

Berdasarkan karakteristik di atas, dapat dikatakan bahwa asset bersejarah (heritage assets) merupakan asset yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset berwujud pemerintah lainnya. Karena aset bersejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset berwujud milik pemerintah lainnya, maka perlakuan terhadap aset bersejarah tersebut berbeda dengan aset berwujud milik pemerintah lainnya. Karena bukan hanya bangunannya saja, tetapi nilai sejarah yang dikandungnya yang membedakan properti bersejarah ini dengan yang lain. Melihat cagar budaya sebagai bangunan menurut Undang-Undang

Bangunan No. 11 Tahun 2010, cagar budaya sebagai bangunan dapat dibedakan menjadi cagar budaya milik perorangan dan cagar budaya milik pemerintah. Contoh bangunan milik swasta adalah bangunan zaman Belanda yang sudah turun temurun. Selanjutnya, bangunan cagar budaya nasional adalah bangunan cagar budaya yang ditaklukkan oleh pemerintah Indonesia dari penjajahan Belanda.

### **PENGUNGKAPAN ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)**

Tentu saja, ketika mengungkapkan aset tetap sebagai aset historis, ada ruang lingkup untuk membatasi apa yang disebut aset historis (warisan). Cakupan ini membatasi aset yang dimaksudkan untuk memiliki nilai historis. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset historis dalam laporan keuangan. Selain ketentuan PSAP No 7/2010, aset bersejarah juga tercantum dalam UU No 11/2010, namun berupa cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah cagar budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, bangunan cagar budaya, cagar budaya, cagar budaya, tanah dan/atau air. Apakah sejarah, ilmiah, pendidikan, agama atau budaya, mereka memiliki nilai penting bagi masyarakat melalui proses pengambilan keputusan dan harus dilestarikan. Dalam KBBI, pengertian cagar budaya hanya mencakup “kawasan tempat kehidupan dan penghidupan manusia dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan”.

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (BGCB) adalah kegiatan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan BGCB dengan melestarikan keberadaan dan maknanya serta menjaga keutuhan bangunan. BGCB yang dilestarikan adalah BGCB yang keberadaannya dan nilainya dipertahankan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang dinamis. Peraturan menteri ini bertujuan untuk memandu pemerintah, pemerintah provinsi dan kota dalam melaksanakan upaya konservasi BGCB untuk memastikan bahwa BGCB yang diterima memenuhi

standar teknis BGCB dan layak untuk perawatan konservasi tipe pengelolaan bangunan. Upaya pelestarian, perlindungan, dan pelestarian BGCB, nilai kebendaan, dan makna khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui upaya pelestarian BGCB dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemugaran. Perlindungan menurut Pasal 10(2) terdiri atas:

1. Penyelamatan;
2. keselamatan;
3. pemeliharaan; dan
4. restorasi.

Pembangunan menurut Pasal 10(3) terdiri atas:

1. Belajar
2. Aktivasi; dan
3. Penyesuaian.

Pemulihan Pasal 10 Ayat 4 adalah sebagai berikut. sebuah.

1. rekonstruksi;
2. integrasi;
3. rehabilitasi; dan
4. restorasi.

Pemeliharaan petunjuk teknis pelaksanaan BGCB memungkinkan untuk melindungi, melindungi dan melestarikan kelangsungan hidup dan pentingnya bangunan serta menjaga keandalan bangunan agar kerusakan, kehancuran atau pembongkaran dapat dicegah.

Menurut pasal 11(5) Undang-Undang 2010, sebuah bangunan dapat diusulkan sebagai situs warisan budaya, bangunan cagar budaya atau bangunan cagar budaya jika memenuhi kriteria berikut:

1. Berusia di atas 50 tahun.
2. Masa kekuasaan minimum adalah 50 tahun.
3. nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau budaya tertentu. dan
4. dengan nilai-nilai budaya yang memperkuat jati diri bangsa

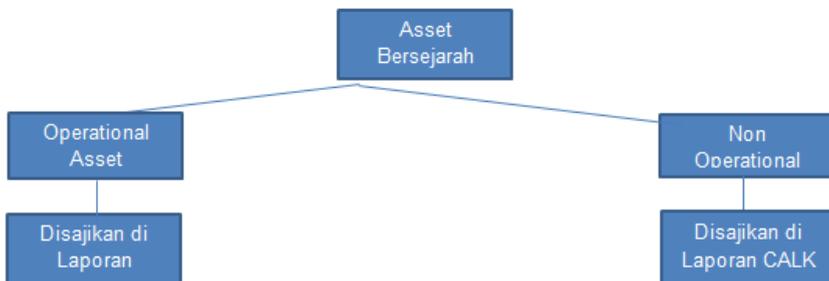
Suatu unit geospasial dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung budaya jika:

1. Berisi dua atau lebih cagar warisan yang berdekatan.
2. berupa lanskap budaya buatan
3. Berusia di atas 50 tahun.
4. Ada spesimen yang menunjukkan fungsi kamar masa lalu, minimal berusia 50 tahun.
5. Menunjukkan pengaruh manusia di masa lalu pada proses pemanfaatan ruang skala besar.
6. Memberikan bukti pembentukan lanskap budaya.
7. Menampilkan lapisan tanah terendam yang mengandung bukti aktivitas manusia dan endapan fosil

Kegiatan seperti perumahan, perumahan, kegiatan keagamaan, kegiatan bisnis, kegiatan sosial, budaya atau kegiatan khusus dapat dilakukan. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan yang status bangunan cagar budayanya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Di sisi lain, Pasal 1(5) menetapkan bahwa bangunan terdaftar adalah cagar budaya dan keberadaannya serta nilainya dipertahankan melalui upaya dinamis melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

**PERLAKUAN TERHADAP ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)**

Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010, aset historis tidak dinilai hanya dalam catatan laporan keuangan (CaLK), misalnya Bangunan Untuk kantor, prinsip-prinsip berikut berlaku untuk aset-aset ini: Prinsip yang sama seperti aset berwujud lainnya.



Gambar 20 Prinsip-prinsip Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Terdapat dua Jenis Aset Bersejarah berdasarkan Pemanfaatan dari asset tersebut. Yang pertama adalah asset bersejarah yang di gunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Aset bersejarah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai kegiatan operasional akan memberikan manfaat yang akan terus berkelanjutan, sehingga nilai manfaat yang terdapat pada asset tersebut bukan hanya memiliki nilai sejarah namun juga memiliki nilai manfaat terhadap pemerintahan. Sehingga di dalam penyajian laporan keuangan, asset bersejarah ini masuk ke dalam laporan keuangan Neraca dengan tidak menampilkan nilai dari asset tersebut.

Jenis Aset Bersejarah yang kedua adalah asset bersejarah yang tidak di fungsikan lagi sebagai bangunan untuk kegiatan operasional atau lebih di kenal non operasional asset. Asset bersejarah ini tidak di fungsikan sebagai bangunan yang di dimanfaatkan oleh pemerintah namun tetap di rawat karena memiliki nilai sejarah yang penting bagi pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.

### **PENILAIAN TERHADAP ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)**

Evaluasi adalah proses pengukuran kegiatan perolehan poin dengan menggunakan metode/teknik tertentu secara objektif dan berdasarkan data/fakta yang relevan. Aset tetap biasanya dinilai berdasarkan biaya. Nilai suatu aset tetap didasarkan pada nilai wajarnya pada tanggal perolehan ketika biaya perolehan aset tersebut tidak memiliki nilai atau dapat diidentifikasi. Bahkan, beberapa properti historis tidak hanya properti yang secara khusus terkait dengan nilai historisnya, tetapi umumnya diperoleh dengan berbagai cara, seperti sumbangan, wakaf, penjarahan, perampasan, pengembangan, dll sulit untuk dinilai. Periode Lalu Saat menilai aset historis, model penilaian berikut tersedia:

1. Penilaian warisan budaya – Menurut penerapan teknik penilaian lingkungan pada bangunan bersejarah, monumen dan artefak. penilaian aset bersejarah didasarkan pada *Willingness to Pay* (WTP) yang tidak berbasis pasar. cara ini menerapkan valuasi

ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam dan melakukan survey secara langsung agar pengukuran kesediaan responden dapat dibayar untuk upaya konservasi.

2. *General Accepted Accounting Practices* (GRAP) 103 (2011) menjelaskan penilaian historis aset ketika mereka diperoleh tanpa nilai nominal atau ketika mereka harus diukur pada nilai wajar. Aset historis dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai dengan menggunakan model biaya. Aset tidak memiliki masa manfaat yang terbatas dan tidak disusutkan. Entitas harus mengakui kelas aset warisan pada nilai revaluasiannya jika nilai wajar kelas aset warisan dapat ditentukan secara andal dalam model revaluasi untuk pengukuran selanjutnya. Nilai revaluasi adalah nilai wajar pada tanggal revaluasi. Dalam menentukan nilai wajar aset historis yang diperoleh dalam transaksi yang berdiri sendiri, entitas harus menerapkan prinsip-prinsip dalam bagian Pengukuran Nilai Wajar. Perusahaan kemudian dapat menerapkan model revaluasi atau model biaya historis ke GRAP 103..
3. PSAK No 16 (Revisi 2011) memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk Pilih model penskoran yang digunakan untuk setiap penggunaan metode biaya historis atau model revaluasi sebagai metode akuntansi inkremental. Berdasarkan model biaya, aset tetap, setelah diakui sebagai aset, diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selain itu, aset tetap berwujud yang nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal berdasarkan model Revaluasi dicatat sebagai aset pada saat penurunan nilai, yaitu nilai wajar pada tanggal saat di revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Terdaftar sampai tanggal penilaian ulang. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berubah secara material dari nilai wajar yang ditentukan pada akhir periode.

4. Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010, SAP menerapkan penilaian aset berdasarkan perolehan atau nilai pasar, sehingga revaluasi tidak diperbolehkan. Jika harga berfluktuasi secara signifikan, pemerintah dapat menilai kembali aset sehingga nilainya saat ini mencerminkan nilai pasar saat ini. Penggunaan nilai wajar dalam penilaian aset sejarah merupakan metode yang paling banyak dilakukan, terutama untuk benda bersejarah, yang selain memiliki nilai sejarah juga memiliki potensi manfaat lain bagi negara. Akan tetapi, teknik penilaian ini tidak berguna untuk semua aset historis, yang utama adalah yang tidak mempunyai harga pasar. Terkait dengan penggunaan nilai pasar aset sejarah, hal ini juga sangat tidak mungkin karena aset sejarah merupakan aset non komersial.

Beberapa teknik penilaian di atas umumnya berusaha memahami bagaimana tepatnya metode penilaian yang benar dapat diterapkan secara universal pada aset historis. Kemampuan untuk merekonstruksi nilai suatu aset mungkin tidak menghasilkan estimasi yang andal atas nilai awalnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perlakuan terhadap aset bersejarah menjadi suatu hal yang penting dan patut untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, Karena tidak semua aset yang di miliki oleh pemerintah dapat di nilai berdasarkan nilai wajar. Tujuan dari di laksanakannya penilaian terhadap aset bersejarah ini tidak lain dan tidak bukan dalah untuk mengetahui adanya suatu historical value yang terkandung di dalam bangunan atau aset tersebut. Bagi pemerintah daerah, hal ini dapat menjadi suatu nilai yang dapat meningkatkan daya serap wisatawan terhadap daerah tersebut, sebagai contoh adalah candi prambanan dan candi Borobudur. Kedua contoh bangunan bersejarah tersebut saat ini menjadi daya tari bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Dengan terdapatnya suatu nilai tambah bagi pemerintah maka ini menjadi suatu catatan di dalam akuntansi bahwa suatu aset bersejarah juga memiliki nilai yang dapat menghasilkan pemasukan bagi daerah. Atau bahkan bagi negara berdasarkan tingkat wisatawan dari luar negeri.



## AKUNTANSI PARIWISATA

**D**efinisi pariwisata menurut Undang–undang no 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa fasilitas yang dapat mendukung pariwisata diantaranya hotel, restaurant dan lokasi wisata yang terdiri dari wisata bahari, wisata alam, wisata religi, dan wisata budaya. Pariwisata banyak diminati oleh masyarakat sehingga para pelaku usaha wisata selalu melakukan inovasi untuk menarik para pengunjung. Selain inovasi dari segi marketing, para pelaku usaha juga harus memiliki kemampuan untuk bagaimana melakukan pembukuan yang baik agar hasil yang diperoleh dapat di evaluasi sesuai dengan yang sudah di targetkan. Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana akuntansi bagi para pelaku usaha wisata.

### AKUNTANSI PERHOTELAN

Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat menginap dan makan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Hotel merupakan akomodasi yang dikelola secara komersil dengan menyediakan jasa pelayanan, makan dan minum. Hotel digolongkan dalam jenis usaha dalam bidang jasa atau disebut jasa perhotelan. Sebuah perusahaan hotel tentunya dikelola dengan manajemen yang baik dan terstruktur. Dalam usaha hotel memiliki

bagian-bagian yang dapat mendukung kelancaran perusahaan yaitu Departemen operasional serta departemen administrasi dan umum. Departemen operasional terdiri dari bagian *Front Office*, *Housekeeping* dan *Food and Beverage*. Sedangkan bagian administrasi dan umum terdiri dari *Human Resource Departement*, *Marketing*, dan *Accounting*.

Semua bagian pada industri perhotelan sangatlah penting untuk menunjang kelancaran kegiatan perusahaan, salah satunya adalah bagian *accounting* atau pembukuan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pencatatan akuntansi perhotelan dilakukan agar dapat dilakukan pengecekan atau sebagai sistem pengendalian atas transaksi keuangan didalam perhotelan. Kemudian dari sistem pencatatan transaksi menjadi laporan keuangan yang memberikan manfaat bagi para pengguna, bagi pemilik dan pemegang saham untuk memperoleh informasi terkait kondisi hotel, bagi para manager juga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Bagi marketing dari laporan keuangan yang di buat berfungsi untuk menentukan harga jual, promosi dan lain sebagainya. Dari sisi *accounting* dapat dijadikan sebagai tolak ukur efisiensi yang sudah dilakukan. Dalam sistem pencatatan keuangan jasa perhotelan akuntansi memiliki bagian-bagian atau disebut siklus akuntansi perhotelan, siklus tersebut merupakan rangkaian proses pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan perhotelan.

Dalam penjualan produk usaha perhotelan memiliki karakteristik :

1. Produk yang dijual merupakan kombinasi barang dan jasa
2. Penjualan pada usaha hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga individu yang relatif rendah hampir sama dengan usaha retail.
  - a. Produk yang berbentuk barang yang dijual melalui proses produksi seperti perusahaan manufaktur

- b. Perusahaan harus mempunyai persediaan kapasitas (*capacity stock*) untuk dapat menjual produk berupa jasa
- c. Penjualan atas produk barang dan jasa dibebani atas pajak dan service (*tax and service*).

## **PENJUALAN PRODUK DAN JASA HOTEL**

### **Pendapatan Produk Hotel**

Hotel pada dasarnya adalah menjual jasa, akan tetapi dalam industri perhotelanpun terdapat pendapatan lain selain dari hasil menyewakan kamar, yaitu penjualan atas produk makanan dan minuman (*Food & Beverage Revenue*). Biasanya hotel menjual kamar yang sekaligus dengan paket makanan untuk sarapan pagi (*breakfast*) atau makan malam (*Dinner*) dalam penjualan produk makanan ini terdapat departemen yang mengelola yaitu *Food and Beverage Departemen* dimana tugas dan fungsi departemen *Food and Beverage* adalah memproduksi dan mengelola makanan yang kemudian dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi hotel. Pada penjualan *Food and Beverage* manager F&B berkolaborasi dengan *Cheff* dituntut untuk dapat berkreasi dan menciptakan produk makanan yang memiliki nilai jual. Sehingga selain kamar, lokasi dan fasilitas penunjang lainnya, *Food and Beverage* juga dijadikan sumber penghasilan dari industri perhotelan.

Dalam kegiatan memproduksi makanan tentu saja memerlukan bahan baku untuk dapat dijadikan bahan siap jual, dalam proses ini tentu saja akun yang digunakan adalah akun kas dan setara kas, piutang (*city ledger, guest ledger, credit card*), penjualan, pajak PHR selain akun pendapatan juga ada biaya yang menyertai untuk mendukung kegiatan produksi beberapa akun yang digunakan untuk mencatat beban yaitu inventori, biaya produksi *Food and Beverage*. Dalam proses penjualannya FBM (*F&B Manager*) mengeluarkan promo-promo menarik untuk menjual produk makanan dan minuman, mulai dari *A'la carte* (menu yang sesuai pada daftar menu) atau menu *buffet* yang diberikan untuk tamu-tamu group. Pada proses produksi dalam

pemakaian bahan baku maka ada pembebanan atas pemakaian bahan baku maka di bebankan pada *Food Cost* dan *Beverage cost*.

### **Pendapatan Jasa Hotel**

Dalam PSAK No 73 sewa merupakan kontrak perjanjian dimana pesewa memperoleh hak dari penyewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati kedua belah pihak dengan syarat pesewa melakukan pembayaran sewa kepada penyewa. Dalam pengakuan pendapatan jasa perhotelan dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam PSAK NO 23 tentang pendapatan. Muhamad Hasy Ashari dkk (2017) mengungkapkan bahwa pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan hotel GMP malang sesuai dengan PSAK No 23. Pendapatan jasa hotel merupakan pendapatan atas transaksi yang terjadi ketika tamu menginap di hotel, kemudian akan dicatat pada pendapatan kamar (*Room Revenue*) Akun yang digunakan pada siklus pendapatan jasa hotel yaitu akun piutang usaha diantaranya (*city ledger, guest ledger, credit card*) akun kas dan setara kas, akun penjualan, akun pajak PHR (*Government tax*) dan memungut uang jasa pelayanan kepada para konsumen atas nama karyawan. Uang service yang dibagikan kepada karywan biasanya diitung setelah dikurangi dengan *loss and breakage*. Ada dua kondisi dimana tamu melakukan chek in dengan melakukan pembayaran tunai atau dengan cara kredit. Berikut jurnal yang di buat apabila tamu melakukan *chek in* dengan pembayaran secara tunai :

(D) Kas xxx

(K) Pendapatan kamar (*Room sales*) xxx

Selain dengan pembayaran tunai, hotel juga memfasilitasi tamu dengan pembayaran kredit, pada kasus seperti ini biasanya dilakukan untuk tamu yang sudah memiliki perjanjian atau disebut dengan *letter credit/guarantee letter*. Dalam kasus ini perusahaan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

(D) City Ledger xxx

(K) Pendapatan Kamar (*Room sales*)

Akun piutang pada akuntansi perhotelan menggunakan istilah *city ledger*. Selain pendapatan kamar hotel juga memiliki pendapatan dari sumber penjualan atau penyewaan lainnya. Pada kegiatan transaksi penjualan atau penyewaan departemen operasional yang terkait yaitu *Front Office* dan *House keeping*. *Front Office* merupakan departemen yang kegiatan operasionalnya adalah menyiapkan kebutuhan untuk proses check in seperti kunci kamar, memastikan ketersediaan kamar, menyiapkan formulir registrasi check in, bekerja sama dengan kashier untuk memastikan pembayaran. Sedangkan departemen *House keeping* memastikan kebersihan kamar berikut fasilitas seperti menyiapkan air mineral, kesediaan handuk, dan ameunitis kamar seperti sabun, shampoo, sandal. Tugas departemen *housekeeping* dalam hal ini adalah berkoordinasi dengan *front office* untuk memastikan status kamar yang siap di jual atau tidak. Untuk kamar siap dijual biasanya departemen *house keeping* memberi keterangan dengan *Vacant* dan untuk kamar yang sudah terjual biasanya disebut dengan istilah *occupied*.

Selain *Room Revenue*, F&B Revenue ada juga Pendapatan hotel lainnya, yaitu pendapatan yang berasal dari penjualan non room dan F&B, yang termasuk kedalam pendapatan lain-lain seperti pendapatan *out bond*, spa, dan lain sebagainya di luar pendapatan *room revenue* dan *F&B*.

## **Penerimaan dan Pengeluaran Kas**

### **Penerimaan Kas**

Pada aktivitas penerimaan kas biasanya pada kondisi dimana hotel menerima kas atas transaksi yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi. Perusahaan hotel menerima kas atas dua kondisi yaitu pertama, kondisi dimana tamu membayar deposit sebagai down payment kemudian melunasi saat check in. Kedua, tamu melakukan check in akan tetapi belum terjadi pembayaran dengan uang biasanya tamu memberingkan *guarantee letter* sebagai jaminan. Penerimaan kas ini memerlukan pencatatan khusus untuk kas yang masuk kedalam perusahaan. akun yang termasuk kedalam penerimaan ini adalah Kas,

kas bank, guest deposit, piutang (*city ledger*). Segala bentuk aktifitas penerimaan kas oleh perusahaan hotel akan di catat pada masing-masing akunnya sesuai dengan transaksinya. akun yang digunakan dalam transaksi penerimaan kas antara lain, kas, bank, *guest ledger*, *city ledger*, *guest advance*.

### **Pengeluaran Kas**

Pengeluaran kas merupakan siklus dalam mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas keluar. Dalam pengeluaran kas ini biasanya disebabkan oleh pembelian produk atau jasa untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan perhotelan. Dalam kegiatan usahanya perusahaan perhotelan memerlukan barang dan jasa untuk kelancaran usahanya seperti dalam fasilitas kamar disediakan handuk, sandal, sabun shampoo dan fasilitas lainnya oleh akrena itu perusahaan harus membeli amenities tersebut kepada vendor. kemudian dalam kebersihan lingkungan seperti foting nyamuk, pembasmi lalat dan pembuangan sampah, perusahaan menggunakan jasa pihak lain untuk mengatasinya.

Dalam pencatatan pengeluaran kas biasanya dilakukan pembukuan khusus oleh *account payable*. Account payable menggolongkan setiap pembayaran berdasarkan vendor dan termin atau waktu. pada akhir bulan jurnal yang di catat harian akan terakumulasi didalam jurnal *account payable* dan jurnal *purchase* atau jurnal pembelian,. akun yang terlibat dalam pengeluaran kas adalah, kas, hutang, peralatan, perlengkapan, aset tetap.

### **Sistem penggajian (*Payroll system*)**

Gaji merupakan imbal balik yang diberikan kepada karyawan secara periodik. pada sistem panggajian hotel terdapat dua jenis yang akan diberikan kepada karyawan yaitu gaji pokok yang didasarkan pada level atau tingkat pegawai paling rendah mengikuti upah minimum kabupaten ataupun regional, disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan dengan karyawan. Selain gaji karyawan hotel juga menerima hak berupa uang service yang dhitung

berdasarkan penjualan yang diterima oleh pihak hotel dan dibebankan service kepada tamu. Porsi pembagiannya diberikan sesuai kebijakan perusahaan ada yang menerapkan pembagian secara merata atau dibagikan berdasarkan poin level didasarkan kepada kebijakan perusahaan. Dalam sistem penggajian karyawan hotel di hitung dan diajukan oleh bagaian HR (*Human Resources Departement*) kepada bagian accounting. dalam sistem penggajian tentu saja di berlakukan juga penghitungan atas jaminan kesehatan karyawan dan pajak penghasilan.

## **Beban**

Sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu saja memiliki tujuan salah satunya adalah mencapai laba yang optimal atau dapat mencapai laba sesuai dengan *budgeting* yang sudah dibuat dan disepakati. Laba atau rugi suatu perusahaan didasarkan pada pendapatan dan beban. Pendapatan didasarkan pada jumlah perolehan atas penjualan kamar dan penjualan makanan dan minuman atau penjualan lainnya. sedangkan beban dihitung berdasarkan pengeluaran atas pembelian produk dan jasa serta segala kegiatan operasional yang mengakibatkan timbulnya beban. Untuk menunjang kegiatan operasional hotel Beban merupakan biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

Dalam akuntansi beban merupakan pengurang pendapatan untuk menghitung laba. Dalam industri pariwisata beban yang timbul diantaranya beban operasional dan beban yang bersifat tetap. Yang termasuk kedalam beban operasional hotel adalah semua beban yang mempengaruhi kegiatan operasional hotel, seperti beban laundry untuk linen kamar hotel, pembelian *amenities* kamar seperti *complimentary facilities* yaitu pasta gigi, sikat gigi, sabun, sampo, sandal dan semua barang yang mendukung fasilitas kamar. beban yang dikategorikan ke dalam beban operasional penggunaannya dapat disesuaikan dengan jumlah hunian. Dalam pembebanan biaya operasional maka seluruh beban dicatat sesuai periode pengeluarannya secara accrual basic. Sedangkan ada biaya atau beban yang disebut

dengan fix cost, beban-beban ini biasanya di peruntukan seperti biaya listrik, biaya gaji, biaya maintenance aset dan biaya-biaya yang sifatnya rutin dengan asumsi meskipun tidak terjadi transaksi penjualan beban ini akan tetap dikeluarkan. Contoh pencatatan atas beban pada industry hotel adalah sebagai berikut :

Contoh pada transaksi laundry dengan transaksi pembayaran termin 1 bulan

Beban loundy	xxx
Utang laundry	xxx

Contoh pada pembayaran beban listrik

Beban listrik	xxx
Kas	xxx

**Persediaan (*Inventory*)**

Pada perusahaan perhotelan memiliki barang-barang persediaan yang perlu dicatat sebagai inventory. Pencatatan biasanya menggunakan kartu persediaan barang. Bagian dari siklus persediaan ini terdiri dari serangkaian proses yang berawal dari permintaan barang kemudian barang di berikan kepada *user*. Pada siklus persediaan ini terdapat barang yang bersifat langsung (*Direct*) dan tidak langsung (*Indirect*). Barang yang bersifat langsung biasanya barang tersebut tidak ada dalam persediaan atau barang harus dibelikan terlebih dahulu sesuai permintaan, rangkaian siklus pada barang *direct* yaitu :



Gambar 21 Rangkaian siklus pada barang *direct*

Pada siklus diatas maka tidak ada pencatatan pada kartu persediaan, artinya barang tersebut bukan termasuk pada barang persediaan, biasanya terjadi pada barang yang jarang dipakai atau

tidak rutin sehingga perusahaan langsung melakukan pembebanan tanpa melalui kartu persediaan. Atas transaksi diatas maka contoh jurnalnya adalah :

Pembelian Barang A	XXX	
Kas/utang vendor		XXX

Pada pembelian barang yang bersifat *Indirect* (tidak langsung) barang dikategorikan masuk kedalam persediaan terlebih dahulu alur mulai dari permintaan hingga distribusi nya adalah :

Jurnal pembelian barang stock

Persediaan barang A	XXX	
Kas/utang		XXX

Jurnal pada saat penyerahan barang dari gudang ke user

Beban barang A	XXX	
Persediaan barang A		XXX

Persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah dari jumlah penghitungan inventori yang dilakukan setiap akhir bulan. Contoh barang persediaan yang ada dalam industri perhotelan yaitu amenities seperti sabun, shampoo, sandal. Alur permintaan barang yang masuk kedalam barang persediaan ini yaitu :

1. *User* meminta barang ke bagian gudang menggunakan formulir *requestition form*
2. Bagian gudang mengeluarkan barang
3. Bagian gudang melakukan pencatatan pada kartu stok dan system pencatatan jika ada.

## SIKLUS AKUNTANSI PERHOTELAN

Siklus akuntansi merupakan proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Output dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Berikut merupakan tahapan dari siklus akuntansi:

## 1. Transaksi

Transaksi merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar dan handal untuk dicatat dan dibuktikan dengan dokumen. Transaksi dikatakan sah apabila di dukung lengkap dengan dokumen seperti kwitansi, nota penjualan, nota pembelian, faktur bukti dbet dari bank dan lain sebagainya.

## 2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan transaksi harian yang disusun berdasarkan akun suatu transaksi. Jurnal dalam transaksi perhotelan diantaranya jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal persediaan barang (inventory), jurnal penyesuaian atas penyusutan aktiva, pembayaran asuransi dibayar dimuka.

## 3. Buku Besar

Buku besar dalam akuntansi perhotelan biasa disebut juga dengan *General Ledger* yang berisikan saldo masing-masing akun yang berasal dari jurnal. Angka yang berada dalam buku besar ini kemudian yang akan tercantum pada lamporan keuangan perhotelan. Pada general ledger terdapat saldo akhir masing-masing akun, saldo periode bersajalan dan saldo akhir periode, atau saldo month to date dan year to date, hal tersebut memudahkan pemngguna laporan untuk melihat saldo dan membandingkan tiap periodenya.

## 4. Laporan Keuangan

Menurut PSAK No 1 Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kasmir mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini ata periode tertentu. jenis-jenis laporan keuangan perusahaan hotel adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas

- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

## ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN PERHOTELAN

Perusahaan perhotelan dalam praktiknya mengalami fluktuasi dalam menjalankan usaha, ketika pendapatan naik tidak diikuti dengan kenaikan laba dapat dimungkinkan terjadinya kenaikan beban yang tidak sesuai dengan naiknya pendapatan. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan perhotelan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan yaitu :

### 1. Rasio Liquiditas

Rasio liquiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan perusahaan dalam memnuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio liquiditas diantaranya: *Current ratio*, rasio ini digunakan untuk mengukur bagaimana semua hutang lancar pada perusahaan dapat ditutupi oleh aset lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio maka semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Rumus untuk menghitung Current Rasio yaitu :

$$Current\ ratio = \frac{Aktiva\ lancar}{Hutang\ lancar} \cdot X100\%$$

Gambar 22 Rumus *Current ratio*

*Quick Ratio*, rasio ini berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menguji seberapa banyak perusahaan memiliki aset untuk melunasi kewajibannya. Dalam rasio ini memperhitungkan kas dan item setara kas untuk perhitungan dan interpretasi. Rumus untuk menghitung quick ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar - persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

Gambar 23 Rumus *Quick ratio*

*Cash Ratio*, rasio ini digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya dengan cara membandingkan aset perusahaan yang paling likuid yaitu kas dengan kewajiban lancarnya. Rumus dalam menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas + setara kas}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

Gambar 24 Rumus *Cash Ratio*

## 2. Rasio Solvabilitas

Merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya dengan aset sebagai penjamin. Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio solvabilitas adalah sebagai berikut :

*Total debt to total aset* merupakan rasio untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal. Semakin rendah rasio ini semakin baik perusahaan dalam dapat menutupi hutang dengan aktiva. Rumus untuk menghitung *Total debt to total aset* adalah sebagai berikut :

$$\text{Total Debt to total aset} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Gambar 25 Rumus Total Debt to total aset

*Total debt to total liability* merupakan rasio yang membandingkan total hutang dan total modal, dalam rasio ini jumlah hutang tidak lebih besar dari jumlah modal

agar beban perusahaan tidak terlalu banyak. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah :

$$Total\ debt\ to\ total\ liability = \frac{Total\ Hutang}{Modal} \times 100\ %$$

Gambar 26 Rumus Total debt to total liability

### 3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan Rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Untuk menganalisis rasio profitabilitas ini menggunakan rasio sebagai berikut :

*Profit margin*, apabila rasio ini mendekati nilai 100% maka perusahaan memiliki kemampuan dalam mengumpulkan laba, rumus untuk memperoleh nilai profit margin adalah sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Laba\ bersih}{Pendapatan} \times 100\ %$$

Gambar 27 Rumus *Profit Margin*

*Gross Profit Margin* merupakan rasio untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau produksi. Rasio GPM yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus untuk menghitung Gross Profit margin yaitu :

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Gambar 28 Rumus *Profit Margin*

*Return on asset*, merupakan rasio keuangan untuk melihat efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila nilai rasio ini tinggi maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan asetnya. Rumus untuk memperoleh nilai ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Gambar 29 Rumus *Return on asset*

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit. Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas, diantaranya adalah :

*Total asset turnover ratio*, merupakan rasio untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Apabila nilai rasio ini dibawah 100% maka perusahaan dinilai kurang baik dari segi strategi pemasaran ataupun pengeluaran untuk investasi, untuk menghitung rasio *Total asset turnover ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Aset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Gambar 30 Rumus *Aset Turnover*

Rasio Perputaran Piutang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola penjualan secara kredit dan seberapa mudah perusahaan dalam memulihkan kredit dari pelanggan dalam periode tertentu. Apabila angka rasio ini tinggi atau mendekati 100% maka perusahaan memiliki efektivitas dalam pengelolaan piutang. Rumus untuk menghitung rasio ini yaitu :

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Rata-rata piutang}}$$

Gambar 31 Rumus Perputaran piutang

Rasio keuangan diperlukan dalam menilai kondisi perusahaan perhotelan untuk mengukur kinerja pada tiap periode. Sehingga manajemen dapat menentukan keputusan untuk masa yang akan datang terkait kebijakan, promosi, ekspansi, harga jual dan evaluasi beban-beban yang mempengaruhi.

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdulkarim, M. E., Umlai, M. I., & Al-Saudi, L. F. (2022). Culture, language, and accounting reform: a new perspective on IPSAS implementation. *Journal of Accounting & Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-01-2022-0006>
- Act Accounting Policy. 2009. Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Assets
- Aisa Tri Agustini dan Hendrawan Santosa Putra. 2011, Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah, JEAM Vol X No.1/2011. ISSN:1412-5366
- Aisa Tri Agustini. 2011, Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur), Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Jember
- Anasthasia B, Azalea; Efferin, S. (2018). Akulturasi budaya jawa dan sunda terhadap penerapan pengendalian manajemen pada PT. X. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2),431–442. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3191/2340>
- Aristantia, S. E., & Lating, A. I. S. (2021). Antara Aku, Jodohku dan Akuntansi. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v17i1.1013>
- Baatour, K., & Ben Saada, M. (2022). Regulatory accounting environment, cultural values and board efficacy in developing countries. *PSU Research Review*. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2021-0036>

- Bertrand, A. L. (1967). *Basic sociology: an introduction to theory and method* (First Edit). Appleton-Century-Crofts.
- BPS. (2011). *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia: hasil analisis sensus penduduk 2010*. BPS.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston, *Essential of Financial Management*, Penerjemah: Ali Akbar Yulianto, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Burritt, R. L., & Christ, K. L. (2017). The need for monetary information within corporate water accounting. *Journal of Environmental Management*, 201, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.035>
- Burritt, R. L., & Tingey-holyoak, J. (2012). Forging cleaner production : the importance of academic-practitioner links for successful sustainability embedded carbon accounting. *Journal of Cleaner Production*, 36, 39–47. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.02.001>
- Carl.S. Warren et al. 2018. Pengantar akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Asner, G. P., & Pittman, A. M. (2012). Carbon emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. *Nature Climate Change*, 2(10), 1–5. <https://doi.org/10.1038/nclimate1702>
- Chua, W. F. (1986). Radical developments in accounting thought. *American Accounting Association*, 61(4), 601–632. <https://www.jstor.org/stable/247360>
- Chung, J., & Molson, J. (2018). *Current Trends within Social and Environmental Accounting Research : A Literature Review \**. 17(2), 207–239. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12171>
- Cornell, R. M., & Warne, R. C. (2016). Accounting guidance flexibility, auditors' ethical characteristics, and blame. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 19, 97–125. <https://doi.org/10.1108/S1475-148820160000019004>

- Dalci, İ., & Özyapıcı, H. (2018). Cultural values and students' intentions of choosing accounting career. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(1), 179–196. <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2016-0072>
- Dey, C. (2007). Social accounting at Traidcraft plc: A struggle for the meaning of fair trade. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 423–445. <https://doi.org/10.1108/09513570710748571>
- Driskill, T., & Rankin, R. (2020). Cross-cultural comparison of ethical reasoning of students in China and the United States. *Accounting Education*, 29(3), 291–304. <https://doi.org/10.1080/09639284.2020.1760114>
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, spiritualitas dan kearifan lokal: beberapa agenda penelitian kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466–480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Efferin, S., & Hartono, M. S. (2015). Management control and leadership styles in family business: An Indonesian case study. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 11(1), 130–159. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2012-0074>
- Efferin, S., & Hopper, T. (2007). Management control, culture and ethnicity in a Chinese Indonesian company. *Accounting, Organizations and Society*, 32(3), 223–262. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.03.009>
- Elizabeth Warren & Amelia Warren Tyagi in their book. (2005). All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan.
- Ermasova, N., Haumann, C., & Burke, L. (2021). The relationship between culture and tax Evasion across countries: Cases of the USA and Germany. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 115–131. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672181>
- Espa, F., & Triwuyono, I. (2011). *Konstruksi Bentuk Akuntansi Keluarga (Pendekatan Hipnometodologi)*

- Espa, V. (2011). *Konstruksi Bentuk Akuntansi Keluarga (Pendekatan Hipnometodologi)*. Tesis, dipublikasikan. Universitas Brawijaya.
- Fadhila, Luthfatil, Nuraril, Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Hotel Bahagia, Skripsi Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Muhamadiyah Makassar, 2021.
- Federal Accounting Standard Board. 2006. Measurement and Reporting for MultiUse Heritage Assets. Statement of Federal Financial Accounting Standards (SFFAS) No.16. Washington, DC:FASB
- Financial Reporting Statements (FRS) 30 .2009. Heritage Assets.Accounting Standards Board United Kingdom
- Fülbier, R. U., & Klein, M. (2015). Balancing past and present: The impact of accounting internationalisation on German accounting regulations. *Accounting History*, 20(3), 342–374. <https://doi.org/10.1177/1032373215595300>
- Gafur, A., Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas berbasis amanah pada Pondok Pasantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 95–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Grady, P. (1965). Inventory of generally accepted accounting principles in the United States of America. *American Accounting Association*, 40(1), 21–30. <https://www.jstor.org/stable/242622>
- Graham, P. J., & Sathye, M. (2020). The relationship between national culture, capital budgeting systems and firm financial performance: evidence from Australia and Indonesia. *International Journal of Management Practice*, 13(6), 650. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2020.110699>
- Graham, P. J., & Sathye, M. (2020). The relationship between national culture, capital budgeting systems and firm financial performance: evidence from Australia and Indonesia. *International Journal of Management Practice*, 13(6), 650. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2020.110699>

- Gröjer, J.-E., & Stark, A. (1977). Social accounting: A Swedish attempt. *Accounting, Organizations and Society*, 2(4), 349–385. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(77\)90024-1](https://doi.org/10.1016/0361-3682(77)90024-1)
- Hanafi, Mamduh M. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Hanif, H. (2015). Management control system design: an interpretive ethnography. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 119–126. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.018>
- Hanif, H. (2015). Management control system design: an interpretive ethnography. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 119–126. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.018>
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2019). The construction of entrepreneurial accounting: evidence from indonesia. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 7(2), 104–117. [https://doi.org/10.35609/gjbssr.2019.7.2\(1\)](https://doi.org/10.35609/gjbssr.2019.7.2(1))
- Hanif, H., Rakhman, A., Nurkholis, M., & Pirezada, K. (2019). Intellectual capital: extended VAIC model and building of a new HCE concept: the case of Padang restaurant Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 2019(Special Issue), 1–15. [https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article\\_23\\_se\\_gbcss\\_2019.pdf](https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_23_se_gbcss_2019.pdf)
- Hanif, Ludigdo, U., Rahman, A. F., & Baridwan, Z. (2015). *Akuntansi bagi hasil sistem mato etnografi bisnis restoran Padang*. Mitra Wacana Media.
- Hapsari Ghozie, Prita. 2013. *Make It Happen?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. W., & Suwardy, T. (2012). *Akuntansi keuangan: international financial reporting standards-IFRS* (S. Saat (ed.); kedelapan). Penerbit Erlangga.
- Hasanah, L. (2019). Urgensi Akuntansi dalam Mengatasi Problematika Keuangan

- Hasym, Ashari, Muhamad, dkk, *Implementasi PSAK No 23 Terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa Pada Industri Dan Pengaruh Perpajakannya*, Seminar Internasional Sistem Informasi 2017, UNMER Malang.
- Hery. (2016). *Akuntansi untuk SMK/MAK & SMA/MA (buku penunjang/pengayaan materi)* (Kedua). Grasindo.
- Hidayat, M. (2018). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVITAS AGRIKULTUR PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAPTAR DI BEI MENJELANG PENERAPAN PSAK 69. *Measurement*, 36-44.
- Hutasoit, H., & Mulya, H. (2016). Akuntansi harta dalam masyarakat Batak Toba. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–21.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Cetakan Keempat. Salemba Empat : Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No 71 Instrumen Keuangan*, Jakarta : 2020
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No 72 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan*, Jakarta : 2017
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No 73 Tentang Sewa*, Jakarta : 2017
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *PSAK 23 tentang pendapatan Jasa Pasien*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jayasinghe, K. (2021). Constructing constructivism in management accounting education: reflections from a teaching cycle with innovative learning elements. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 18(2), 282–309. <https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2020-0067>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(8), 2139–2166. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous

- communities: evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(8), 2139–2166.  
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Kahar, A., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2013). Management control systems concept construction of “pangngadereng” based on local wisdom values. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(2), 21–30.  
<https://doi.org/10.9790/487X-0822130>
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Keluarga di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Ketapang, K. (2020, Mei 29). *KPPN Ketapang*. Retrieved from [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id):  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3081-perlakuan-akuntansi-aset-biologis-menurut-sap-dan-sak.html>
- Kieso Donald, Weygant, J. Jerry, dan Paul D. Kimmel. 2009 *Accounting Principles, Salemba Empat* : Jakarta
- Kim, N., Oh, S., & Han, E. (2022). Effects of a reflective cultural audit intervention on multicultural and social justice counselling competencies of counselling students. *Counselling and Psychotherapy Research*, 22(4), 861–867.  
<https://doi.org/10.1002/capr.12560>
- Kluckhohn, C. (1951). The study of culture. In D. Lerner & H. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences* (pp. 86–110). Stanford University Press.
- Koentjaraningrat. (1981). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar ilmu antropologi*. Penerbit Aksara Baru.
- Lannai, D., & Prabowo, M. A. (2016). Strengthening the auditor ethics with Bugis culture value in phenomenology perspective at Makassar-Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(November), 263–274.  
<http://ajbasweb.com/old/ajbas/2016/November/263-274.pdf>

- Lannai, D., & Prabowo, M. A. (2016). Strengthening the auditor ethics with Bugis culture value in phenomenology perspective at Makassar-Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(November), 263–274. <http://ajbasweb.com/old/ajbas/2016/November/263-274.pdf>
- Lassila, E. M. (2022). “Free”-to-play game: governing the everyday life of digital popular culture. *Critical Perspectives on Accounting*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102434>
- Lely Cristanti, I., Iga Luhsasi, D., & Sambara Sitorus, D. (2021). Pandemi Covid- 19: Pengaruh Perilaku Konsumtif Dan Mental Accounting Terhadap pengelolaan Keuangan Mahasiswa Fkip Uksw. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Luke Infinger, 2017, *The Importance Of Accounting For A Healthcare Office*
- Manurung, D. T. H., & Sinton, J. (2013). Urgensi Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga (Studi Fenomenologis pada Dosen–Dosen Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung). *Journal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3.
- Mathews, M. R., & Perera, M. H. B. (1996). *Accounting theory & development* (3rd ed). Thomas Nelson Australia.
- Megananda. (2020). Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Lingkungan pada RS Perkebunan dan RSUD Balung di Kabupaten Jember: Pendekatan Obesrvasional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 5(3), 248–253.
- Morgan, D. (1997). *Focus groups as qualitative research*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412984287>
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi paradigma akuntansi: refleksi atas pendekatan sosiologi dalam ilmu akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 155–171. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086>
- Mulya, H., Sukoharsono, E. G., Djamhuri, A., & Baridwan, Z. (2014). Exploring the accounting treatment ancestor in Sultan Syarif Kasim II era. *International Journal of Business and*

- Management Invention*, 3(12), 34–41. [https://www.ijbmi.org/papers/Vol\(3\)12/Version-1/E031201034041.pdf](https://www.ijbmi.org/papers/Vol(3)12/Version-1/E031201034041.pdf)
- Mulya, H., Sukoharsono, E. G., Djumhuri, A., & Baridwan, Z. (2016). *Metode penelitian kualitatif akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim kerajaan Siak Rri Inderapura (1908-1946)*. Mitra Wacana Media.
- Mulya, H., Sukoharsono, E. G., Djumhuri, A., & Baridwan, Z. (2016). *Metode penelitian kualitatif akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim kerajaan Siak Rri Inderapura (1908-1946)*. Mitra Wacana Media.
- Munawir, S. (2005). *Analisis laporan keuangan*. Liberty.
- Nastiti, A., dan Hardiningsih, P. (2022). *Determinan Pengungkapan Emisi Karbon*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.4, No.6, 2022. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1155>
- Nur'aini, Sriyuniarti, F., & Andriani, W. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 (Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1-7.
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Pahl, J. (2000). Couples and their money: Patterns of accounting and accountability in the domestic economy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(4), 502–517. <https://doi.org/10.1108/09513570010338078>
- Panggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan budaya lokal dalam akuntabilitas keuangan Gereja Kristen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 601–619. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.34>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pepper, S. C. (1958). *The sources of value* (First). University of California Press.
- Peraturan Pemerintah No.71, 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).
- Pertanian, K. (2019). *Kementerian Pertanian*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perkebunan: <https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/sejarah/>
- Prabowo, M. A. (2017). Praktik ekonomi islam dalam Suku Bugis Bone (suatu studi etnografi ala Spradley). In Yasdin, M. Takbir, M. A. Aziz, A. Kurniardi, & H. Hamzah (Eds.), *Prosiding konsolidasi keilmuan nasional mahasiswa pascasarjana di Indonesia “bersinergi menuju kedaulatan bangsa: upaya refleksi, proyeksi, & resolusi masalah negara”* (pp. 81–91). Gadjah Mada University Press.
- Prabowo, M. A. (2018). *Akuntansi dalam kebudayaan Bugis* (I. Thoriq (ed.)). Kota Tua.
- Prabowo, M. A. (2018). *Akuntansi dalam kebudayaan Bugis* (I. Thoriq (ed.)). Kota Tua.
- Prabowo, M. A. (2019). *Konstruksi kode etik akuntan publik perspektif nilai budaya bugis “suatu studi etnografi ala spradley”* [Universitas Mercu Buana Jakarta]. <https://repository.mercubuana.ac.id/46604/>
- Prabowo, M. A., & Kalsum, U. (2021). Te’seng accounting as an alternative in realizing sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 565–582. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32>
- Prabowo, M. A., & Kalsum, U. (2021). Te’seng accounting as an alternative in realizing sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 565–582. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32>

- Prabowo, M. A., & Mulya, H. (2018). Construction of Ethic Code of Public Accountant in Perspective of Value of Bugis Culture. *International Journal of Applied Business and International Management*, 3(2), 5–18. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.156>
- Prabowo, M. A., & Mulya, H. (2018). Construction of Ethic Code of Public Accountant in Perspective of Value of Bugis Culture. *International Journal of Applied Business and International Management*, 3(2), 5–18. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.156>
- Pratiwi, D. (2018). *Implementasi Carbon Emission Disclosure di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB), Vol.13, No.2, 2018.* <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p04>
- Pudjiadi, Prestige, Tbk. *Annual Report 2020*, Jakarta: <https://pudjiadiprestige.co.id>, 2021
- Purwaji, A., & Dkk. (2016). *Akuntansi Biaya Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Rachmawati, Y., Oktariyani, A., & Ermina. (2019). Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 pada Perusahaan Perkebunan (Studi Kasus PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk). *Akuntansi dan Manajemen*, 130-145.
- Rahmah, T. S. (2017). *Pengaruh sistem bago hasil “maro” terhadap kesejahteraan masyarakat petani Desa Kubang Puji Pontang Serang*.
- Rahmawati, A., Tsamrotussaadah, I., Salsabila, Z., dan Maulana, A. (2021). *Peran Akuntansi Karbon Pada Perusahaan Dalam Pencegahan Global Warming*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.17, No.2, 2021. <http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2021.172.399>
- Randa, F., & Daromes, F. (2014). Transformasi nilai budaya lokal dalam membangun akuntabilitas sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477–484. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5035>

- Rohani, S. T., Siregar, A. R., Rasyid, T. G., Aminawar, M., & Darwis, M. (2019). Perception and motivation and its effect on the farmers decision to conduct beef cattle business partnership system (teseng). *AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE*, 13(2), 68–76. <https://doi.org/10.22587/aejsa.2019.13.2.8>
- Rohani, S. T., Siregar, A. R., Rasyid, T. G., Aminawar, M., & Darwis, M. (2020). Differences in characteristics of farmers who do and do not conduct a beef cattle business partnership system (teseng). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 486(1), 012–047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/486/1/012047>
- Rohani, S., Siregar, A. R., Rasyid, T. G., Aminawar, M., & Darwis, M. (2020). The farmer competency that doing partnership systems (teseng) in beef cattle business at Bone regency, South Sulawesi province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 492. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/492/1/012148>
- Rowles, Tom (1992), *Infrastructure and Heritage Assets Accounting*, Australian
- Rozzaki, A. D., & Yuliati, Y. (2022). Urgensi Penerapan Akuntansi Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 69– 82. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.601>
- Salampessy, Z., Triyuwono, I., Irianto, G., & Hariadi, B. (2018). Pancasila paradigm: methodology of wawasan nusantara for accounting of pancasila. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(1), 102–117. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i1.7>
- Sarwono, S. W. (2014). *Psikologi lintas budaya*. Rajawali Pers.
- Setiowati, N. E. (2016). *Perempuan, Strategi Nafkah dan Akuntansi Rumah Tangga*
- Setyaningrum, W. (2015). *ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA*

- BERKEMBANG*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.2, 2015. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6108>
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi rumah adat ammatoa dalam akuntabilitas organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59–76. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- ShiraeV, E. B., & Levy, D. A. (2012). *Psikologi lintas kultural: pemikiran kritis dan terapan moderen*. Kencana Prenada Media Grup.
- Siregar, N. B. (2019). *Akuntansi Perkebunan*. Medan: USU Press.
- Sithole, S. T. M., & Abeysekera, I. (2021). Comparing accounting students' instructional preferences: Australia and Zimbabwe. *Journal of International Education in Business*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2018-0037>
- Soemarso, S. R., 2002, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku Dua, Edisi Ketiga, Penerbit Rineka Cipta : Jakarta
- Suhardjono, I. B. (2006). *Akuntansi perbankan* (Kedua). Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Pengantar akuntansi* (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Sukoharsono, E., & Gaffikin, M. (1993). Power and knowledge in accounting: Some analysis and thoughts on social, political, and economic forces in accounting and profession in Indonesia (1800-1950s). *Faculty of Commerce-Accounting & ....* <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=accfinwp>
- Suojanen, W. W. (1954). Accounting theory and the large corporation. *American Accounting Association*, 29(3), 391–398. <https://www.jstor.org/stable/241556>
- Suwarni, A., & Arman, S. (2017). Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>

- Suyudi, & et al. (2020). Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188–216.
- Tang, H., & Bao, Y. (2020). Social justice and K-12 Teachers' effective use of OER: a cross-cultural comparison by nations. *Journal of Interactive Media in Education*, 2020(1). <https://doi.org/10.5334/jime.576>
- Taurisianti, M. M., & Kurniawati, E. P. (2016). *Perlakuan Akuntansi Karbon di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 105. <https://doi.org/10.24914/jeb.v17i2.273>
- Thorne, L. (2000). The development of two measures to assess accountants' prescriptive and deliberative moral reasoning. *Behavioral Research in Accounting*, 12(1), 139–169. [https://www.researchgate.net/publication/288009414\\_The\\_development\\_of\\_two\\_measures\\_to\\_assess\\_accountants'\\_prescriptive\\_and\\_deliberative\\_moral\\_reasoning](https://www.researchgate.net/publication/288009414_The_development_of_two_measures_to_assess_accountants'_prescriptive_and_deliberative_moral_reasoning)
- Titus, H., Smith, M., & Nolan, R. (1994). *Living issues in philosophy* (Ninth). Oxford University Press.
- Tricker, R. I. (1979). Research in accounting: purpose, process and potential. *Accounting and Business Research*, 10(37), 3–15. <https://doi.org/10.1080/00014788.1979.9728734>
- Tylor, E. B. (1903). *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom* (4th ed). John Murray.
- Vašiček, V., Poljašević, J., & Letica, M. (2018). The comparison of public sector accounting between Croatia and Bosnia and Herzegovina. In A. Karasavoglou, P. Delias, S. Goić, & P. Polychronidou (Eds.), *Springer Proceedings in Business and Economics* (1st ed., pp. 469–484). 319-70377-0 Publisher Springer Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-70377-0\\_32](https://doi.org/10.1007/978-3-319-70377-0_32)
- Velinov, E., Ashmarina, S. I., & Zotova, A. S. (2020). Participatory budgeting in city of Prague: boosting citizens' participation in local governance through digital tools (case study). In J.

- Kacprzyk, F. Gomide, O. Kaynak, D. Liu, W. Pedrycz, M. M. Polycarpou, I. J. Rudas, & J. Wang (Eds.), *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 84, pp. 189–197). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5\\_24](https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_24)
- Widyaysky. 2000. (Dalam UPP UT. 2000. Manajemen dan Keuangan Dalam Ekonomi Kesehatan. Jakarta: PPJK Kementrian Kesehatan Republik Indonesia)
- Williams, R. M. J. (1972). *Value the concept of values: in the internasional encyclopaedia of the sosial scoiences*. Collier-MacMillan Publishers.
- Wiratno, A., dan Muaziz, F. (2020). *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.22, No.1, 2020. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i1.1562>
- Yadiati, 2010. *Teori Akuntansi : Suatu Pengantar*. PT.Kencana : Jakarta.
- Yamamoto, K., & Noguchi, M. (2013). Different scenarios for accounting reform in non-Anglophone contexts: the case of Japanese local governments since the 1990s. *Accounting History*, 18(4), 529–549. <https://doi.org/10.1177/1032373213509678>
- Yudharma, A.S., Nugrahanti, W.Y., & Kristianto, A. B. (2016). Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility. *DeReMa Jurnal Manajemen*, 11(2), 171–190.
- Yuliana, R., Setiawan, A. R., & Auliyah, R. (2020). Akuntansi Keluarga Sakinah Sebagai Manifestasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 479–499. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.28>
- Yulianti, M. (2016). Akuntansi dalam Rumah Tangga : Study Fenomenologi pada Akuntan dan Non Akuntan. *Akuntansi*

- Dan Manajemen*, 11(2), 62–75. <https://doi.org/10.30630/jam.v11i2.93>
- Yulianti, M. (2016). *Akuntansi Dalam Rumah Tangga: Study Fenomenologi pada Akuntan dan Non Akuntan*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 11 No. 2
- Zarei, H., Yazdifar, H., Dahmarde Ghaleno, M., & Namazi, N. (2022). National culture and public-sector budgeting: the mediating role of country-level institutions using a structural equation modeling approach. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(3), 686–714. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2020-0102>
- Zhang, X., Husnain, M., Yang, H., Ullah, S., Abbas, J., & Zhang, R. (2022). Corporate business strategy and tax avoidance culture: moderating role of gender diversity in an emerging economy. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.827553>

## BIODATA PENULIS



### 1. Rafles Ginting, S.E., M.Ak.



Rafles Ginting, S.E., M.Ak. Lahir di Bengkulu 26 Juli 1991, menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu, Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Saat ini menjadi dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Universitas Tanjungpura. Penulis merupakan pendiri organisasi Salt Shaker Generation dan Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Penulis merupakan ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi periode 2021-2024. Beberapa buku yang sudah pernah ditulis antara lain: Pendidikan Anti Korupsi, Analisa Big Data, dan Akuntansi Budaya.

### 2. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., BKP.



Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., BKP. Penulis adalah Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Penulis juga seorang praktisi dan aktif menjadi peneliti / narasumber / *trainer* pelatihan dan riset di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis berpengalaman dalam hibah penelitian dan pengabdian kompetitif nasional, *Islamic Development Bank* (IsDB), kerjasama dengan pihak DUDI, serta hibah internal Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional, serta reviewer kegiatan Program Praktisi Mengajar Kemendikbudristek. Pada saat ini penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 35 buah buku.

email: galih.fisip@unej.ac.id

### 3. Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak.



Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak., Lahir di Sintang, 25 Mei 1989 merupakan Dosen Aktif di Universitas Tanjungpura Pontianak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pendidikan formal yang ditempuh penulis, S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Magister Akuntansi (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Universitas Tanjungpura. Selain Pendidikan formal penulis juga mendapatkan pendidikan informal berupa pelatihan Brevet Pajak A dan B yang di laksanakan oleh Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Sertifikasi yang di miliki oleh Penulis adalah *Certified Internal Auditor Profesional (CIAP)* dan *Certified Profesional Risk Management (CPRM)*. Selain aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Penulis Juga Merupakan Dosen Pembina *Tax Center Community (TCC)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura serta Auditor Mutu Internal (AMI) Universitas Tanjungpura.

### 4. Lilly Anggrayni S.E., M.S.A.



Lilly Anggrayni S.E., M.S.A., merupakan dosen tetap program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado khusus untuk mata kuliah Akuntansi. Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014 dan Alumni Magister Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2018. Publikasi terbaru beliau antara lain:

1. Almaqashid Syariah Performance in Islamic Bank.
2. The Role of Social Capital in Increasing the Firm Performance.
3. The Evolution of Environmental Accounting: A Literature Review and Future Direction.
4. Is Maqashid Syariah Important for Islamic Bank?

## 5. **Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak.**



Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak. lahir pada tanggal 09 September tahun 1993 di Dusun Ujung, Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara yang dibesarkan dari keluarga seorang petani. Riwayat pendidikan antara lain SD Inpres 12/79 Parippung, SMP N 1 Barebbo, SMK

Negeri 1 Watampone (Akuntansi), Universitas Muslim Indonesia (S1 Akuntansi), Universitas Mercu Buana Jakarta (S2 Akuntansi) dan sedang menempuh Program Doktorat ilmu Akuntansi di universitas Sultan Ageng Tirtayasa (S3 Akuntansi). Motto hidup "***Tidak ada titik dalam perjuangan***" menurutnya karena kalangan bawah, jadi saya pikir butuh perjuangan yang keras dalam menapaki hidup ini untuk mencapai impian di masa depan. Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan aktif menulis jurnal, buku dan opini di media nasional. Beberapa jurnal yang telah diterbitkan: *Strengthening the Auditor Ethics with Bugis Culture Value in Phenomenology Perspective at Makassar-Indonesia*; *Praktik Ekonomi Islam Dalam Suku Bugis Bone (Suatu Studi Etnografi Ala Spradley)*; *Construction of ethic code of public accountant in perspective of value of bugis culture*; *Te'seng Accounting as an Alternative in Realizing Sustainable Development Goals*; *Akuntansi Politik: Faktor Politik dalam Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Papua*; dan *Buku Akuntansi dalam Kebudayaan Bugis*. Aktif menulis tema Akuntansi Multiparadigma; Akuntansi Budaya; dan Akuntansi Keperilakuan serta terbuka untuk berkolaborasi dalam kepenulisan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui [ma.prabowo@unusia.ac.id](mailto:ma.prabowo@unusia.ac.id).

## 6. Riri Rumaizha, S.E., M.Ak.



Riri Rumaizha, S.E., M.Ak., Lahir di Bandung, 20 Februari 1983 merupakan Dosen Aktif di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Program Studi Akuntansi. Pendidikan formal yang ditempuh penulis, Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi STIE YPKP Bandung, Magister Akuntansi (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung. Selain pendidikan formal penulis juga mendapatkan pendidikan informal berupa pelatihan Brevet Pajak A dan B yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Selain aktif mengajar di Politeknik LP3I Penulis juga merupakan Ketua *Tax Center* LP3I serta Ketua ISEI Komisariat LP3I. Penulis juga aktif sebagai wakil ketua bidang seminar, pelatihan dan konferensi ISEI Koordinator Jawa Barat.

## 7. Nitri Mirosea, SE.,M.Si.,M.AAC,CFE.,Ph.D.



Nitri Mirosea, SE.,M.Si.,M.AAC,CFE.,Ph.D. Lahir di Sukabumi tahun 1979. Menyelesaikan S1 nya di Universitas Pakuan Bogor, Jurusan Akuntansi tahun 2001. Pada tahun 2008 lulus dari Magister Ilmu Manajemen di Universitas Halu Oleo dan tahun 2011 lulus dari Magister Accounting and Control di The Hague University of Applied Science, Den Haag, The Netherlands. Gelar Doktor dibidang *Public Sector Accounting* diperoleh dari Griffith University, Australia tahun 2018. Sejak 2008 sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Halu Oleo, STIE, STIKES, Kendari. Untuk pengembangan kompetensi sebagai akademisi bergabung dalam ICMA, lembaga profesi sebagai DPN sejak tahun 2021 pada bidang Humas dan Kerjasama. Aktif sebagai peneliti dan pembicara di Forum Seminar Nasional dan

Internasional. Telah menulis dan menerbitkan dua (2) Book Chapter - Akuntansi Sektor Publik dan Riset Perspektif Budaya.

#### **8. Eka Retnowati, SE, Akt., M.Ak., CA**



Eka Retnowati, SE, Akt., M.Ak., CA lahir di Tegal, 3 Maret 1985 menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas diponegoro tahun 2008, Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2010 dan Magister akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2018. Ini penulis pernah mengajar di Universitas Pandanaran semarang dan sekarang aktif pada universitas terbuka. Matakuliah yang diampu akuntansi keuangan lanjutan 1 dan Auditing II

#### **9. Elsa, M.Ak.**



Elsa, M.Ak, lahir di Serang, 06 Oktober 1985, menyelesaikan studi dari sarjana ekonomi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini, penulis merupakan dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.